

Nomor : SR.03.01/C/66/2025

26 Februari 2025

Lampiran : satu berkas

Hal : Umpan Balik Hasil Pemetaan Risiko Penyakit Infeksi Emerging Tahun 2024

Yth. (daftar terlampir)

Dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap munculnya ancaman penyakit infeksi emerging (infem), maka diperlukan pemetaan risiko secara berkala dengan mempertimbangkan parameter ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Untuk mendukung hal tersebut, telah dikembangkan 11 tools pemetaan risiko penyakit infeksi emerging dari tahun 2017 untuk penyakit MERS, Difteri, Polio, Penyakit virus Hanta, Penyakit virus Nipah, COVID-19, Legionellosis, Mpox, Meningitis Meningokokus, *Avian Influenza*, dan Penyakit virus Zika. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan umpan balik pemetaan risiko penyakit infem tahun 2024:

1. Sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran kesehatan mulai dari pusat sampai daerah, maka pemetaan risiko penyakit infem ini dijadikan sebagai salah satu penilaian indikator Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024.
2. Mulai tahun 2023, sebagai tindak lanjut dari hasil pemetaan risiko penyakit infem maka ditambahkan indikator baru yaitu persentase kabupaten/kota yang membuat rekomendasi terhadap semua penyakit infem yang dilakukan pemetaan risiko dibuktikan dengan dokumen yang sudah di ditandatangani oleh pimpinan.
3. Apresiasi juga kami sampaikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang telah melakukan pemetaan risiko penyakit infem dan penyusunan dokumen rekomendasi dari hasil pemetaan risiko tersebut.
4. Berikut disampaikan umpan balik hasil pemetaan risiko tahun 2024 yang telah dilakukan oleh kabupaten/kota hingga per 31 Desember 2024:
 - a. Target indikator pemetaan risiko penyakit infem di tahun 2024 yaitu 100% dari jumlah seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia, sedangkan capaian tahun 2024 sebanyak 96,69% (497 kabupaten/kota). Masih terdapat 3,31% (17 kabupaten/kota) dari 5 Provinsi yang belum melakukan pemetaan risiko penyakit infeksi emerging lengkap untuk tiga penyakit (MERS, Difteri, dan Polio).
 - b. Jumlah kabupaten/kota yang mengisi tools MERS sebanyak 499 kabupaten/kota, tools Difteri sebanyak 500 kabupaten/kota, dan tools Polio sebanyak 498 kabupaten/kota.
 - c. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi untuk penyakit penyakit MERS sebesar 27,7% (138 kabupaten/kota); penyakit Difteri sebesar 29% (145 kabupaten/kota); dan Polio sebesar 39% (194 kabupaten/kota). Persebaran setiap Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Lampiran 3.
 - d. Terdapat beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan perubahan derajat risiko di tahun 2024 dibandingkan derajat risiko di tahun 2023. Persebaran perubahan derajat risiko Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Lampiran 3.

- e. Perubahan derajat risiko terjadi karena adanya perubahan nilai ancaman, kerentanan, dan kapasitas, serta pada tahun 2024 terdapat perubahan *cut-off point* nilai risiko berdasarkan evaluasi tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Perubahan *cut-off point* Nilai Risiko Pemetaan Risiko Penyakit Infeksi Emerging

Penyakit	Tahun	Rendah	Sedang	Tinggi
MERS	2023	<171	171-282	>282
	2024	<26	26-116	>116
Difteri	2023	<21	21-47	>47
	2024	<6	6-21	>21
Polio	2023	<15	15-23	>23
	2024	<8	8-20	>20

- f. Target indikator penyusunan rekomendasi infem di tahun 2024 yaitu 50% dari jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan pemetaan risiko, sedangkan capaian tahun 2024 sebanyak 95,77% (476 kabupaten/kota).
- g. Jumlah kabupaten/kota yang mengumpulkan dokumen rekomendasi penyakit MERS terdapat sebanyak 476 kabupaten/kota (95,39%), Difteri sebanyak 476 kabupaten/kota (95,2%), dan Polio sebanyak 476 kabupaten/kota (95,6%).
- h. Masih terdapat 21 kabupaten/kota dari yang mengisi tools lengkap (4,23%) yang tidak mengumpulkan dokumen rekomendasi.
- i. Hasil rekapitulasi nasional isu prioritas dan rekomendasi dari kabupaten/kota yang telah menyusun rekomendasi pemetaan risiko tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 5. Sedangkan hasil rekapitulasi isu prioritas dan rekomendasi per provinsi dapat diakses pada link:
<https://link.kemkes.go.id/UmpanBalikPetaRisikoPIEperProvinsi>
- j. Sehubungan dengan hasil pemetaan risiko tahun 2024, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Lintas Program di Kementerian Kesehatan dan Lintas Sektor. Hal tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit,



dr. Yudhi Pramono, MARS
NIP 197603192006041001

Lampiran 1

Nomor : SR.03.01/C/66/2025

Tanggal : 26 Februari 2025

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
2. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan
4. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan
5. Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Kementerian Kesehatan
6. Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan
7. Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Infeksi Prof. dr. Sulianti Saroso
8. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan
9. Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan
10. Kepala Balai Besar/Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat se-Indonesia
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi se-Indonesia
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Indonesia

Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit,



dr. Yudhi Pramono, MARS

NIP 197603192006041001

DAFTAR LAMPIRAN

1. [Lampiran 2. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dari Hasil Pemetaan Risiko Tahun 2024](#)
2. [Lampiran 3. Resume Hasil Pemetaan Risiko Tahun 2024](#)
3. [Lampiran 4. Detail Pemetaan Risiko MERS, Difteri, dan Polio Tahun 2024](#)
4. [Lampiran 5. Rekapitulasi Isu Prioritas Utama dan Rekomendasi atas Pemetaan Risiko Penyakit Infeksi Emerging Tahun 2024](#)
5. [Lampiran 6. Daftar Kabupaten/Kota dengan Hasil Pemetaan Risiko Perlu Menjadi Perhatian](#)

Lampiran 2. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dari Hasil Pemetaan Risiko Tahun 2024

A. Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota

1. Kabupaten/Kota melakukan pemetaan risiko penyakit infem secara berkala satu kali setiap tahunnya pada kuartal pertama. Hal ini penting untuk mengetahui potensi terjadinya eskalasi risiko penyakit infem pada suatu wilayah. Mulai tahun 2025, setiap Kabupaten/Kota wajib mengisi empat *tools* pemetaan risiko penyakit infem yang terdiri atas tiga *tools* penyakit infem yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (MERS, Polio, dan COVID-19) serta satu *tools* penyakit infem yang dipilih berdasarkan penilaian Kabupaten/Kota antara Meningitis Meningokokus dan Avian Influenza.
2. Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam melakukan pemetaan risiko penyakit infem dan penyusunan dokumen rekomendasi.
3. Kabupaten/kota yang telah melakukan pemetaan risiko penyakit infem diharapkan membuat rekomendasi atau tindak lanjut dari hasil pemetaan dengan mempertimbangkan parameter yang dinilai untuk masing-masing penyakit. Rekomendasi diharapkan dapat dibuat maksimal 1 bulan setelah pengisian *tools* pemetaan risiko penyakit infem, karena dokumen rekomendasi yang telah disusun dapat digunakan sebagai dasar untuk mengadvokasi pengambil kebijakan di daerah dalam penanggulangan penyakit infem pada tahun berjalan.
4. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan *review* pengisian *tools* pemetaan risiko penyakit infem dan monitoring pelaksanaan pemetaan risiko di wilayahnya melalui website pemetaan risiko. Mulai tahun 2025, pengisian *tools* pemetaan risiko penyakit infem dan pengunggahan dokumen rekomendasi dilakukan melalui website <https://petarisikopie.id/>.
5. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pendampingan teknis kepada Kabupaten/Kota terkait pengisian pemetaan risiko dan penyusunan rekomendasi.
6. Dinas Kesehatan Provinsi diharapkan dapat melakukan analisis terhadap hasil pemetaan risiko penyakit infeksi emerging dan rekomendasi yang telah dilakukan oleh kabupaten/kota. Analisis dilakukan maksimal 1 bulan setelah seluruh Kabupaten/Kota telah mengisi *tools* pemetaan risiko penyakit infeksi emerging dan pengunggahan dokumen rekomendasi untuk sekurangnya empat penyakit.
7. Dinas Kesehatan Provinsi diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi dari Kabupaten/Kota yang ditujukan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk penyakit MERS, Difteri, dan Polio dan melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi yang telah disusun oleh Kabupaten/Kota pada tahun 2023-2025 oleh Kabupaten/Kota.

B. Lintas Program di Kementerian Kesehatan

a. Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Melakukan pelatihan penanggulangan penyakit infeksi emerging bagi tenaga kesehatan di laboratorium dan rumah sakit rujukan, terutama rumah sakit umum daerah atau rumah sakit rujukan tertinggi di Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal tersebut dikarenakan alasan sebagai berikut:

- Terdapat 394 Kabupaten/Kota dari 37 Provinsi yang menyatakan sudah memiliki tim penanggulangan penyakit infeksi emerging, namun ada anggota dalam tim yang belum terlatih, terutama di Jawa Timur (35 Kabupaten/Kota), Sumatera Utara (25 Kabupaten/Kota), dan Jawa Tengah (23 Kabupaten/Kota). Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 54.](#)
 - Terdapat 127 Kabupaten/Kota dari 30 Provinsi yang tidak memiliki tenaga laboratorium bersertifikat dalam pengelolaan spesimen MERS. Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 2.](#)
 - Terdapat 94 Kabupaten/Kota dari 30 Provinsi yang tidak memiliki tenaga laboratorium bersertifikat dalam pengelolaan spesimen Difteri. Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 21.](#)
 - Terdapat 91 Kabupaten/Kota dari 28 Provinsi yang tidak memiliki tenaga laboratorium bersertifikat dalam pengelolaan spesimen Polio. Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 38.](#)
- b. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
- Melakukan pelatihan/*workshop* SKDR bersertifikat (termasuk cara analisis data SKDR dan pembuatan buletin) bagi petugas surveilans di Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, mengingat berdasarkan hasil pemetaan risiko tahun 2024 terdapat temuan:
 - Terdapat 243 Kabupaten/Kota dari 36 Provinsi yang sudah memiliki tim SKDR di Dinas Kesehatan namun baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat, terutama pada Provinsi Jawa Timur (18 Kabupaten/Kota), Provinsi Nusa Tenggara Timur (17 Kabupaten/Kota), dan Provinsi Sumatera Barat (14 Kabupaten/Kota). Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 55.](#)
 - Terdapat 39 Kabupaten/Kota dari 20 Provinsi menyatakan belum pernah melakukan analisis SKDR di tahun 2024, terutama pada Provinsi Aceh (4 Kabupaten/Kota), Bengkulu (4 Kabupaten/Kota), Jawa Tengah (3 Kabupaten/Kota), Maluku (3 Kabupaten/Kota), Papua (3 Kabupaten/Kota), dan Sumatera Barat (3 Kabupaten/Kota). Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 56.](#)
 - Terdapat 143 Kabupaten/Kota dari 34 Provinsi yang fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya tidak memiliki petugas SKDR bersertifikat, terutama pada Provinsi Sumatera Utara (16 Kabupaten/Kota), Jawa Timur (13 Kabupaten/Kota), dan Sumatera Barat (12 Kabupaten/Kota). Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 57.](#)
 - Terdapat 158 Kabupaten/Kota dari 35 Provinsi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya tidak pernah melakukan analisis rutin SKDR, terutama pada Provinsi Sumatera Utara (17 Kabupaten/Kota), Maluku (9 Kabupaten/Kota), dan

Sumatera Barat (9 Kabupaten/Kota). Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 58](#).

- Melakukan bimbingan teknis/pendampingan dan monitoring-evaluasi rutin terkait pelaporan SKDR, mengingat terdapat 118 Kabupaten/Kota dari 30 Provinsi yang menyatakan terdapat fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan/atau rumah sakit) di wilayahnya yang tidak pernah membuat laporan SKDR. Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 59](#).
- Melakukan sosialisasi kembali terkait pentingnya pembentukan Tim Gerak Cepat dengan unsur sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 (tenaga medis, pengelola surveilans/epidemiolog, pengelola vektor/entomolog, sanitarian, dan tenaga laboratorium). Hal itu dikarenakan terdapat 191 Kabupaten/Kota dari 34 Provinsi yang belum memiliki Tim Gerak Cepat atau sudah memiliki Tim Gerak Cepat namun belum memenuhi unsur sesuai ketentuan, terutama pada Provinsi Sumatera Utara (27 Kabupaten/Kota), Jawa Barat (12 Kabupaten/Kota), dan Jawa Timur (12 Kabupaten/Kota). Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 60](#).
- Melakukan pelatihan Tim Gerak Cepat (termasuk di dalamnya terdapat simulasi/*tabletop exercise/role play* penyelidikan epidemiologi), mengingat terdapat 238 Kabupaten/Kota dari 36 Provinsi dengan anggota TGC belum ada yang terlatih dan bersertifikat, terutama pada Provinsi Sumatera Utara (27 Kabupaten/Kota), Jawa Timur (18 Kabupaten/Kota), dan Jawa Barat (16 Kabupaten/Kota). Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 61](#).
- Melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan dokumen rencana kontijensi terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi, mengingat 417 Kabupaten/Kota dari 37 Provinsi tidak memiliki dokumen rencana kontijensi MERS, terutama pada Provinsi Jawa Tengah (33 Kabupaten/Kota), Provinsi Sumatera Utara (32 Kabupaten/Kota), dan Provinsi Jawa Timur (28 Kabupaten/Kota). Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 66](#).
- Merumuskan mekanisme pelaporan *zero reporting* dari pintu masuk atau Balai Besar/Balai Karantina Kesehatan ke wilayah atau Dinas Kesehatan (termasuk format pelaporan, alur koordinasi, dan mekanisme pelaporan). Hal ini dikarenakan terdapat 127 Kabupaten/Kota dari 34 Provinsi yang menyatakan tidak adanya pelaporan *zero reporting* dari Balai Besar/Balai Karantina Kesehatan ke Dinas Kesehatan, terutama pada provinsi Jawa Tengah (8 Kabupaten/Kota), Nusa Tenggara Barat (8 Kabupaten/Kota), dan Sulawesi Utara (8 Kabupaten/Kota). Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 65](#).
- Melakukan pengadaan spesimen *carrier* dan *media transport* untuk penyakit infeksi emerging (baik MERS, Difteri, dan Polio). Hal tersebut dikarenakan terdapat 106 Kabupaten/Kota dari 29 Provinsi yang menyatakan tidak memiliki logistik spesimen *carrier* MERS (daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 4](#)), terdapat 44 Kabupaten/Kota dari 23 Provinsi yang menyatakan tidak memiliki

logistik spesimen carrier Difteri (daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 23](#)), dan terdapat 19 Kabupaten/Kota dari 15 Provinsi yang menyatakan tidak memiliki logistik spesimen carrier Polio (daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 41](#)).

- Melakukan pelatihan pengelolaan spesimen penyakit infeksi emerging (termasuk MERS, Difteri, dan Polio) bagi tenaga laboratorium di seluruh Kabupaten/Kota. Hal tersebut dikarenakan terdapat 127 Kabupaten/Kota dari 30 Provinsi yang tidak memiliki tenaga laboratorium bersertifikat dalam pengelolaan spesimen MERS (daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 56](#)), terdapat 94 Kabupaten/Kota dari 30 Provinsi yang tidak memiliki tenaga laboratorium bersertifikat dalam pengelolaan spesimen Difteri (daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 57](#)), terdapat 91 Kabupaten/Kota dari 28 Provinsi yang tidak memiliki tenaga laboratorium bersertifikat dalam pengelolaan spesimen Polio (daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 58](#)).

c. Direktorat Imunisasi

Berdasarkan hasil pemetaan risiko tahun 2024, terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

- Terdapat 358 Kabupaten/Kota dari 36 provinsi yang belum mencapai target cakupan imunisasi DPT3 (95%), terutama pada Sumatera Utara (31 Kabupaten/Kota), Jawa Timur (27 Kabupaten/Kota), dan Aceh (23 Kabupaten/Kota).
- Terdapat 431 Kabupaten/Kota dari 36 provinsi yang belum mencapai target cakupan imunisasi DPT4 (95%), terutama pada Sumatera Utara (32 Kabupaten/Kota), Jawa Timur (30 Kabupaten/Kota), dan Jawa Barat (24 Kabupaten/Kota).
- Terdapat 329 Kabupaten/Kota dari 35 provinsi yang belum mencapai target cakupan imunisasi DT (95%), terutama pada Aceh (23 Kabupaten/Kota), Sumatera Barat (19 Kabupaten/Kota), dan Sumatera Utara (19 Kabupaten/Kota).
- Terdapat 325 Kabupaten/Kota dari 35 provinsi yang belum mencapai target cakupan imunisasi Td (95%), terutama pada Sumatera Utara (31 Kabupaten/Kota), Jawa Timur (27 Kabupaten/Kota), dan Aceh (23 Kabupaten/Kota).
- Terdapat 477 Kabupaten/Kota dari 37 provinsi yang belum mencapai target cakupan imunisasi Polio 4 (100%), terutama pada Jawa Timur (35 Kabupaten/Kota), Jawa Tengah (34 Kabupaten/Kota), dan Sumatera Utara (33 Kabupaten/Kota).

Atas dasar temuan tersebut, direkomendasikan:

- Pelatihan *on the job training micro planning* program imunisasi kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- Melakukan *refreshing* pencatatan dan pelaporan surveilans PD3I, termasuk mendistribusikan kembali link *Google Drive* pedoman dan format pelaporan surveilans PD3I.
- *Workshop* penginputan data pada aplikasi ASIK dan monitoring-evaluasi penginputan data ASIK (termasuk mekanisme *reward-punishment*).

- Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk melakukan validasi data sasaran imunisasi di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia
 - Berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait strategi untuk mengatasi isu penolakan vaksin, salah satunya terkait penyusunan fatwa halal-haram untuk imunisasi wajib termasuk difteri serta sosialisasi kembali Fatwa MUI No. 16 Tahun 2005 tentang Penggunaan Vaksin Polio Oral dan Fatwa MUI tahun 2002 tentang Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV).
 - Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mempertimbangkan materi imunisasi untuk masuk ke dalam kurikulum serta menjadikan imunisasi lengkap sebagai syarat masuk PAUD/sekolah (salah satunya dapat mengakses bahan ajar kesehatan di Merdeka Mengajar).
 - Berkoordinasi dengan Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mempertimbangkan materi imunisasi untuk masuk ke dalam pendidikan calon pengantin (catin).
 - Melakukan pengadaan spesimen *carrier* dan *media transport* untuk penyakit infeksi emerging (baik Difteri, dan Polio). Hal tersebut dikarenakan terdapat 44 Kabupaten/Kota dari 23 Provinsi yang menyatakan tidak memiliki logistik spesimen *carrier* Difteri (daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 23](#)) dan terdapat 19 Kabupaten/Kota dari 15 Provinsi yang menyatakan tidak memiliki logistik spesimen *carrier* Polio (daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 41](#)).
- d. Direktorat Kesehatan Lingkungan
- Menyusun surat edaran pelibatan lintas program dan lintas sektor (tokoh agama, tokoh masyarakat, kader, gerakan pemuda, Kementerian PU, *Corporate Social Responsibility [CSR]* Perusahaan) di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat dalam mendukung capaian STBM (terutama termasuk cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makan keluarga, serta stop buang air besar sembarangan) termasuk melakukan pemecuan STBM di masyarakat, mendukung pembangunan jamban sehat ber-*septic tank*, fasilitas cuci tangan, serta penyediaan air bersih.
 - Pelatihan petugas sanitarian serta monitoring dan evaluasi terkait pelaporan sistem informasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM (SiSTBM).
 - Mendorong penerapan pilar 2 (cuci tangan pakai sabun) dan 3 (pengelolaan air minum dan makan rumah tangga) STBM di Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil pemetaan risiko tahun 2024 terdapat temuan:
 - Terdapat 54 Kabupaten/Kota dari 22 provinsi yang belum menerapkan pilar 2 (cuci tangan pakai sabun), terutama Aceh (5 Kabupaten/Kota), Sulawesi Barat (5 Kabupaten/Kota), Lampung (4 Kabupaten/Kota), Maluku Utara (4 Kabupaten/Kota), Papua Barat (4 Kabupaten/Kota), Sumatera Barat (4 Kabupaten/Kota). Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 63](#).

- Terdapat 44 Kabupaten/Kota dari 23 provinsi yang belum menerapkan pilar 3 (pengelolaan air minum dan makan keluarga), terutama Aceh (4 Kabupaten/Kota), Papua (4 Kabupaten/Kota), dan Papua Barat (4 Kabupaten/Kota). Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 64](#).
 - Pengadaan sanitarian kit dan reagen untuk pemeriksaan sarana air minum (SAM) di Puskesmas. Hal tersebut dikarenakan terdapat 368 Kabupaten/Kota dari 37 provinsi dengan cakupan SAM diperiksa di wilayahnya belum tercapai, terutama Jawa Tengah (25 Kabupaten/Kota), Sulawesi Selatan (23 Kabupaten/Kota), dan Jawa Timur (22 Kabupaten/Kota). Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 33](#).
 - *On the job training* petugas sanitarian di Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Laboratorium Kesehatan Daerah terkait cara pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum.
- e. Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas
- Sosialisasi ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendistribusikan media KIE termasuk iklan layanan masyarakat terkait perilaku sehat dan kewaspadaan penyakit infeksi emerging termasuk MERS yang dapat diakses di Ayo Sehat Kemkes. Hal tersebut dikarenakan 21 Kabupaten/Kota dari 16 Provinsi menyatakan tidak memiliki media promosi terkait Polio (daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 67](#)) dan terdapat 145 Kabupaten/Kota dari 34 Provinsi menyatakan tidak memiliki media promosi terkait MERS (daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 68](#)).
- f. Direktorat Pelayanan Klinis
- Membuat regulasi pembentukan tim penanggulangan kasus penyakit infeksi emerging (termasuk Surat Keputusan Tim) di setiap rumah sakit rujukan, terutama rumah sakit umum daerah atau rumah sakit rujukan tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal itu dikarenakan terdapat 120 Kabupaten/Kota dari 32 Provinsi yang belum memiliki tim penanggulangan kasus PIE (termasuk MERS, Polio, dan Difteri) di rumah sakit rujukan terutama pada Provinsi Aceh (11 Kabupaten/Kota), Provinsi Sumatera Utara (11 Kabupaten/Kota), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (8 Kabupaten/Kota). Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 62](#).
 - Melakukan pelatihan penanggulangan penyakit infeksi emerging bagi tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan, terutama rumah sakit umum daerah atau rumah sakit rujukan tertinggi di Kabupaten/Kota. Hal tersebut dikarenakan terdapat 394 Kabupaten/Kota dari 37 Provinsi yang menyatakan sudah memiliki tim penanggulangan penyakit infeksi emerging, namun ada anggota dalam tim yang belum terlatih, terutama di Jawa Timur (35 Kabupaten/Kota), Sumatera Utara (25 Kabupaten/Kota), dan Jawa Tengah (23 Kabupaten/Kota). Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 54](#).
- g. Pusat Kesehatan Haji

- Perumusan sistem pemantauan dan pelaporan kondisi kesehatan bagi jamaah haji dan umrah saat keberangkatan dan kepulangan sebagai kewaspadaan terhadap penyakit potensial KLB termasuk MERS salah satunya melalui K3JH dan berkolaborasi dengan *travel agent umrah*. Hal ini dikarenakan terdapat 50 Kabupaten/Kota dari 18 Provinsi yang tidak pernah membuat laporan pemantauan haji setelah kepulangan. Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 69](#).
 - Sosialisasi terkait MERS kepada *travel agent* umrah terkait kewaspadaan penyakit MERS.
- h. Balai Besar/Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat
- Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait pemetaan dan penetapan lokus pemeriksaan virus polio di lingkungan. Hal itu dikarenakan berdasarkan hasil pemetaan risiko, terdapat 307 Kabupaten/Kota dari 36 Provinsi yang tidak ada pemantauan virus Polio di lingkungan. Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 37](#).
 - Merumuskan mekanisme pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium secara *real-time*, mengingat terdapat 220 Kabupaten/Kota dari 35 Provinsi yang menyatakan rata-rata waktu terima hasil lebih dari 14 hari untuk Polio (daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 39](#)). Selain itu, terdapat 166 Kabupaten/Kota dari 33 Provinsi yang menyatakan rata-rata waktu terima hasil lebih dari 14 hari untuk Difteri (daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 22](#)) dan terdapat 66 Kabupaten/Kota dari 24 Provinsi yang menyatakan rata-rata waktu terima hasil lebih dari 14 hari untuk MERS (daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 3](#)).
- i. Rumah Sakit Pusat Infeksi Prof. dr. Sulianti Saroso
- Membuat regulasi pembentukan tim penanggulangan kasus penyakit infeksi emerging (termasuk Surat Keputusan Tim) di setiap rumah sakit rujukan, terutama rumah sakit pengampuan penyakit infeksi emerging. Hal itu dikarenakan terdapat 120 Kabupaten/Kota dari 32 Provinsi yang belum memiliki tim penanggulangan kasus PIE (termasuk MERS, Polio, dan Difteri) di rumah sakit rujukan terutama pada Provinsi Aceh (11 Kabupaten/Kota), Provinsi Sumatera Utara (11 Kabupaten/Kota), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (8 Kabupaten/Kota). Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 62](#).
 - Melakukan pelatihan penanggulangan penyakit infeksi emerging bagi tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan, terutama rumah sakit pengampuan penyakit infeksi emerging. Hal tersebut dikarenakan terdapat 394 Kabupaten/Kota dari 37 Provinsi yang menyatakan sudah memiliki tim penanggulangan penyakit infeksi emerging, namun ada anggota dalam tim yang belum terlatih, terutama di Jawa Timur (35 Kabupaten/Kota), Sumatera Utara (25 Kabupaten/Kota), dan Jawa Tengah (23 Kabupaten/Kota). Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 54](#).

C. Lintas Sektor

a. Kementerian Pekerjaan Umum

- Memfasilitasi pembangunan jamban sehat ber-*septic tank*, fasilitas cuci tangan, serta penyediaan air bersih. Hal ini dikarenakan terdapat 44 Kabupaten/Kota dari 23 provinsi yang belum menerapkan pilar 3 yaitu PAMM-RT (daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 64](#)) dan terdapat 337 Kabupaten/Kota dari 37 Provinsi memiliki cakupan stop BABS <100% atau belum mencapai status ODF (daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 32](#)).
- Menghimbau pengelola sarana air minum untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan rutin serta mempertimbangkan pencabutan izin bagi penyedia air minum apabila tidak memenuhi syarat uji kualitas air minum. Hal tersebut dikarenakan terdapat 379 Kabupaten/Kota dari 37 provinsi dengan SAM di wilayahnya ada yang tidak memenuhi syarat. Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 34](#).

b. Kementerian Komunikasi dan Digital

- Memfasilitasi penyediaan akses internet (WIFI) bagi seluruh Puskesmas di Indonesia dalam rangka untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan data-data imunisasi dan surveilans yang berbasis aplikasi.

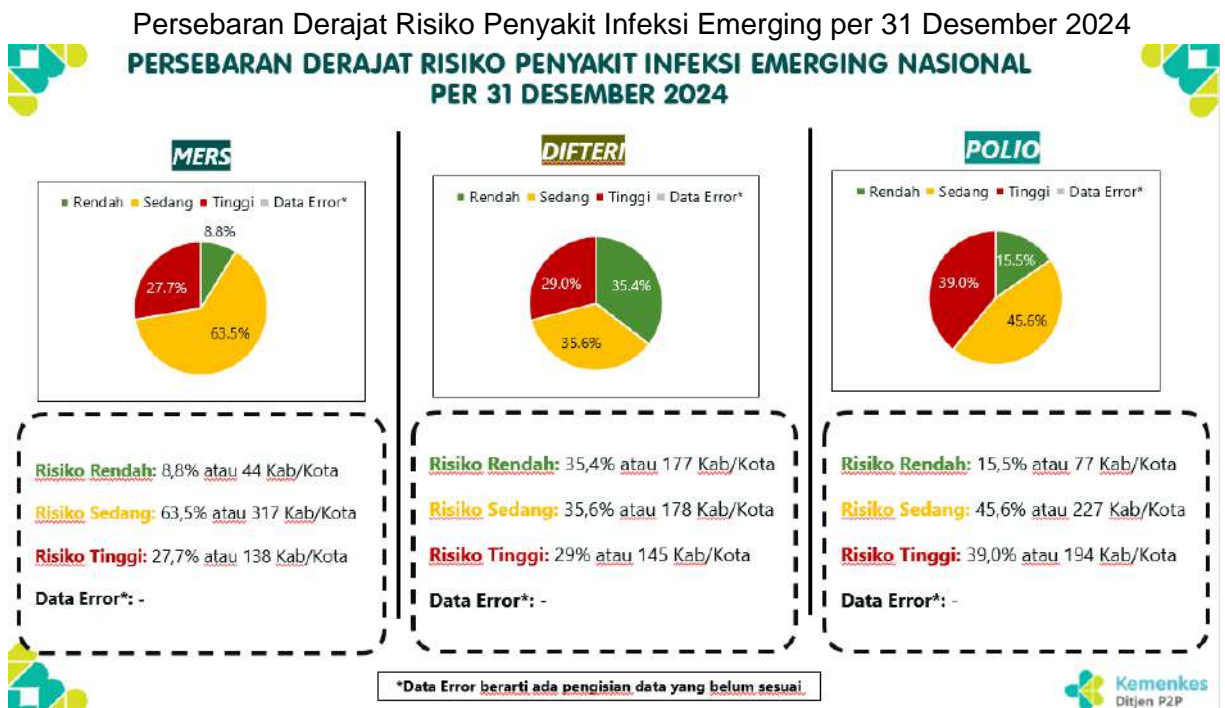
c. Kementerian Dalam Negeri

- Menetapkan regulasi dan mekanisme pembuatan NIK untuk bayi baru lahir agar dapat diinputkan ke dalam aplikasi ASIK.

d. Kementerian Perindustrian

- Mempertimbangkan pencabutan izin bagi penyedia air minum apabila tidak memenuhi syarat uji kualitas air minum. Hal ini dikarenakan terdapat 379 Kabupaten/Kota dari 37 provinsi dengan SAM di wilayahnya ada yang tidak memenuhi syarat. Daftar Kabupaten/Kota dapat diakses pada [Tabel 34](#).

Lampiran 3. Resume Hasil Pemetaan Risiko Tahun 2024



Tabel 1 Persebaran Perubahan Derajat Risiko Penyakit Infeksi Emerging per 31 Desember 2024

Penyakit	Perubahan Derajat Risiko		Jumlah Kabupaten/Kota
	Tahun 2023	Tahun 2024	
MERS	Rendah	Tinggi	119
	Rendah	Sedang	296
	Sedang	Tinggi	14
	Sedang	Rendah	1
	Tinggi	Sedang	4
	Tinggi	Rendah	0
	Data Error	Rendah/Sedang/Tinggi	8
	Belum Lapor	Rendah/Sedang/Tinggi	8
	Rendah/Sedang/Tinggi	Belum Lapor	2
	Tetap		49
	Belum Lapor		13
Difteri	Rendah	Tinggi	60
	Rendah	Sedang	119
	Sedang	Tinggi	30
	Sedang	Rendah	13
	Tinggi	Sedang	24
	Tinggi	Rendah	17
	Data Error	Rendah/Sedang/Tinggi	0
	Belum Lapor	Rendah/Sedang/Tinggi	9
	Rendah/Sedang/Tinggi	Belum Lapor	1
	Tetap		228
	Belum Lapor		13
Polio	Rendah	Tinggi	58
	Rendah	Sedang	115

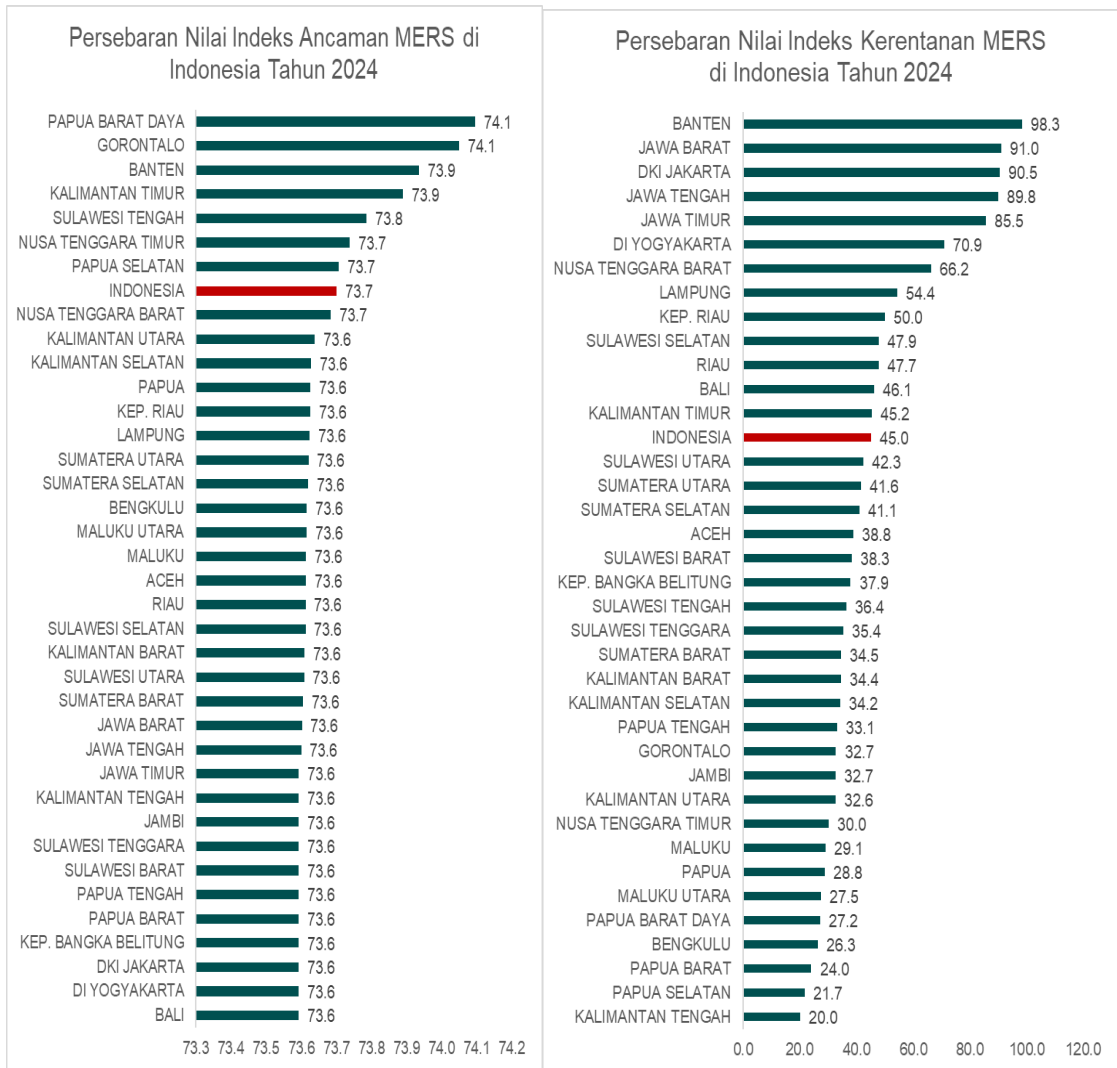
	Sedang	Tinggi	36
	Sedang	Rendah	11
	Tinggi	Sedang	54
	Tinggi	Rendah	13
	Data Error	Rendah/Sedang/Tinggi	1
	Belum Lapor	Rendah/Sedang/Tinggi	8
	Rendah/Sedang/Tinggi	Belum Lapor	3
	Tetap		202
	Belum Lapor		13

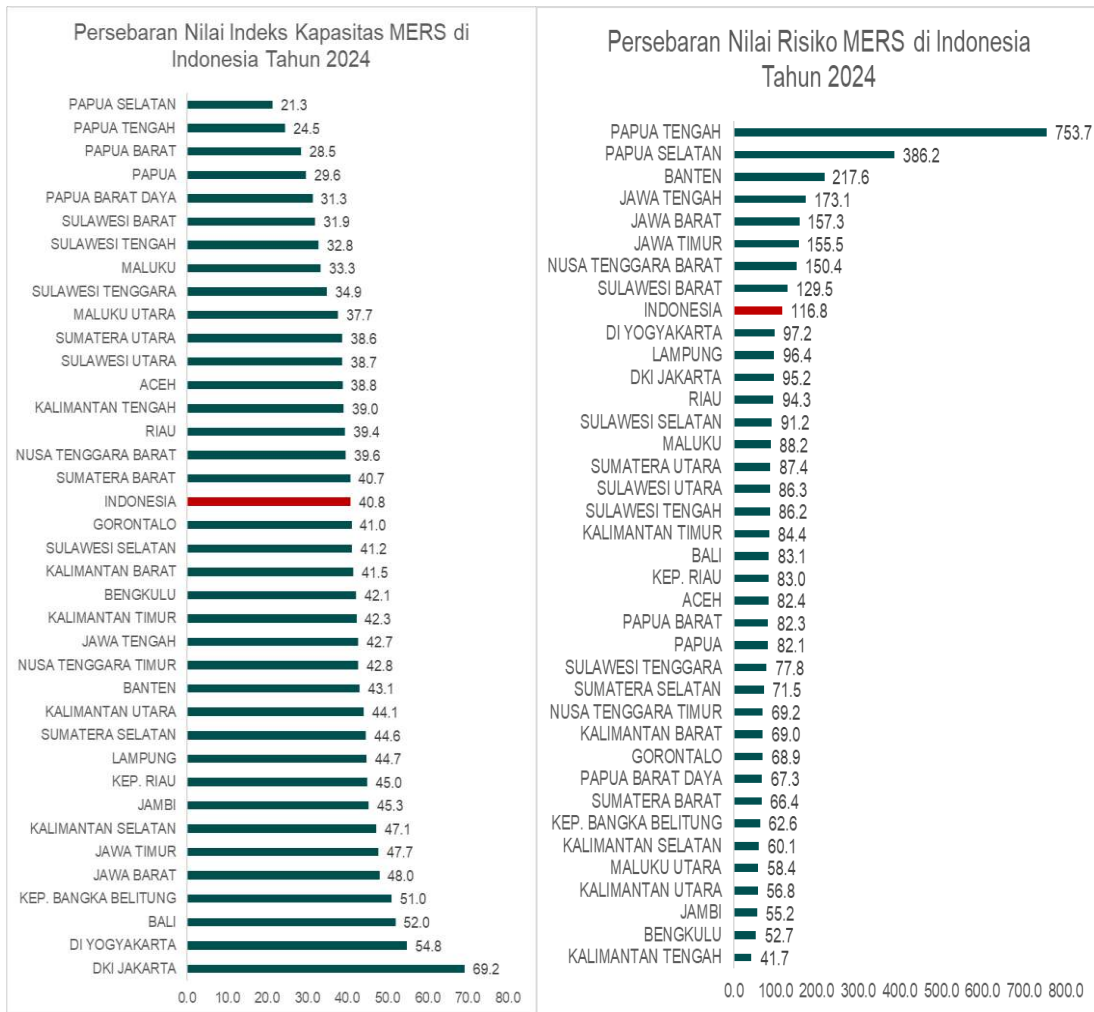
Lampiran 4. Detail Pemetaan Risiko MERS, Difteri, dan Polio Tahun 2024

1. Gambaran Pemetaan Risiko MERS

a. Nilai Hasil Ancaman, Kerentanan, dan Kapasitas Pemetaan Penyakit MERS di Indonesia Tahun 2024

Pada tahun 2024 terdapat 499 kabupaten/kota yang telah melakukan pemetaan risiko untuk MERS. Berdasarkan penghitungan indeks pada setiap pertanyaan di subkategori, persebaran indeks ancaman, kerentanan, dan kapasitas pemetaan penyakit MERS pada tahun 2024 ialah sebagai berikut:





Berdasarkan ilustrasi di atas, rerata nilai **indeks ancaman di Indonesia adalah 73.7** serta Provinsi dengan nilai indeks ancaman MERS tertinggi adalah Provinsi Papua Barat Daya dan Gorontalo. Terdapat 7 (tujuh) Provinsi dengan nilai indeks ancaman lebih tinggi daripada rerata indeks ancaman di Indonesia, yakni Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Banten, Gorontalo, dan Papua Barat Daya.

Untuk kategori kerentanan, rerata nilai **indeks kerentanan di Indonesia ialah sebesar 45.0** dan Provinsi dengan nilai indeks kerentanan MERS tertinggi adalah Banten. Kalimantan Timur, Bali, Riau, Sulawesi Selatan, Kep. Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Di Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, DK Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menjadi 13 (tiga belas) provinsi dengan nilai indeks kerentanan lebih tinggi dibandingkan rerata indeks kerentanan di Indonesia.

Untuk kategori kapasitas, rerata nilai **indeks kapasitas di Indonesia sebesar 40.8** serta Provinsi dengan nilai indeks kapasitas MERS terendah adalah Papua Selatan. Tujuh belas (17) Provinsi memiliki nilai indeks kapasitas lebih rendah ketika dibandingkan dengan rerata indeks kapasitas di Indonesia, yakni Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Aceh, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Terakhir, rerata **nilai risiko di Indonesia sebesar 116.8** serta Provinsi dengan nilai risiko MERS tertinggi adalah Papua Tengah. Daripada nilai risiko di Indonesia, terdapat 8 (delapan) Provinsi dengan nilai risiko lebih tinggi yakni Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

b. Analisis Kategori Dominan pada Kategori Ancaman

No	SUBKATEGORI	BOBOT	ACEH	BALI	BANTEN	BENGKULU	DIY	JABAR	JAK	JAWA BARAT	JAWA TIMUR	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	KES	KOR	LAMPUNG	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT	PAPUA BARAT DAYA	PAPUA PEGUNGAN	PAPUA SELATAN	PAPUA TENGAH	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SUMATERA BARAT	SUMATERA SELATAN	SUMATERA UTARA	DOMINANSI	%						
1	Karakteristik penyakit (literatur/ahli)	30.25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	TINGGI	97.4			
2	Pengobatan (literatur/ahli)	6.90	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	TINGGI	97.4		
3	Pencegahan (literatur/ahli)	23.56	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	TINGGI	97.4	
4	Risiko importasi (literatur/ahli)	11.25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	TINGGI	97.4	
5	Attack Rate (literatur/ahli)	10.47	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	SEDANG	97.4	
6	Risiko penularan setempat	15.03	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SEDANG	97.4
7	Dampak ekonomi (penanggulangan)	2.54	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	SEDANG	97.4

Dari 7 (tujuh) subkategori Ancaman, terdapat 4 subkategori dengan dominasi **TINGGI** yaitu karakteristik penyakit, pengobatan, pencegahan, risiko importasi. Selain itu, terdapat 1 subkategori dengan dominasi **SEDANG** yaitu risiko penularan setempat.

c. Analisis Kategori Dominan pada Kategori Kerentanan

No	SUBKATEGORI	BOBOT	ACEH	BALI	BANTEN	BENGKULU	DIY	JABAR	JAK	JAWA BARAT	JAWA TIMUR	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	KES	KOR	LAMPUNG	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT	PAPUA BARAT DAYA	PAPUA PEGUNGAN	PAPUA SELATAN	PAPUA TENGAH	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SUMATERA BARAT	SUMATERA SELATAN	SUMATERA UTARA	DOMINANSI	%							
1	Perjalanan penduduk ke wilayah terjangkit	50.48	A	A	T	T	T	A	R	T	T	A	R	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	TINGGI	57.9		
2	Transportasi antar provinsi dan antar kab/kota	25.96	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	TINGGI	97.4	
3	Kepadatan penduduk	16.35	R	T	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	TINGGI	57.9
4	Proporsi penduduk usia >60 tahun	7.21	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	TINGGI	81.6

Dari 4 (empat) subkategori Kerentanan, terdapat 2 subkategori dengan dominasi **TINGGI** yaitu transportasi antar provinsi dan antar kab/kota dan proporsi penduduk usia >60 tahun.

d. Analisis Kategori Dominan dan Analisis per Subkategori dengan Dominasi Abai pada Kategori Kapasitas

No	SUBKATEGORI	Bebot	ACEH	BALI	BANTEN	BENGKULU	DIY	JABAR	JAK	JAWA BARAT	JAWA TIMUR	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	KES	KOR	LAMPUNG	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT	PAPUA BARAT DAYA	PAPUA PEGUNGAN	PAPUA SELATAN	PAPUA TENGAH	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SUMATERA BARAT	SUMATERA SELATAN	SUMATERA UTARA	DOMINANSI	%							
1	Kebijakan publik	5.11	R	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	ABAI	76.3	
2	Kelengkapan	8.19	T	T	S	R	S	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	ABAI	81.6
3	Kapasitas Laboratorium	1.70	A	R	A	A	R	A	R	R	A	A	R	R	A	A	S	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	ABAI	97.9
4	Rumah Sakit Rujukan	0.98	A	R	A	A	S	S	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	ABAI	71.1
5	Surveilans wilayah oleh Puskesmas	10.99	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	ABAI	81.6
6	Surveilans Rumah Sakit	12.09	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	ABAI	89.5
7	Surveilans pintu masuk oleh KKP	9.89	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	ABAI	81.6
8	Promosi peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan	8.79	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	ABAI	81.6
9	Tim Gerak Cepat	9.34	R	T	A	A	T	T	T	T	S	T	T	T	S	T	S	T	S	A	A	T	S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	ABAI	36.8
10	Kompetensi penyelidikan epidemiologi MERS-CoV	10.44	A	A	A	R	T	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	ABAI	63.2
11	Rencana Kontijensi	3.85	A	A	A	A	T	T	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	ABAI	89.5
12	Anggaran penanggulangan	12.64	A	A	A	A	T	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	ABAI	94.7

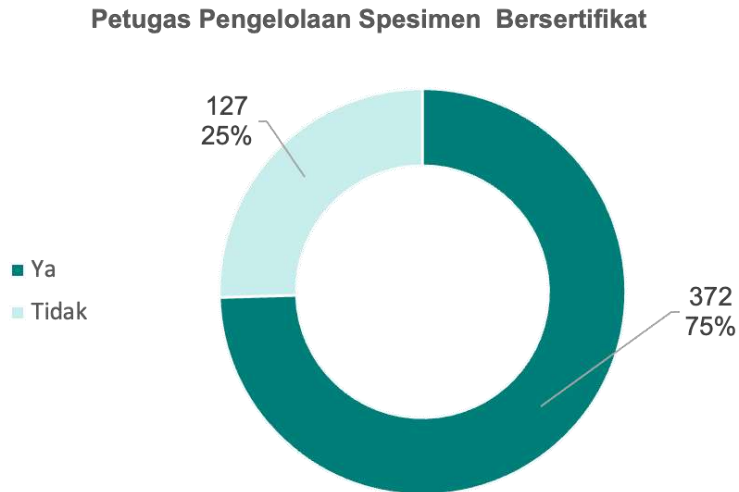
Dari 12 (dua belas) subkategori Kapasitas, terdapat 4 subkategori dengan dominasi **ABAI** yaitu kapasitas laboratorium, rumah sakit rujukan, rencana kontijensi, dan anggaran penanggulangan. Selain itu, terdapat 2 subkategori dengan dominasi

RENDAH yaitu kebijakan publik dan kompetensi penyelidikan epidemiologi MERS CoV.

ANALISIS PER SUBKATEGORI DENGAN DOMINASI ABAI

1. Kapasitas Laboratorium

Dari 499 Kabupaten/Kota yang telah mengisi tools pemetaan risiko penyakit MERS, terhadap subkategori **Kapasitas Laboratorium** diperoleh temuan sebagai berikut:



- a. Terdapat 127 Kabupaten/Kota (25%) yang tidak memiliki tenaga laboratorium bersertifikat dalam pengelolaan spesimen (pengambilan, pengepakan, dan pengiriman spesimen). Selain itu 372 Kabupaten/Kota (75%) telah memiliki tenaga laboratorium bersertifikat dalam pengelolaan spesimen (pengambilan, pengepakan, dan pengiriman spesimen). Rincian 127 Kabupaten/Kota yang tidak memiliki tenaga laboratorium bersertifikat dalam pengelolaan spesimen adalah sebagai berikut:

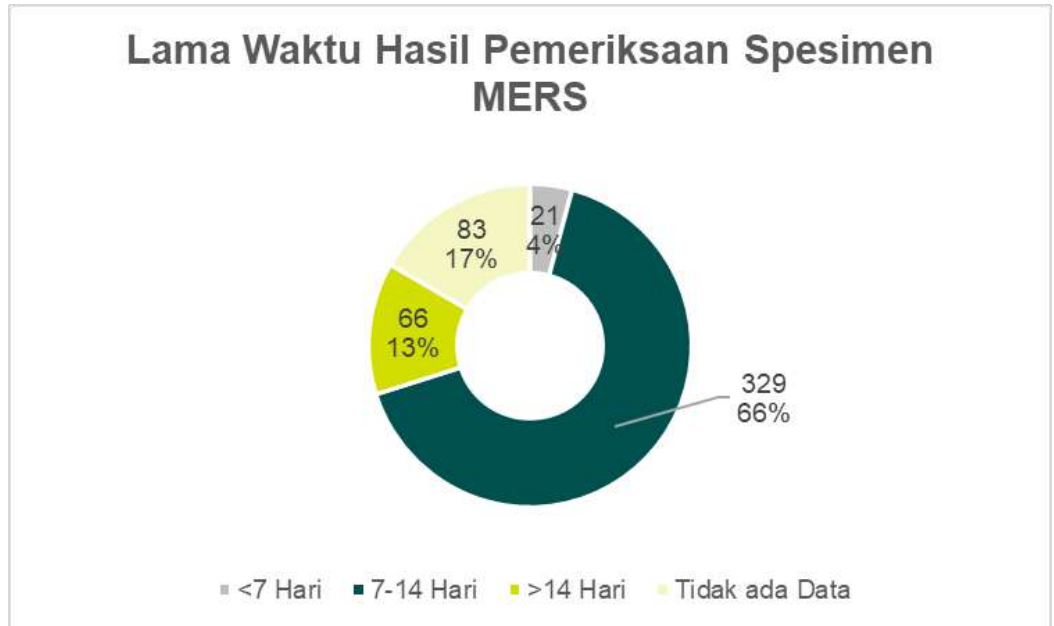
Tabel 2 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak memiliki tenaga laboratorium bersertifikat dalam pengelolaan spesimen

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Sumatera Utara	14	Batu Bara, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Kota Binjai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Nias Barat, Nias Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Tapanuli Utara, dan Toba

2	Aceh	13	Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Bireuen, Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Subulussalam, dan Simeulue
3	Jawa Timur	10	Kediri, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Sampang, dan Trenggalek
4	Jawa Barat	8	Bandung Barat, Ciamis, Cirebon, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Pangandaran, Subang, dan Tasikmalaya
5	Sumatera Barat	8	Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Sawahlunto, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Solok
6	Sulawesi Selatan	7	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Kota Parepare, Tana Toraja, dan Toraja Utara
7	Bengkulu	6	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Kaur, Kota Bengkulu, Mukomuko, dan Rejang Lebong
8	Nusa Tenggara Timur	6	Alor, Malaka, Manggarai Timur, Sikka, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya
9	Kalimantan Barat	5	Kapuas Hulu, Landak, Melawi, Sekadau, dan Sintang
10	Sulawesi Tenggara	5	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Utara, dan Konawe Utara

11	Lampung	4	Lampung Selatan, Pesisir Barat, Tulang Bawang, dan Way Kanan
12	Papua Tengah	4	Deiyai, Dogiyai, Nabire, dan Paniai
13	DI Yogyakarta	3	Kota Yogyakarta, Kulon Progo, dan Sleman
14	Jambi	3	Bungo, Merangin, dan Tebo
15	Kalimantan Timur	3	Kota Samarinda, Kutai Barat, dan Penajam Paser Utara
16	Maluku Utara	3	Halmahera Selatan, Kep. Sula, dan Pulau Taliabu
17	Papua Barat	3	Fakfak, Pegunungan Arfak, dan Teluk Bintuni
18	Papua Barat Daya	3	Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Tambrau
19	Gorontalo	2	Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo
20	Kalimantan Tengah	2	Kotawaringin Timur dan Sukamara
21	Kep. Bangka Belitung	2	Bangka Selatan dan Belitung Timur
22	Papua	2	Sarmi dan Supiori
23	Papua Selatan	2	Boven Digoel dan Merauke
24	Riau	2	Kep. Meranti dan Kuantan Singingi
25	Sulawesi Utara	2	Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur
26	Bali	1	Karangasem
27	Kalimantan Selatan	1	Kotabaru
28	Nusa	1	Lombok Barat

	Tenggara Barat		
29	Sulawesi Tengah	1	Morowali
30	Sumatera Selatan	1	Musi Rawas Utara



- b. Terdapat 66 Kabupaten/Kota (13%) dari 24 Provinsi yang rata-rata waktu terima hasil konfirmasi pemeriksaan spesimen MERS lebih dari 14 hari. Rata-rata terbesar untuk terima hasil konfirmasi pemeriksaan spesimen MERS selama 7-14 Hari pada 329 Kabupaten/Kota (66%). Rincian 149 Kabupaten/Kota dengan rata-rata waktu terima hasil konfirmasi pemeriksaan spesimen MERS lebih dari 14 hari adalah sebagai berikut:

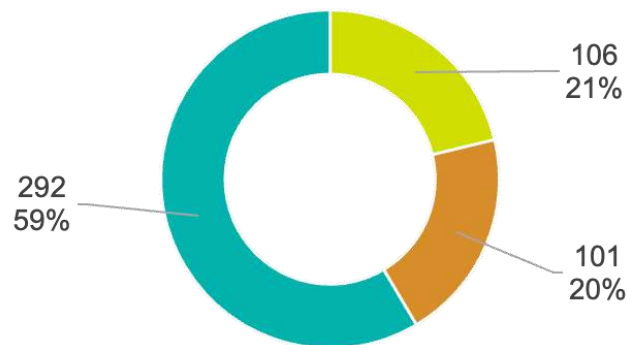
Tabel 3 Persebaran Kabupaten/Kota dengan rata-rata waktu terima hasil konfirmasi pemeriksaan spesimen MERS lebih dari 14 hari

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Sulawesi Tenggara	7	Buton, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna Barat, dan Wakatobi
2	Kalimantan Tengah	6	Barito Selatan, Barito Utara, Kota Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Seruyan

3	Nusa Tenggara Timur	6	Malaka, Manggarai Barat, Nagekeo, Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Sumba Barat Daya
4	Sumatera Utara	6	Dairi, Humbang Hasundutan, Kota Gunungsitoli, Kota Tebing Tinggi, Labuhan Batu Utara, dan Nias Barat
5	Sulawesi Selatan	5	Barru, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Kota Parepare, dan Luwu
6	Sulawesi Tengah	5	Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Parigi Moutong, Poso, dan Tojo Una-Una
7	Kalimantan Selatan	4	Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu
8	Sumatera Selatan	4	Banyu Asin, Empat Lawang, Kota Lubuklinggau, dan Ogan Komering Ulu Selatan
9	Papua Selatan	3	Asmat, Mappi, dan Merauke
10	Aceh	2	Aceh Selatan dan Aceh Singkil
11	Jawa Timur	2	Kota Pasuruan dan Sidoarjo
12	Kalimantan Barat	2	Kota Singkawang dan Mempawah
13	Kalimantan Timur	2	Kota Bontang dan Kota Samarinda
14	Lampung	2	Mesuji dan Pesisir Barat
15	Bengkulu	1	Lebong
16	Jambi	1	Sarolangun
17	Jawa Barat	1	Kota Tasikmalaya
18	Kalimantan	1	Tana Tidung

	Utara		
19	Kep. Riau	1	Kep. Anambas
20	Maluku	1	Kota Tual
21	Papua	1	Supiori
22	Papua Barat	1	Teluk Bintuni
23	Papua Barat Daya	1	Raja Ampat
24	Papua Tengah	1	Paniai

Kesediaan Logistik Specimen Carrier MERS



- Tidak Ada
- Ada, tidak sesuai standar, tidak tahu kesesuaiannya dengan standar, tidak ada standarnya
- Ada, sesuai standar

c. Terdapat 106 Kabupaten/Kota (21%) dari 29 Provinsi yang tidak memiliki logistik spesimen carrier MERS. Selain itu terdapat 101 Kabupaten/Kota (20%) yang telah memiliki logistik spesimen carrier MERS namun tidak sesuai standar, tidak tahu kesesuaiannya dengan standar, dan tidak ada standarnya. Rincian 106 Kabupaten/Kota yang tidak memiliki logistik spesimen carrier MERS adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak memiliki logistik spesimen carrier MERS

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Aceh	10	Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Bireuen, Gayo Lues, Kota Subulussalam, dan Simeulue
2	Sumatera Utara	9	Batu Bara, Humbang Hasundutan, Kota Gunungsitoli, Kota Tebing Tinggi, Labuhan Batu Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Padang Lawas, dan Toba
3	Sumatera Barat	8	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Sijunjung, dan Solok Selatan
4	Sulawesi Tengah	7	Banggai, Banggai Laut, Buol, Donggala, Parigi Moutong, Poso, dan Tojo Una-Una
5	Nusa Tenggara Timur	6	Ende, Kupang, Lembata, Malaka, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara
6	Bengkulu	5	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Kaur, Lebong, dan Seluma
7	Kalimantan Barat	5	Kapuas Hulu, Kayong Utara, Landak, Melawi, dan Sekadau
8	Sulawesi Tenggara	5	Buton, Buton Utara, Kolaka Utara, Konawe

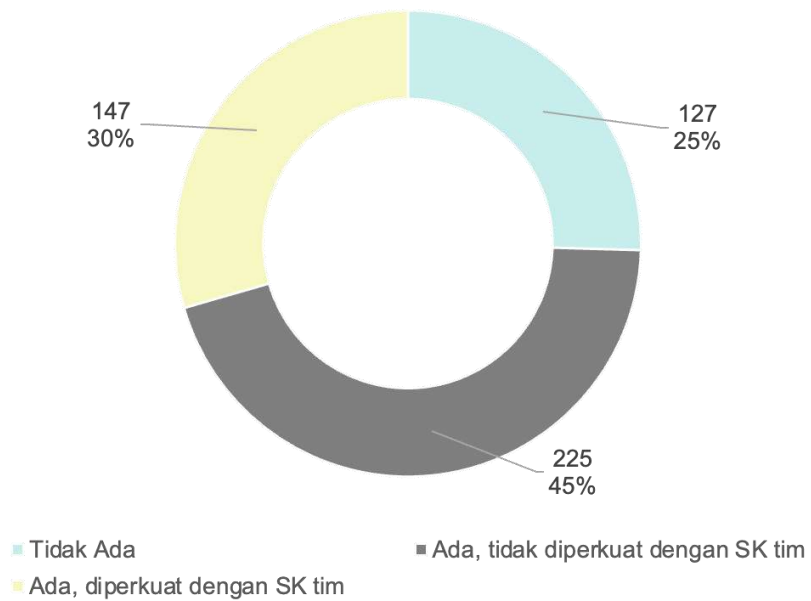
			Kepulauan, dan Konawe Selatan
9	Jawa Barat	4	Ciamis, Kota Cirebon, Pangandaran, dan Tasikmalaya
10	Jawa Timur	4	Kediri, Mojokerto, Ponorogo, dan Sampang
11	Kalimantan Tengah	4	Barito Selatan, Gunung Mas, Murung Raya, dan Pulang Pisau
12	Maluku Utara	4	Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Utara, dan Kota Ternate
13	Papua	4	Biak Numfor, Keerom, Sarmi, dan Supiori
14	Papua Barat	4	Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak
15	Lampung	3	Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Way Kanan
16	Maluku	3	Buru, Kota Ambon, dan Maluku Barat Daya
17	Papua Tengah	3	Deiyai, Dogiyai, dan Paniai
18	Gorontalo	2	Bone Bolango dan Kota Gorontalo
19	Kalimantan Selatan	2	Balangan dan Kotabaru
20	Kep. Riau	2	Kep. Anambas dan Lingga
21	Papua Selatan	2	Asmat dan Boven Digoel
22	Riau	2	Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi
23	Sulawesi Selatan	2	Barru dan Bone

24	Jambi	1	Tebo
25	Kalimantan Timur	1	Kutai Barat
26	Kep. Bangka Belitung	1	Bangka
27	Papua Barat Daya	1	Sorong Selatan
28	Sulawesi Utara	1	Kep. Talaud
29	Sumatera Selatan	1	Lahat

2. Rumah Sakit Rujukan

Dari 499 Kabupaten/Kota yang telah mengisi tools pemetaan risiko penyakit MERS, terhadap subkategori **Rumah Sakit Rujukan** diperoleh temuan sebagai berikut:

Tim Pengendalian Kasus MERS di Rumah Sakit Rujukan



- a. Terdapat 127 Kabupaten/Kota (25%) dari 32 Provinsi yang tidak ada tim pengendalian kasus MERS di RS Rujukan dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 5 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak ada tim pengendalian kasus MERS di RS Rujukan

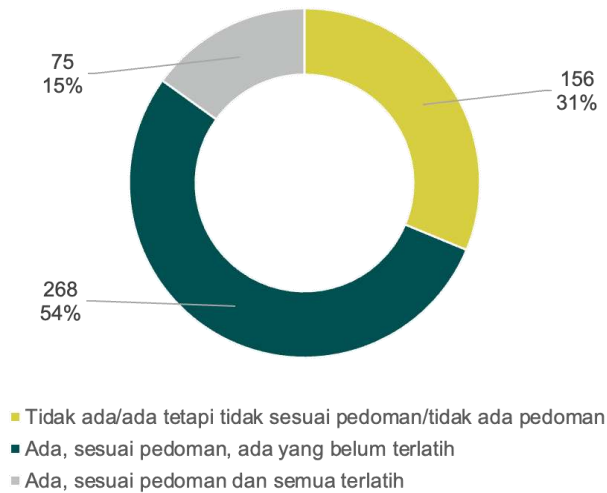
No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Aceh	14
2	Sumatera Utara	12
3	Sulawesi Tenggara	8
4	Sumatera Barat	8
5	Maluku Utara	7
6	Maluku	6
7	Bengkulu	5
8	Kalimantan Tengah	5
9	Lampung	5
10	Papua Barat	5
11	Sulawesi Selatan	5
12	Jawa Barat	4
13	Nusa Tenggara Timur	4
14	Papua Tengah	4
15	Sulawesi Tengah	4
16	Jawa Timur	3
17	Riau	3
18	Sumatera Selatan	3
19	Jawa Tengah	2
20	Kalimantan Barat	2
21	Kalimantan Selatan	2
22	Kalimantan Utara	2
23	Kep. Bangka Belitung	2
24	Papua	2
25	Papua Selatan	2
26	Sulawesi Utara	2
27	Bali	1
28	Gorontalo	1
29	Jambi	1
30	Kalimantan Timur	1
31	Kep. Riau	1
32	Papua Barat Daya	1

- b. Selain itu terdapat 225 Kabupaten/Kota (45%) dari 34 Provinsi yang ada tim pengendalian kasus MERS di RS Rujukan namun tidak memiliki SK tim dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 6 Persebaran Kabupaten/Kota yang ada tim pengendalian kasus MERS di RS Rujukan namun tidak memiliki SK tim

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Jawa Timur	23
2	Jawa Tengah	18
3	Sumatera Utara	18
4	Jawa Barat	13
5	Nusa Tenggara Timur	12
6	Sulawesi Selatan	10
7	Sulawesi Tenggara	9
8	Kalimantan Barat	8
9	Sumatera Barat	8
10	Aceh	7
11	Sulawesi Utara	7
12	Sumatera Selatan	7
13	Lampung	6
14	Jambi	5
15	Kalimantan Tengah	5
16	Nusa Tenggara Barat	5
17	Papua	5
18	Sulawesi Barat	5
19	Sulawesi Tengah	5
20	Bali	4
21	Bengkulu	4
22	Kalimantan Selatan	4
23	Kalimantan Timur	4
24	Kep. Riau	4
25	Maluku	4
26	Papua Barat Daya	4
27	Riau	4
28	Banten	3
29	Gorontalo	3
30	Kep. Bangka Belitung	3
31	DI Yogyakarta	2
32	Maluku Utara	2
33	Papua Barat	2
34	Papua Selatan	2

Jenis dan Jumlah Tenaga Sesuai Pedoman dan Terlatih



- c. Terdapat 156 Kabupaten/Kota (31%) dari 32 Provinsi yang jenis dan jumlah tenaga tim pengendalian kasus MERS di RS Rujukan tidak sesuai pedoman dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 7 Persebaran Kabupaten/Kota dengan jenis dan jumlah tenaga tim pengendalian kasus MERS di RS Rujukan yang tidak sesuai pedoman

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Aceh	16
2	Sumatera Utara	11
3	Sulawesi Tenggara	8
4	Sumatera Barat	8
5	Bengkulu	7
6	Jawa Timur	7
7	Nusa Tenggara Timur	7
8	Sulawesi Selatan	7
9	Kalimantan Barat	6
10	Kalimantan Tengah	6
11	Lampung	6
12	Maluku	6
13	Maluku Utara	6
14	Papua Barat	6
15	Jawa Barat	5
16	Jawa Tengah	5
17	Riau	5
18	Papua Tengah	4
19	Sulawesi Tengah	4
20	Jambi	3
21	Kalimantan Selatan	3
22	Sulawesi Utara	3

23	Sumatera Selatan	3
24	Bali	2
25	Gorontalo	2
26	Kep. Bangka Belitung	2
27	Papua	2
28	Papua Selatan	2
29	Kalimantan Timur	1
30	Kalimantan Utara	1
31	Nusa Tenggara Barat	1
32	Papua Barat Daya	1

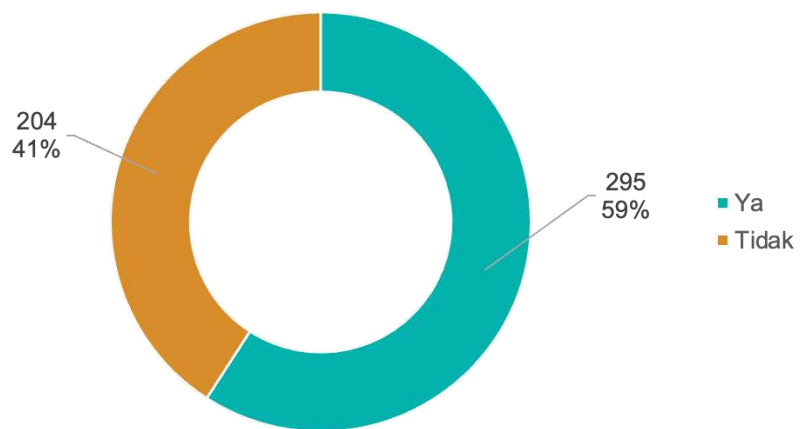
- d. Selain itu, terdapat 268 Kabupaten/Kota (54%) dari 36 Provinsi yang ada jenis dan jumlah tenaga tim pengendalian kasus MERS di RS Rujukan sesuai pedoman namun ada yang belum terlatih dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 8 Persebaran Kabupaten/Kota dengan jenis dan jumlah tenaga tim pengendalian kasus MERS di RS Rujukan sesuai pedoman namun ada yang belum terlatih

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Jawa Timur	25
2	Sumatera Utara	21
3	Jawa Tengah	19
4	Sulawesi Selatan	15
5	Jawa Barat	14
6	Nusa Tenggara Timur	14
7	Sumatera Selatan	11
8	Sulawesi Tengah	9
9	Sulawesi Tenggara	9
10	Sumatera Barat	9
11	Kalimantan Barat	8
12	Sulawesi Utara	8
13	Aceh	7
14	Jambi	7
15	Kalimantan Timur	7
16	Riau	7
17	Bali	6
18	Kep. Riau	6
19	Lampung	6
20	Sulawesi Barat	6
21	Banten	5
22	Maluku	5
23	Gorontalo	4
24	Kalimantan Selatan	4
25	Kalimantan Tengah	4
26	Kalimantan Utara	4

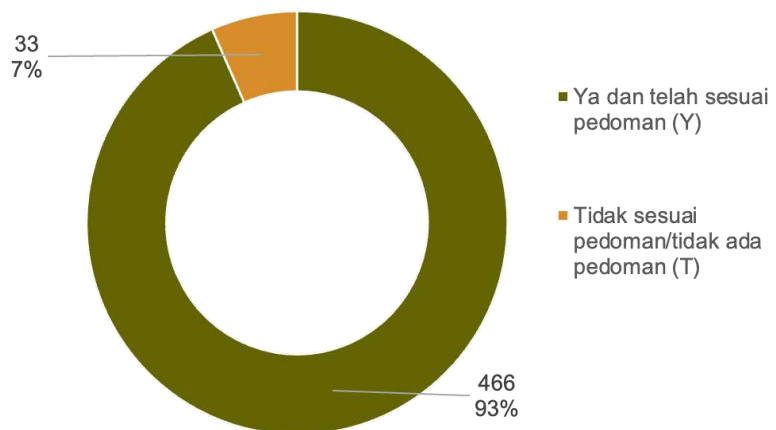
27	Nusa Tenggara Barat	4
28	Papua	4
29	Papua Barat Daya	4
30	Bengkulu	3
31	DI Yogyakarta	3
32	Kep. Bangka Belitung	3
33	Maluku Utara	3
34	Papua Selatan	2
35	DK Jakarta	1
36	Papua Barat	1

Ketersediaan SOP Tatalaksana Kasus dan SOP Pengelolaan Spesimen di RS



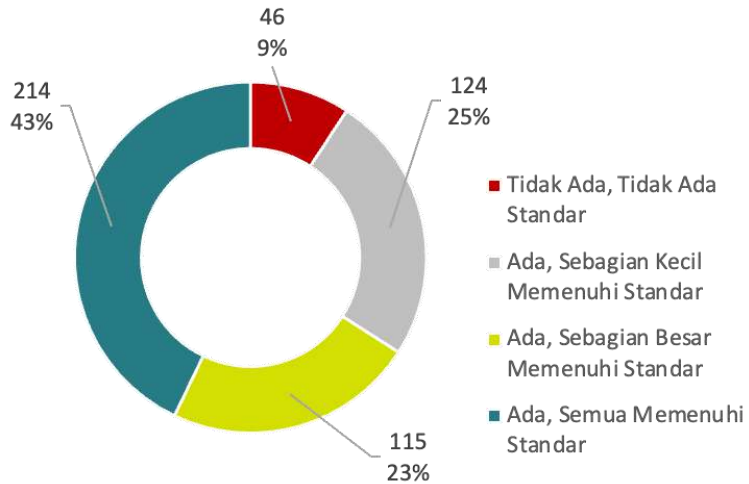
- e. Terdapat 204 Kabupaten/Kota (41%) yang tidak memiliki standar operasional prosedur tatalaksana kasus dan standar operasional pengelolaan spesimen di RS Rujukan.

PPI di RS Telah Diterapkan Sesuai Pedoman



- f. Terdapat 33 Kabupaten/Kota (7%) yang tidak memiliki prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di RS Rujukan yang tidak sesuai pedoman/tidak ada pedoman

Ketersediaan Ruang Isolasi MERS



- g. Terdapat 46 Kabupaten/Kota (9%) dari 21 Provinsi yang tidak memiliki ruang isolasi untuk MERS di RS Rujukan dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 9 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak memiliki ruang isolasi untuk MERS di RS Rujukan

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Aceh	7
2	Sumatera Barat	6
3	Nusa Tenggara Timur	5
4	Maluku	4
5	Maluku Utara	3
6	Jambi	2
7	Lampung	2
8	Papua Barat	2
9	Papua Barat Daya	2
10	Papua Tengah	2
11	Jawa Barat	1
12	Jawa Timur	1
13	Kalimantan Barat	1
14	Kalimantan Selatan	1
15	Kalimantan Timur	1
16	Kalimantan Utara	1
17	Papua	1
18	Sulawesi Tengah	1
19	Sulawesi Utara	1

20	Sumatera Selatan	1
21	Sumatera Utara	1

- h. Selain itu, terdapat 124 Kabupaten/Kota (25%) dari 30 Provinsi yang ada ruang isolasi untuk MERS di RS Rujukan namun sebagian kecil memenuhi standar dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 10 Persebaran Kabupaten/Kota yang memiliki ruang isolasi MERS di RS Rujukan namun sebagian kecil memenuhi standar

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Sumatera Utara	11
2	Sulawesi Tenggara	10
3	Aceh	9
4	Nusa Tenggara Timur	7
5	Bengkulu	6
6	Jawa Timur	6
7	Sulawesi Selatan	6
8	Kalimantan Tengah	5
9	Maluku	5
10	Sulawesi Tengah	5
11	Jambi	4
12	Kalimantan Barat	4
13	Papua Barat	4
14	Sulawesi Utara	4
15	Jawa Barat	3
16	Kalimantan Selatan	3
17	Lampung	3
18	Maluku Utara	3
19	Papua Selatan	3
20	Riau	3
21	Sumatera Barat	3
22	Sumatera Selatan	3
23	Bali	2
24	Gorontalo	2
25	Kalimantan Timur	2
26	Kep. Riau	2
27	Papua	2
28	Papua Barat Daya	2
29	Kalimantan Utara	1
30	Kep. Bangka Belitung	1

- i. Sedangkan 115 Kabupaten/Kota (23%) dari 34 Provinsi memiliki ruang isolasi untuk MERS di RS Rujukan namun sebagian besar memenuhi standar dengan uraian sebagai berikut:

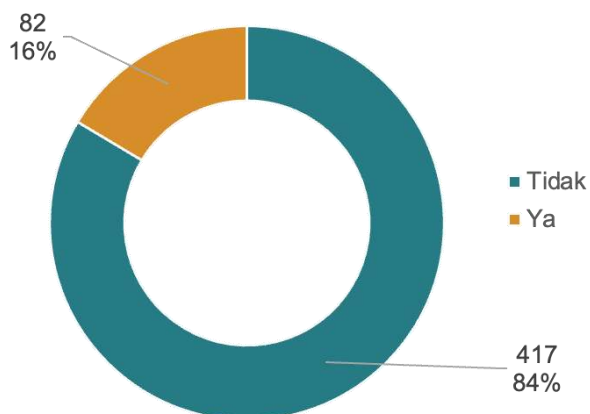
Tabel 11 Persebaran Kabupaten/Kota yang memiliki ruang isolasi MERS di RS Rujukan namun sebagian besar memenuhi standar

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Jawa Timur	15
2	Aceh	7
3	Sulawesi Selatan	7
4	Sumatera Selatan	7
5	Sumatera Utara	7
6	Jawa Barat	4
7	Jawa Tengah	4
8	Kalimantan Barat	4
9	Kalimantan Selatan	4
10	Kalimantan Tengah	4
11	Lampung	4
12	Sulawesi Utara	4
13	Bengkulu	3
14	Gorontalo	3
15	Kalimantan Timur	3
16	Nusa Tenggara Barat	3
17	Nusa Tenggara Timur	3
18	Riau	3
19	Sulawesi Tengah	3
20	Sulawesi Tenggara	3
21	Banten	2
22	Jambi	2
23	Kalimantan Utara	2
24	Kep. Bangka Belitung	2
25	Maluku Utara	2
26	Sumatera Barat	2
27	Bali	1
28	DI Yogyakarta	1
29	DK Jakarta	1
30	Maluku	1
31	Papua Barat	1
32	Papua Selatan	1
33	Papua Tengah	1
34	Sulawesi Barat	1

3. Rencana Kontijensi

Dari 499 Kabupaten/Kota yang telah mengisi tools pemetaan risiko penyakit MERS, terhadap subkategori **Rencana Kontijensi** diperoleh temuan sebagai berikut:

Ketersediaan Rencana Kontijensi MERS



Terdapat 417 Kabupaten/Kota (84%) dari 37 Provinsi yang tidak memiliki dokumen rencana kontijensi MERS dengan uraian sebagai berikut:

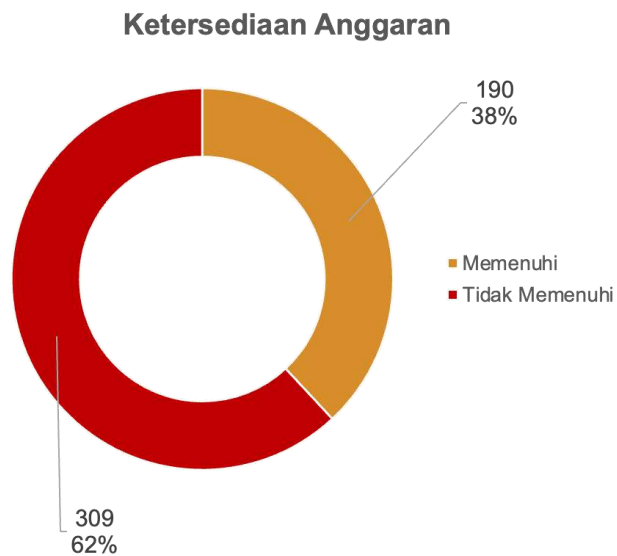
Tabel 12 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak memiliki dokumen rencana kontijensi MERS

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Jawa Tengah	33
2	Sumatera Utara	32
3	Jawa Timur	28
4	Jawa Barat	23
5	Sulawesi Selatan	19
6	Aceh	18
7	Sumatera Barat	18
8	Nusa Tenggara Timur	17
9	Sulawesi Tenggara	17
10	Sumatera Selatan	14
11	Lampung	13
12	Kalimantan Selatan	12
13	Kalimantan Tengah	12
14	Sulawesi Utara	12
15	Kalimantan Barat	11
16	Riau	11
17	Bengkulu	10
18	Maluku Utara	10
19	Bali	9
20	Jambi	9
21	Maluku	9
22	Nusa Tenggara Barat	9
23	Sulawesi Tengah	9

24	Kalimantan Timur	7
25	Papua	7
26	Banten	6
27	Gorontalo	5
28	Papua Barat	5
29	Papua Tengah	5
30	Sulawesi Barat	5
31	DI Yogyakarta	4
32	Kep. Bangka Belitung	4
33	Kep. Riau	4
34	Kalimantan Utara	3
35	Papua Barat Daya	3
36	Papua Selatan	3
37	DK Jakarta	1

4. Anggaran Penanggulangan

Dari 499 Kabupaten/Kota yang telah mengisi tools pemetaan risiko penyakit MERS, terhadap subkategori **Anggaran Penanggulangan** diperoleh temuan sebagai berikut:



Terdapat 309 Kabupaten/Kota (62%) dari 37 Provinsi yang anggaran penanggulangannya tidak memenuhi yaitu estimasi budget yang diperlukan lebih besar dibandingkan dengan budget yang tersedia untuk memperkuat kewaspadaan, kesiapsiagaan dan penanggulangan MERS dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 13 Persebaran Kabupaten/Kota dengan anggaran penanggulangan MERS tidak memenuhi

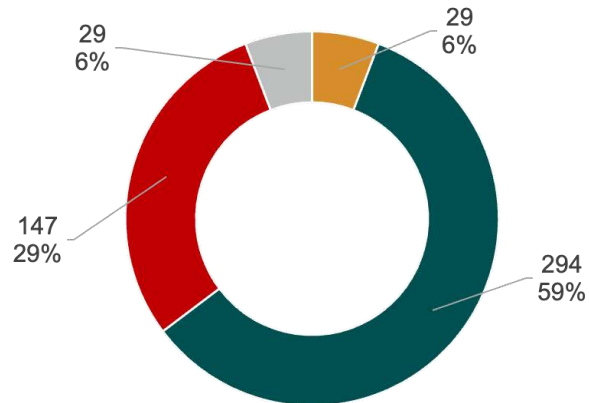
No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Jawa Tengah	25
2	Sumatera Utara	21
3	Jawa Timur	20
4	Sulawesi Selatan	20
5	Aceh	15
6	Sumatera Barat	15
7	Jawa Barat	14
8	Nusa Tenggara Timur	14
9	Sulawesi Tenggara	13
10	Sulawesi Tengah	11
11	Sulawesi Utara	11
12	Kalimantan Barat	9
13	Lampung	9
14	Nusa Tenggara Barat	9
15	Kalimantan Selatan	8
16	Kalimantan Tengah	8
17	Sumatera Selatan	8
18	Bengkulu	7
19	Jambi	7
20	Riau	7
21	DK Jakarta	6
22	Maluku	5
23	Sulawesi Barat	5
24	Banten	4
25	DI Yogyakarta	4
26	Kep. Riau	4
27	Maluku Utara	4
28	Papua Barat	4
29	Gorontalo	3
30	Kalimantan Timur	3
31	Papua	3
32	Papua Barat Daya	3
33	Papua Selatan	3
34	Papua Tengah	3
35	Kep. Bangka Belitung	2
36	Bali	1
37	Kalimantan Utara	1

ANALISIS PER SUBKATEGORI DENGAN DOMINASI RENDAH

1. Kebijakan Publik

Dari 499 Kabupaten/Kota yang telah mengisi tools pemetaan risiko penyakit MERS, terhadap subkategori **Kebijakan Publik** diperoleh temuan sebagai berikut:

Ketersediaan Kebijakan Kewaspadaan MERS



- Tidak ada dan isu kewaspadaan tidak menjadi perhatian
- Tidak ada, hanya menjadi perhatian tingkat Kepala Bidang terkait
- Ada, dengan diterbitkan surat edaran atau surat keputusan terkait oleh Kepala Dinas Kesehatan
- Ada, dengan diterbitkan surat edaran atau surat keputusan terkait oleh Kepala Daerah

- a. Terdapat 29 Kabupaten/Kota (6%) dari 15 Provinsi yang tidak ada kebijakan kewaspadaan MERS dan isu kewaspadaannya tidak menjadi perhatian dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 14 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak ada kebijakan kewaspadaan MERS dan isu kewaspadaannya tidak menjadi perhatian

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Nusa Tenggara Timur	4
2	Papua	4
3	Papua Tengah	4
4	Aceh	3
5	Sumatera Utara	3
6	Jawa Timur	2
7	Jawa Barat	1
8	Jawa Tengah	1
9	Kalimantan Timur	1
10	Papua Barat Daya	1
11	Riau	1
12	Sulawesi Selatan	1
13	Sulawesi Tenggara	1

14	Sulawesi Utara	1
15	Sumatera Barat	1

- b. Selain itu, terdapat 294 Kabupaten/Kota (59%) dari 36 Provinsi yang tidak ada kebijakan kewaspadaan MERS namun hanya menjadi perhatian tingkat kepala bidang terkait dengan sebaran sebagai berikut:

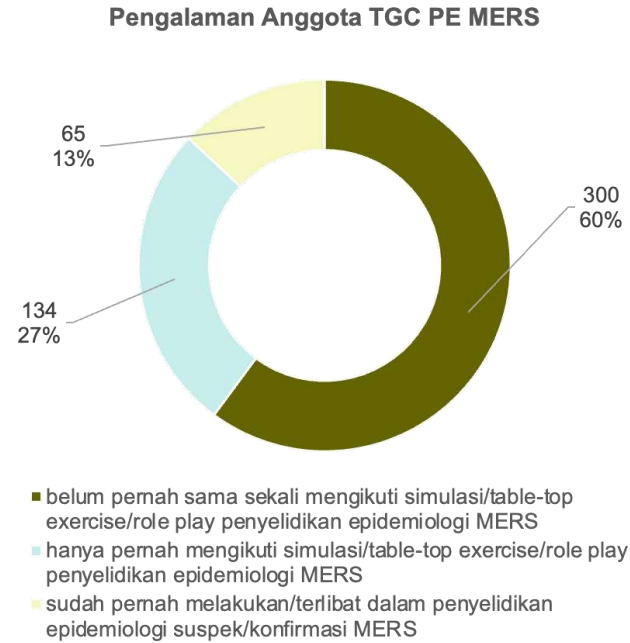
Tabel 15 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak ada kebijakan kewaspadaan MERS namun hanya menjadi perhatian tingkat kepala bidang terkait

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Jawa Timur	19
2	Sumatera Utara	19
3	Sulawesi Selatan	18
4	Aceh	14
5	Sumatera Barat	14
6	Jawa Barat	13
7	Nusa Tenggara Timur	13
8	Sulawesi Tenggara	13
9	Jawa Tengah	12
10	Sulawesi Tengah	11
11	Sulawesi Utara	11
12	Kalimantan Tengah	10
13	Lampung	10
14	Maluku	10
15	Bengkulu	7
16	Kalimantan Barat	7
17	Kep. Bangka Belitung	7
18	Papua Barat	7
19	Gorontalo	6
20	Jambi	6
21	Kalimantan Timur	6
22	Maluku Utara	6
23	Nusa Tenggara Barat	6
24	Riau	6
25	Sulawesi Barat	6
26	Bali	5
27	Banten	5
28	Kalimantan Selatan	5
29	Kep. Riau	4
30	Sumatera Selatan	4
31	Papua	3
32	Papua Barat Daya	3
33	Papua Selatan	3

34	DI Yogyakarta	2
35	Kalimantan Utara	2
36	Papua Tengah	1

2. Kompetensi Penyelidikan Epidemiologi MERS-CoV

Dari 499 Kabupaten/Kota yang telah mengisi tools pemetaan risiko penyakit MERS, terhadap subkategori **Kompetensi Penyelidikan Epidemiologi MERS-CoV** diperoleh temuan sebagai berikut:



- a. Terdapat 300 Kabupaten/Kota (60%) dari 36 Provinsi yang anggota TGC di tingkat Kabupaten/Kota belum pernah sama sekali mengikuti simulasi/*table-top exercise* (TTX)/*role play* penyelidikan epidemiologi MERS dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 16 Persebaran Kabupaten/Kota dengan anggota TGC di tingkat Kabupaten/Kota belum pernah sama sekali mengikuti simulasi/TTX/*role play* penyelidikan epidemiologi MERS

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Sumatera Utara	27
2	Jawa Timur	20
3	Jawa Tengah	19
4	Sulawesi Selatan	16
5	Aceh	14
6	Jawa Barat	14
7	Nusa Tenggara Timur	14
8	Sumatera Barat	12
9	Sulawesi Tenggara	11

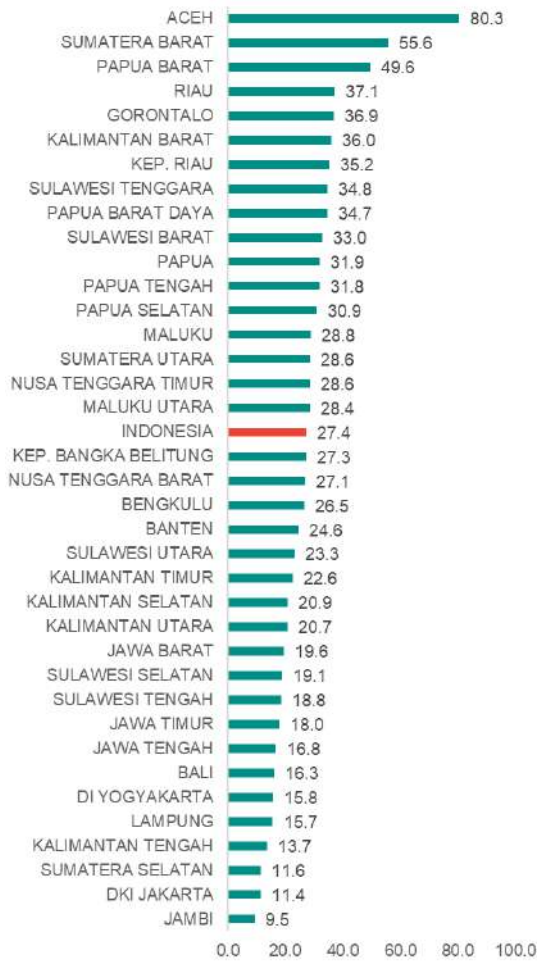
10	Riau	10
11	Sumatera Selatan	10
12	Kalimantan Barat	9
13	Lampung	9
14	Nusa Tenggara Barat	9
15	Kalimantan Tengah	8
16	Maluku	8
17	Sulawesi Utara	8
18	Sulawesi Tengah	7
19	Bengkulu	6
20	Maluku Utara	6
21	Gorontalo	5
22	Jambi	5
23	Kalimantan Selatan	5
24	Kep. Riau	5
25	Papua	5
26	Papua Barat	5
27	Sulawesi Barat	5
28	Bali	4
29	Kalimantan Timur	4
30	Kalimantan Utara	4
31	Kep. Bangka Belitung	4
32	Papua Tengah	4
33	Banten	3
34	Papua Barat Daya	2
35	Papua Selatan	2
36	DK Jakarta	1

2. Gambaran Pemetaan Risiko Difteri

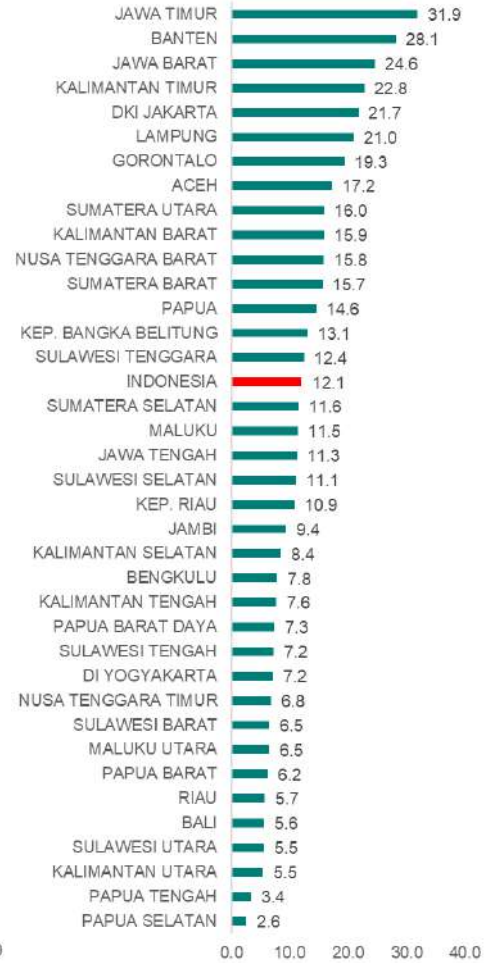
a. Nilai Hasil Ancaman, Kerentanan, dan Kapasitas Pemetaan Penyakit Difteri di Indonesia Tahun 2024

Pada tahun 2024 terdapat 500 kabupaten/kota yang telah melakukan pemetaan risiko untuk Difteri. Berdasarkan penghitungan indeks pada setiap pertanyaan di subkategori, persebaran indeks ancaman, kerentanan, dan kapasitas pemetaan penyakit Difteri pada tahun 2024 ialah sebagai berikut:

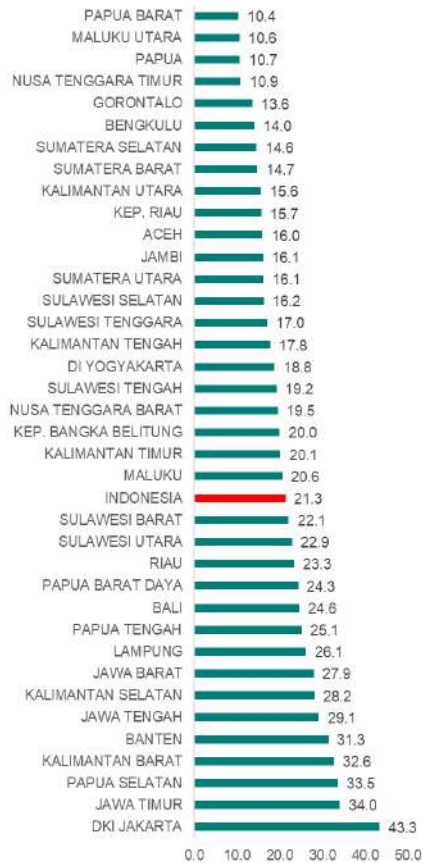
Persebaran Nilai Indeks Kerentanan Diferi di Indonesia Tahun 2024



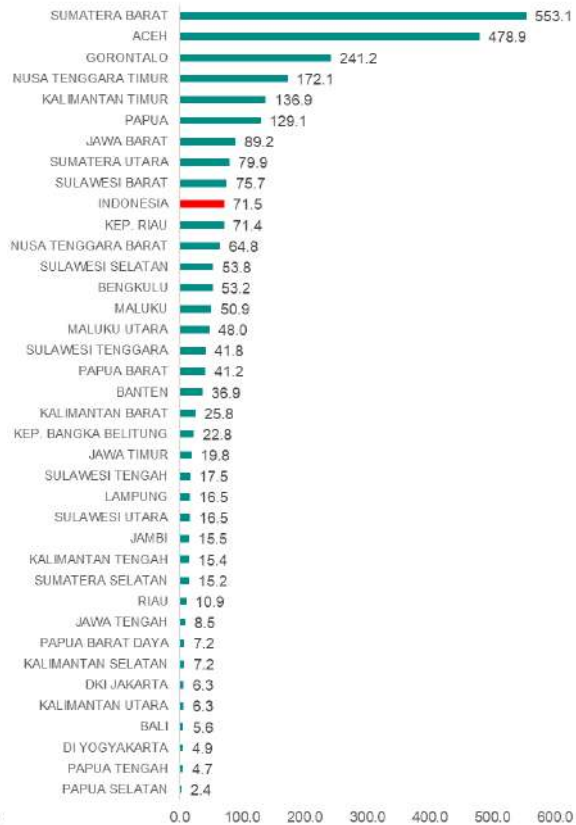
Persebaran Nilai Indeks Ancaman Diferi di Indonesia Tahun 2024



Persebaran Nilai Indeks Kapasitas Difteri di Indonesia Tahun 2024



Persebaran Nilai Risiko Difteri di Indonesia Tahun 2024



Berdasarkan ilustrasi di atas, rerata nilai **indeks ancaman Difteri di Indonesia adalah 12.1** serta Provinsi dengan rerata nilai indeks ancaman Difteri tertinggi adalah Jawa Timur. Terdapat 15 provinsi yang memiliki nilai indeks ancaman yang lebih tinggi daripada rerata Indonesia.

Untuk kategori kerentanan, rerata **nilai indeks kerentanan di Indonesia adalah 27.4** dan Provinsi dengan nilai indeks kerentanan Difteri tertinggi adalah Aceh. Terdapat 17 provinsi yang memiliki nilai indeks kerentanan yang lebih tinggi daripada rerata Indonesia.

Untuk kategori kapasitas, rerata **nilai indeks kapasitas di Indonesia sebesar 21.3** serta Provinsi dengan nilai indeks kapasitas Difteri terendah adalah Papua Barat. Terdapat 22 provinsi yang memiliki nilai indeks kapasitas yang lebih rendah daripada rerata Indonesia.

Terakhir, rerata **nilai risiko di Indonesia sebesar 71.5** serta Provinsi dengan nilai risiko Difteri tertinggi adalah Sumatera Barat. Terdapat 9 provinsi yang memiliki nilai risiko Difteri lebih tinggi daripada rerata Indonesia yaitu Sumatera Barat, Aceh, Gorontalo, NTT, Kalimantan Timur, Papua, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Barat.

b. Analisis Kategori Dominan pada Kategori Ancaman

No	SUBKATEGORI	BOBOT	ACEH	BALI	BANTEN	BENGKULU	DIYOGYAKARTA	GORONTALO	JAWA	JAWA BARAT	JAWA TIMUR	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KELANTAN UTARA	KEP. BANGKA UTARA	KEP. RIAU	LAMPUNG	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT	PAPUA BARAT DARA	PAPUA TEGALINGGAM	RIAU	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	SUMATERA BARAT	SUMATERA SELATAN	DOMINASI	%	
1	Karakteristik penyakit (literatur dan tim ahli)	6.72	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2	Pencegahan dan pengobatan (literatur dan tim ahli)	24.63	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Risiko importasi	4.48	T	S	T	S	S	T	S	T	T	T	T	T	T	T	S	S	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
4	Risiko perularan setempat	14.93	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
5	Sumber penularan	14.93	A	A	T	A	A	T	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
6	Dampak Ekonomi	11.19	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
7	Dampak Wilayah/Lama KLB	10.45	T	S	T	S	T	S	S	T	S	T	S	T	S	T	S	S	T	S	S	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
8	Epidemiologi/wilayah kasus sebelumnya	12.68	A	A	T	A	A	T	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Dari 8 (delapan) subkategori Ancaman, terdapat 1 subkategori dengan dominasi **TINGGI** yaitu risiko importasi. Selain itu, terdapat 2 subkategori dengan dominasi **SEDANG** yaitu karakteristik penyakit dan dampak wilayah/lama KLB.

c. Analisis Kategori Dominan dan Analisis per Subkategori pada Kategori Kerentanan

No	SUBKATEGORI	BOBOT	ACEH	BALI	BANTEN	BENGKULU	DIYOGYAKARTA	GORONTALO	JAWA	JAWA BARAT	JAWA TIMUR	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KELANTAN UTARA	KEP. BANGKA UTARA	KEP. RIAU	LAMPUNG	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT	PAPUA BARAT DARA	PAPUA TEGALINGGAM	RIAU	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	SUMATERA BARAT	SUMATERA SELATAN	DOMINASI	%		
1	Transportasi antar provinsi dan antar kabupaten/kota	5.56	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
2	Kapasitas penduduk	11.11	R	T	T	R	T	R	R	T	T	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Cakupan imunisasi DPT3	20.63	T	R	A	R	A	R	R	A	A	R	A	A	R	A	S	S	R	A	S	S	R	A	S	S	R	A	S	S	R	A	S	S	R	A	S
4	Cakupan imunisasi DPT-HB-Hib	20.63	T	A	S	R	A	R	S	R	A	R	T	S	T	S	S	T	R	T	S	S	T	R	T	T	T	A	T	T	T	T	T	T	T	T	T
5	Cakupan imunisasi DT	20.63	T	A	R	A	A	R	R	A	A	R	A	R	S	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
6	Cakupan imunisasi Td	20.63	T	A	R	A	R	R	R	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

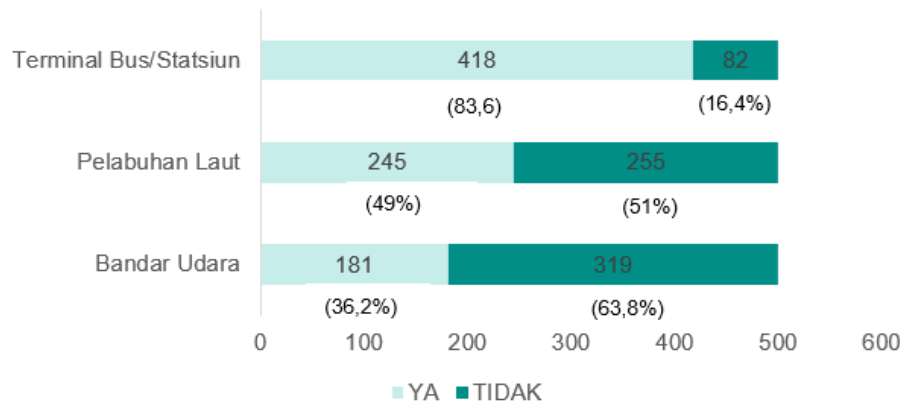
Dari 6 (enam) subkategori Kerentanan, terdapat 2 subkategori dengan dominasi **TINGGI** yaitu transportasi antar provinsi dan antar kabupaten/kota dan cakupan DPT-HB-Hib.

ANALISIS PER SUBKATEGORI DENGAN DOMINASI TINGGI

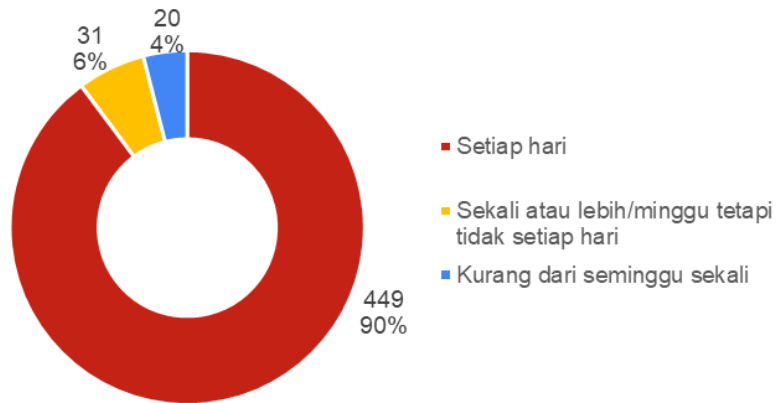
1. Transportasi antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota

Dari 500 Kabupaten/Kota yang telah mengisi tool pemetaan risiko penyakit Difteri, terhadap subkategori **Transportasi antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota** diperoleh temuan sebagai berikut:

Persebaran Jumlah Kab/Kota Berdasarkan Keberadaan Terminal/Stasiun, Pelabuhan dan Bandar Udara Tahun 2024



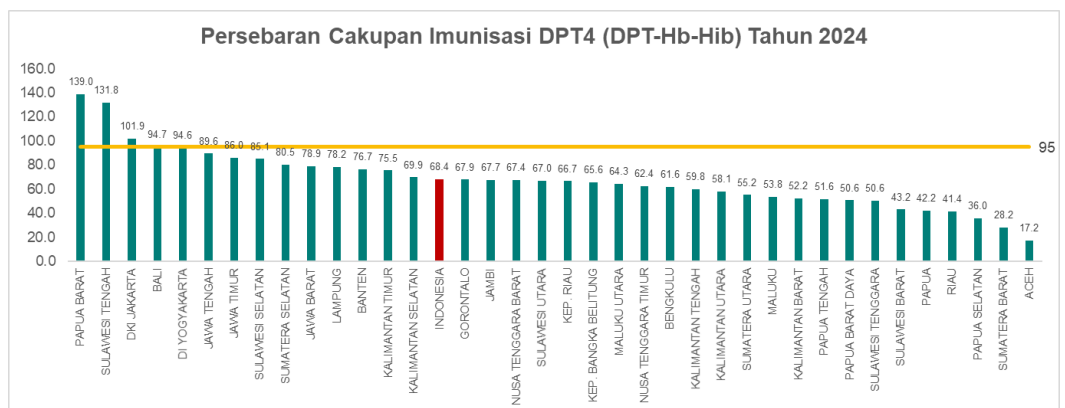
Proporsi Jumlah Kab/Kota Berdasarkan Frekuensi Transportasi antar Kab/Kota Tahun 2024



Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penularan Difteri adalah mobilitas penduduk antar wilayah. Untuk menilai kerentanan dalam mobilitas penduduk, dapat dilihat dari keberadaan terminal/stasiun/pelabuhan/bandara dan frekuensi transportasi antar kabupaten/kota. Dari 500 Kabupaten/Kota yang telah mengisi *tools* pemetaan risiko Difteri, terhadap subkategori transportasi antar kabupaten/kota/provinsi, sebagian besar (83,6%) atau sebanyak 418 kabupaten/kota memiliki terminal bus/stasiun, sebagian (49%) atau sebanyak 245 kabupaten/kota terdapat pelabuhan, dan hanya sebagian kecil (36,2%) atau sebanyak 181 kabupaten/kota yang memiliki bandar udara. Berdasarkan frekuensi transportasi antar kabupaten/kota, sebagian besar (90%) atau 449 kabupaten/kota memiliki frekuensi transportasi antar kabupaten/kota setiap hari. Sedangkan lainnya memiliki frekuensi sekali/lebih dari 1 kali seminggu namun tidak setiap hari (6%), dan kurang dari 1 minggu sekali (4%). Gambaran persebaran kabupaten/kota berdasarkan keberadaan terminal/stasiun/pelabuhan/bandara dan frekuensi transportasi antar kabupaten/kota dapat dilihat pada grafik diatas.

2. Cakupan imunisasi DPT-HB-HiB

Dari 500 Kabupaten/Kota yang telah mengisi tool pemetaan risiko penyakit Difteri, terhadap subkategori **Cakupan Imunisasi DPT-HB-HiB** diperoleh temuan sebagai berikut:



Cakupan imunisasi dasar lengkap untuk difteri sangat berperan dalam memutus rantai penularan difteri. Berdasarkan hasil pemetaan risiko difteri tahun 2024 yang telah diisi oleh 500 kabupaten/kota di 37 Provinsi, rerata capaian cakupan imunisasi di Indonesia sebesar 68.4% dan belum mencapai target nasional yaitu sebesar 95%. Sebanyak 34 Provinsi dengan cakupan imunisasi DPT4 (DPT-HB-Hib) yang belum mencapai target nasional dan sebanyak 23 Provinsi dengan cakupan imunisasi DPT4 (DPT-HB-Hib) dibawah capaian imunisasi DPT4 (DPT-HB-Hib) di indonesia. Data ini mungkin berbeda dengan data capaian program imunisasi nasional karena perbedaan sumber data yang dipakai oleh kabupaten/kota.

d. Analisis Kategori Dominan dan Analisis per Subkategori dengan Dominasi Abai pada Kategori Kapasitas

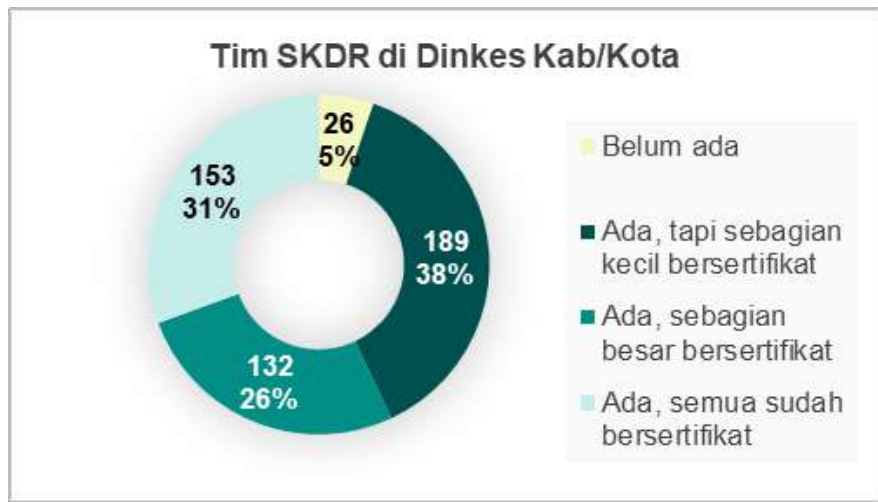
No	SUBKATEGORI	BOBOT	ACEH	BALI	BANTEN	BENGKULU	D.I.YOGYAKARTA	DIJKABAYA	SORONG/ALO	JAMBI	JAWA BARAT	JAWA TIMUR	JAWA TENGGAH	KULONKARAN	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	KEP. BANGKA	KEP. RIAU	LAMPUNG	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA BARAT	PAPUA BARAT DAYA	PAPUA PEGUMULGAN	PAPUA TENGGAH	RIAU	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SUMATERA BARAT	SUMATERA SELATAN	DOMINASI	%												
1	Analisis ancaman Difteri di wilayah	7.39	A	A	A	T	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	84.2			
2	Deteksi dini Difteri di Fasyankes	5.54	R	A	R	A	T	R	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	50.0	
3	Kebijakan Publik	17.96	R	S	S	R	S	S	R	R	S	S	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	63.2
4	Kapasitas Laboratorium	5.19	A	R	R	A	A	R	A	R	R	R	R	A	R	R	A	R	R	A	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	52.8
5	Tatalaksana Kasus di RS	10.04	R	R	A	A	S	T	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	52.8	
6	Penyelidikan epidemiologi	11.83	R	R	A	A	R	S	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	52.6	
7	Anggaran penanggulangan	14.45	R	T	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	T	T	T	T	R	R	T	T	R	R	R	R	T	T	T	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	68.4
8	Kelembagaan	17.96	T	T	S	S	S	S	T	T	T	T	T	T	S	T	T	T	S	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	76.3	
9	Ketersediaan vaksin	9.50	R	T	S	T	S	R	T	T	T	T	T	S	T	S	T	R	T	T	T	T	S	R	T	T	T	S	T	T	S	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	83.2

Dari 9 (sembilan) subkategori Kapasitas, terdapat 2 subkategori dengan dominasi **ABAI** yaitu analisis ancaman difteri di wilayah dan deteksi dini difteri di fasyankes. Selain itu, terdapat 5 subkategori dengan dominasi **RENDAH** yaitu kebijakan publik, kapasitas laboratorium, tatalaksana kasus di RS, penyelidikan epidemiologi, dan anggaran penanggulangan.

ANALISIS PER SUBKATEGORI DENGAN DOMINASI ABAI

1. Analisis Ancaman Difteri di wilayah

Dari 500 Kabupaten/Kota yang telah mengisi tool pemetaan risiko penyakit Difteri, terhadap subkategori **Analisis Ancaman Difteri di Wilayah** diperoleh temuan sebagai berikut:



- a. Terdapat 26 Kabupaten/Kota (5%) dari 18 Provinsi yang belum memiliki Tim SKDR di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yakni:

Tabel 17 Persebaran Kabupaten/Kota yang belum memiliki Tim SKDR di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

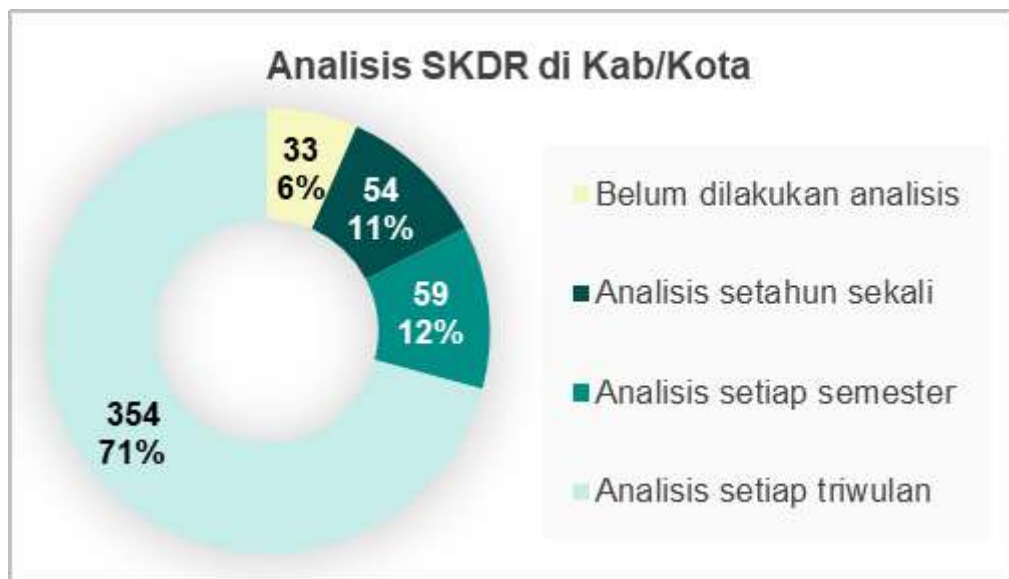
No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Aceh	4
2	Kalimantan Tengah	2
3	Maluku Utara	2
4	Nusa Tenggara Timur	2
5	Sulawesi Tenggara	2
6	Sumatera Barat	2
7	Bengkulu	1
8	Jambi	1
9	Jawa Timur	1
10	Kalimantan Barat	1
11	Kalimantan Timur	1
12	Maluku	1
13	Papua Barat	1
14	Papua Barat Daya	1
15	Riau	1
16	Sulawesi Utara	1
17	Sumatera Selatan	1
18	Sumatera Utara	1

Selain itu, juga terdapat 189 Kabupaten/Kota (38%) dari 34 Provinsi yang sudah memiliki Tim SKDR di Dinas Kesehatan namun baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat yakni:

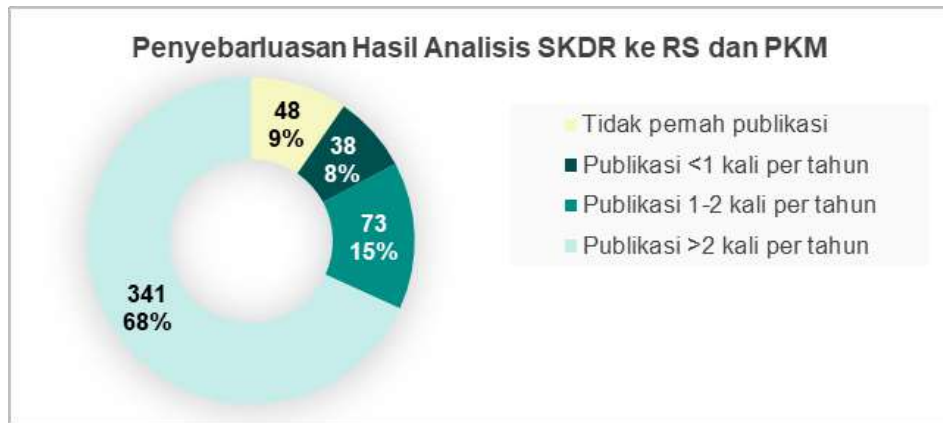
Tabel 18 Persebaran Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Tim SKDR di Dinas Kesehatan namun baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Nusa Tenggara Timur	16
2	Jawa Timur	14
3	Sumatera Barat	11
4	Aceh	10
5	Maluku	9
6	Sulawesi Tengah	8
7	Sumatera Utara	8
8	Kalimantan Selatan	7
9	Kalimantan Tengah	7
10	Kalimantan Barat	6
11	Lampung	6
12	Riau	6
13	Sulawesi Selatan	6
14	Sulawesi Tenggara	6

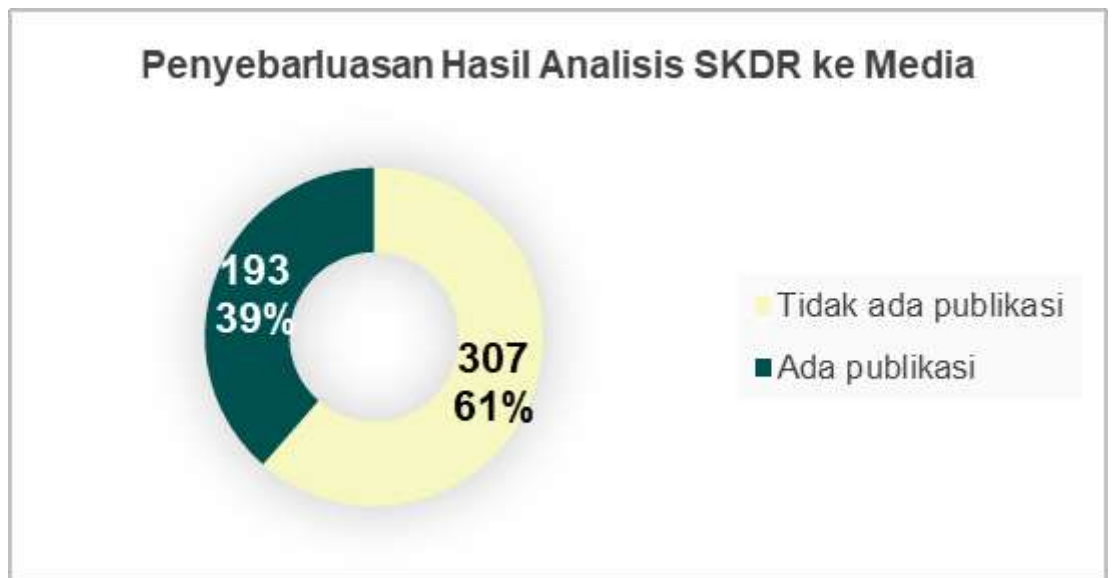
15	Sulawesi Utara	6
16	Jawa Barat	5
17	Jawa Tengah	5
18	Bali	4
19	Bengkulu	4
20	Kalimantan Timur	4
21	Kep. Riau	4
22	Papua	4
23	Papua Barat	4
24	Papua Barat Daya	4
25	Sumatera Selatan	4
26	DI Yogyakarta	3
27	Kalimantan Utara	3
28	Maluku Utara	3
29	Papua Selatan	3
30	Papua Tengah	3
31	Banten	2
32	Jambi	2
33	Gorontalo	1
34	Sulawesi Barat	1



- b. Sebagian besar Dinas Kesehatan Kab/Kota telah melakukan analisis SKDR dan dilaksanakan minimal setiap triwulan. Namun terdapat 33 Kabupaten/Kota (6%) dari 18 Provinsi yang belum melakukan analisis SKDR. Selain itu, terdapat 54 Kabupaten/Kota (11%) dari 21 Provinsi yang sudah melakukan analisis SKDR namun baru setahun sekali.



- c. Setelah dilakukan analisis, sebanyak 341 Kabupaten/Kota (68%) telah melakukan penyebarluasan hasil analisis SKDR ke rumah sakit dan puskesmas. Namun, masih terdapat 48 Kabupaten/Kota (9%) dari 25 Provinsi yang tidak pernah publikasi dan 38 Kabupaten/Kota (8%) dari 17 Provinsi yang melakukan publikasi <1 kali per tahun.



- d. Selain disebarluaskan kepada fasyankes, maka penting untuk melakukan penyebarluasan hasil analisis SKDR ke media agar dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Terdapat 307 Kabupaten/Kota dari 35 Provinsi yang belum melakukan penyebarluasan analisis SKDR ke media, yakni:

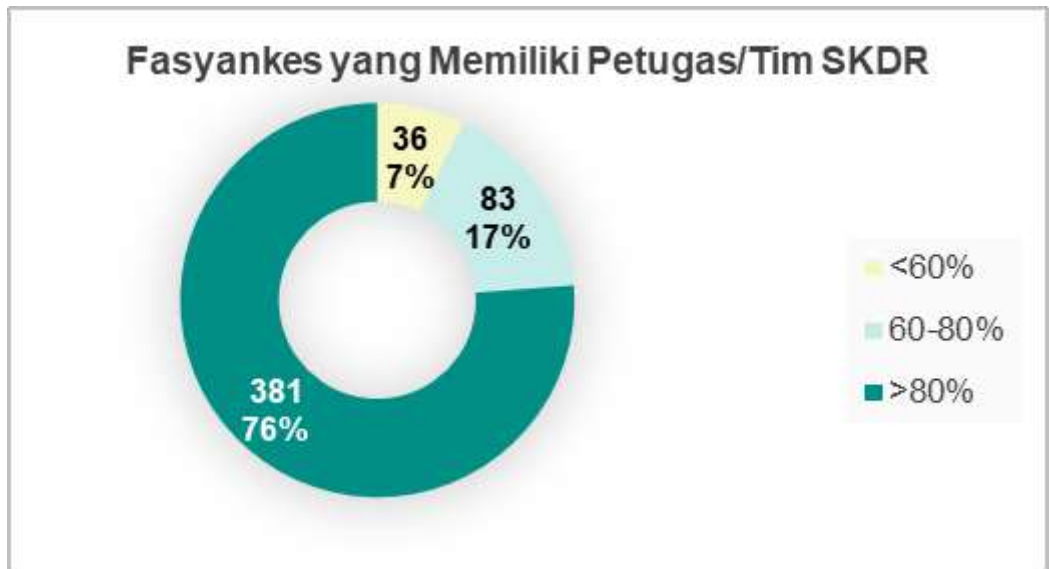
Tabel 19 Persebaran Kabupaten/Kota yang belum melakukan penyebarluasan analisis SKDR ke media

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Sumatera Utara	26
2	Jawa Timur	23
3	Jawa Tengah	20
4	Jawa Barat	17
5	Sulawesi Selatan	17
6	Aceh	16

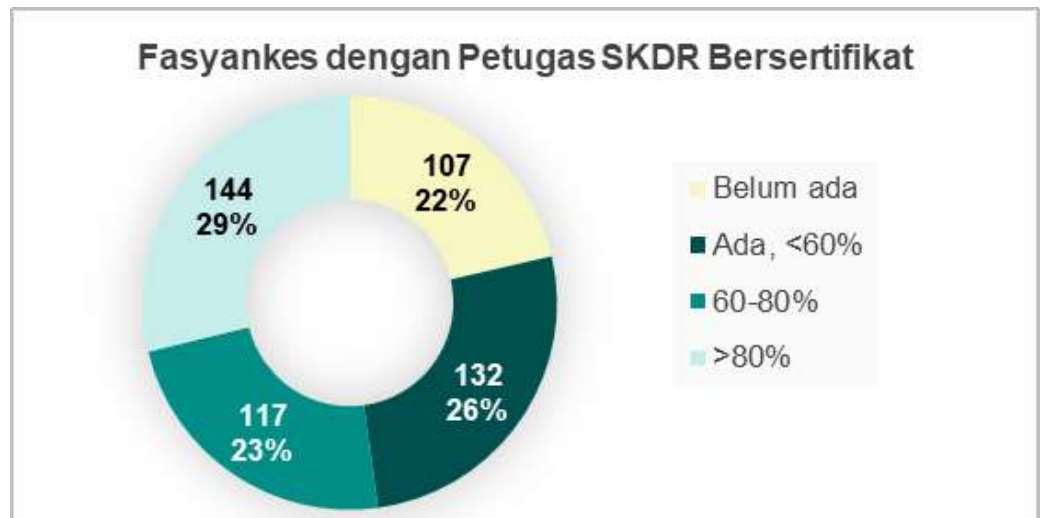
7	Sulawesi Tenggara	14
8	Sumatera Barat	13
9	Nusa Tenggara Timur	12
10	Kalimantan Tengah	10
11	Jambi	9
12	Maluku	9
13	Bengkulu	8
14	Sulawesi Utara	8
15	Sumatera Selatan	8
16	Bali	7
17	Kalimantan Barat	7
18	Kep. Bangka Belitung	7
19	Riau	7
20	Sulawesi Tengah	7
21	Kalimantan Selatan	6
22	Kep. Riau	6
23	Lampung	6
24	Nusa Tenggara Barat	6
25	Papua	6
26	Papua Barat	6
27	Kalimantan Timur	4
28	Papua Selatan	4
29	Papua Tengah	4
30	DI Yogyakarta	3
31	Maluku Utara	3
32	Papua Barat Daya	3
33	Banten	2
34	Gorontalo	2
35	Kalimantan Utara	1

2. Deteksi Dini Difteri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Dari 500 Kabupaten/Kota yang telah mengisi tool pemetaan risiko penyakit Difteri, terhadap subkategori **Deteksi Dini Difteri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan** diperoleh temuan sebagai berikut:



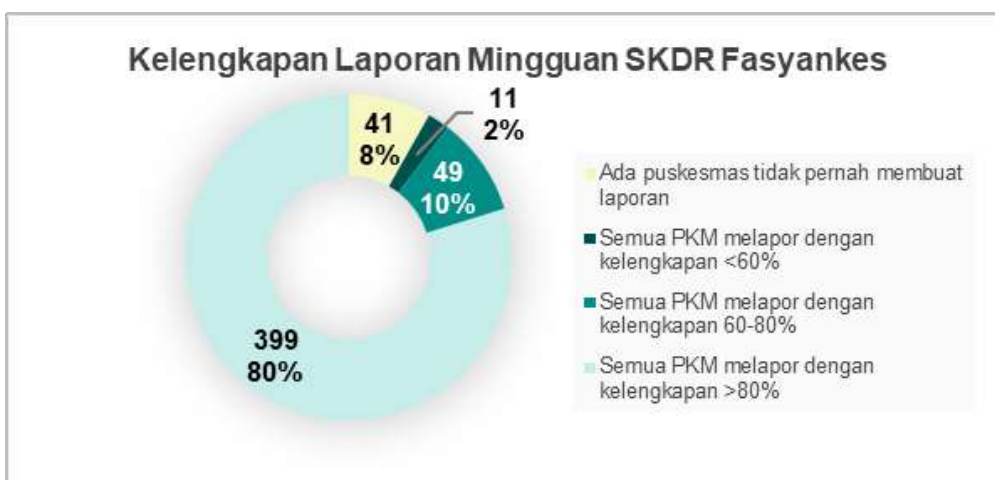
- a. Terdapat 36 Kabupaten/Kota (7%) dari 23 Provinsi yang fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya memiliki tim SKDR sebanyak <60%.



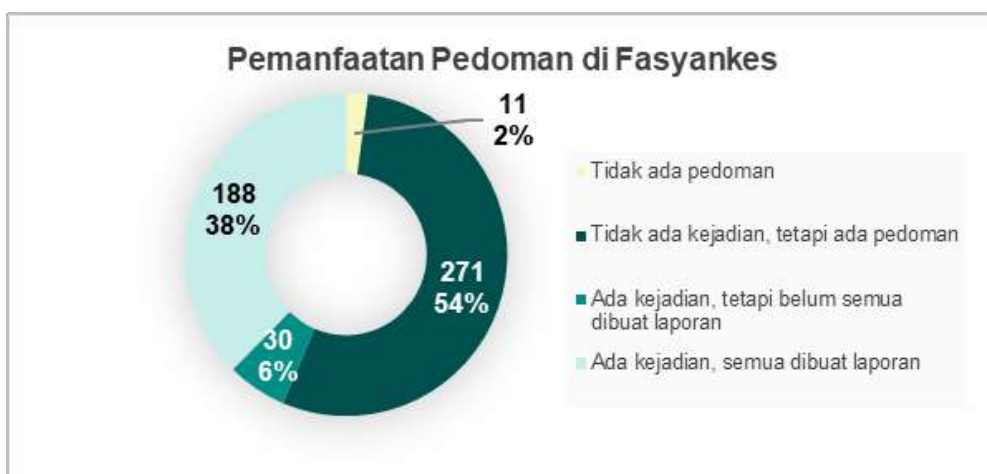
- b. Terdapat 107 Kabupaten/Kota (22%) dari 33 Provinsi yang fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya tidak memiliki petugas SKDR bersertifikat. Selain itu, terdapat 132 Kabupaten/Kota (26%) dari 32 Provinsi dengan kurang dari 60% fasilitas kesehatan di wilayahnya yang memiliki petugas SKDR bersertifikat.



- c. Terdapat 136 Kabupaten/Kota (27%) dari 35 Provinsi tidak pernah melakukan analisis rutin SKDR. Selain itu, terdapat 125 Kabupaten/Kota (25%) dari 30 Provinsi sudah melakukan analisis rutin namun terbatas pada tingkat kecamatan.



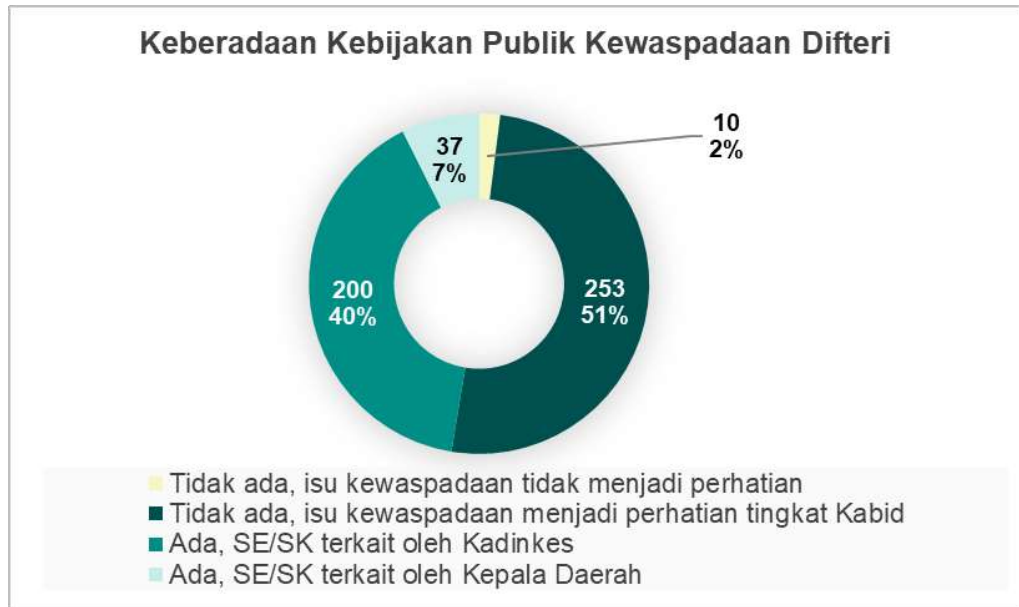
- d. Terdapat 41 Kabupaten/Kota (8%) dari 20 Provinsi memiliki Puskesmas yang tidak pernah membuat laporan mingguan. Selain itu, terdapat 11 Kabupaten/Kota (2%) dari 10 Provinsi yang seluruh Puskesmas di wilayahnya melapor namun kelengkapan laporan <60%.



- e. Terdapat 11 Kabupaten/Kota (2%) dari 10 Provinsi menjawab tidak adanya pedoman di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, terdapat 30 Kabupaten/Kota (6%) dari 17 Provinsi yang melaporkan kasus Difteri, namun belum semua kejadian dibuat laporan penyelidikan epidemiologi.

ANALISIS PER SUBKATEGORI DENGAN DOMINASI RENDAH

1. Kebijakan Publik



Dari 500 Kabupaten/Kota yang telah mengisi tool pemetaan risiko penyakit Difteri, terhadap subkategori **Kebijakan Publik** diperoleh temuan, yakni 10 Kabupaten/Kota dari 7 Provinsi tidak memiliki kebijakan kewaspadaan difteri serta isu tersebut tidak menjadi perhatian. Selain itu, terdapat 253 Kabupaten/Kota dari 36 Provinsi yang tidak memiliki kebijakan kewaspadaan difteri serta isu tersebut masih menjadi perhatian tingkat kepala bidang di Dinas Kesehatan, yakni:

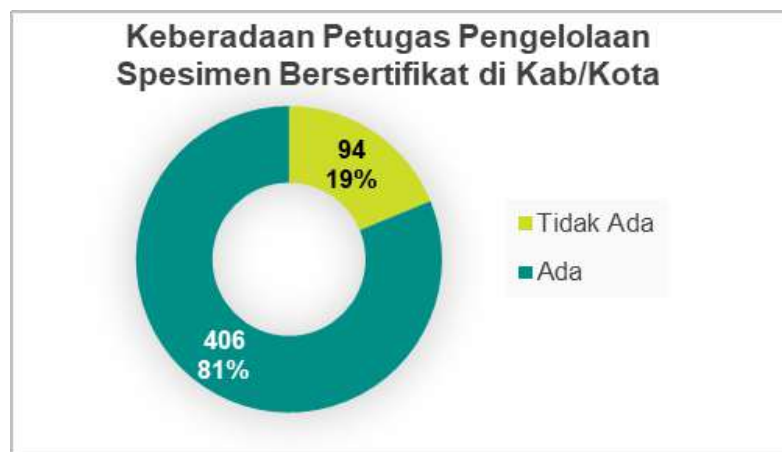
Tabel 20 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak memiliki kebijakan kewaspadaan Difteri serta isu tersebut masih menjadi perhatian tingkat kepala bidang di Dinas Kesehatan

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Sulawesi Selatan	18
2	Sumatera Utara	17
3	Nusa Tenggara Timur	15
4	Aceh	12
5	Jawa Timur	11
6	Maluku	11
7	Sumatera Barat	11
8	Sulawesi Tenggara	10
9	Sulawesi Utara	10
10	Kalimantan Tengah	9

11	Sumatera Selatan	9
12	Bengkulu	8
13	Jambi	8
14	Sulawesi Tengah	8
15	Jawa Tengah	7
16	Kep. Bangka Belitung	6
17	Maluku Utara	6
18	Nusa Tenggara Barat	6
19	Papua Barat	6
20	Riau	6
21	Gorontalo	5
22	Kalimantan Barat	5
23	Kalimantan Selatan	5
24	Lampung	5
25	Sulawesi Barat	5
26	Bali	4
27	Jawa Barat	4
28	Kalimantan Timur	4
29	Papua	4
30	Papua Selatan	4
31	Banten	3
32	Kep. Riau	3
33	Papua Barat Daya	3
34	Kalimantan Utara	2
35	Papua Tengah	2
36	DI Yogyakarta	1

2. Kapasitas Laboratorium

Dari 500 Kabupaten/Kota yang telah mengisi tool pemetaan risiko penyakit Difteri, terhadap subkategori **Kapasitas Laboratorium** diperoleh temuan sebagai berikut:



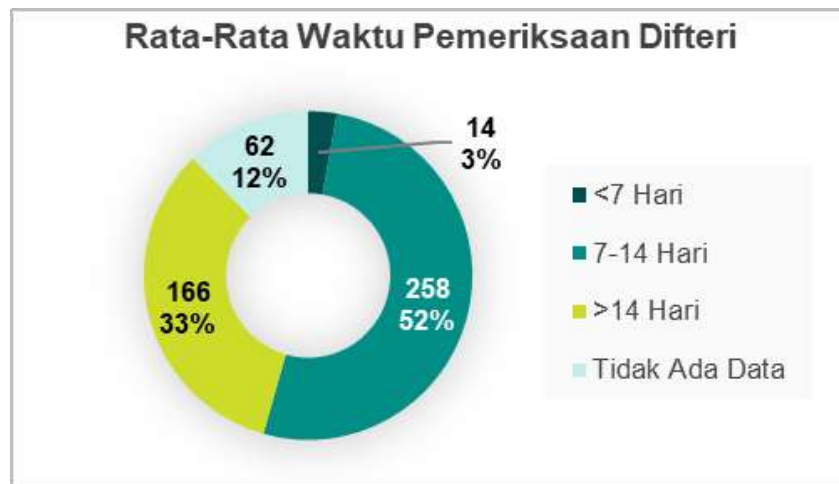
- a. Terdapat 94 Kabupaten/Kota (18%) dari 30 Provinsi yang tidak memiliki petugas pengelolaan spesimen bersertifikat, dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 21 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak memiliki petugas pengelolaan spesimen bersertifikat

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1.	Aceh	9	Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Bireuen, Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Subulussalam, dan Simeulue
2.	Bengkulu	8	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kota Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong, dan Seluma
3.	Jawa Timur	8	Gresik, Kota Pasuruan, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Sampang, dan Trenggalek
4.	Sumatera Barat	7	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Kota Sawahlunto, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, dan Pasaman Barat
5.	Sumatera Utara	5	Dairi, Deli Serdang, Nias Selatan, Tapanuli Utara, dan Toba
6.	DI Yogyakarta	4	Bantul, Kota Yogyakarta, Kulon Progo, dan Sleman
7.	Kalimantan Tengah	4	Kota Palangkaraya, Lamandau, Murung Raya, dan Sukamara

8.	Papua Barat	4	Fakfak, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Teluk Bintuni
9.	Sulawesi Selatan	4	Bantaeng, Barru, Kota Parepare, dan Tana Toraja
10.	Jawa Barat	3	Kota Cirebon, Kuningan, dan Subang
11.	Kalimantan Barat	3	Kapuas Hulu, Sekadau, dan Sintang
12.	Kalimantan Timur	3	Kota Samarinda, Kutai Barat, dan Penajam Paser Utara
13.	Nusa Tenggara Timur	3	Alor, Kota Kupang, dan Ngada
14.	Papua	3	Mamberamo Raya, Sarmi, dan Supiori
15.	Papua Tengah	3	Deiyai, Dogiyai, dan Nabire
16.	Bali	2	Bangli dan Karangasem
17.	Jambi	2	Merangin dan Tanjung Jabung Timur
18.	Kalimantan Selatan	2	Kotabaru dan Tabalong
19.	Lampung	2	Tulang Bawang dan Way Kanan
20.	Maluku	2	Buru Selatan dan Kep. Aru
21.	Papua Barat Daya	2	Raja Ampat dan Sorong
22.	Sulawesi Tengah	2	Morowali Utara dan Toli-Toli

23.	Sulawesi Tenggara	2	Buton Tengah dan Buton Utara
24.	Gorontalo	1	Kota Gorontalo
25.	Jawa Tengah	1	Kota Pekalongan
26.	Kep. Bangka Belitung	1	Belitung Timur
27.	Maluku Utara	1	Pulau Taliabu
28.	Riau	1	Kuantan Singingi
29.	Sulawesi Utara	1	Bolaang Mongondow Selatan
30.	Sumatera Selatan	1	Musi Rawas Utara



- b. Terdapat 166 Kabupaten/Kota (33%) dari 33 Provinsi yang rata-rata waktu pemeriksaan Diferi lebih dari 14 hari. Waktu terhitung sejak spesimen dikirimkan oleh fasyankes hingga fasyankes menerima hasil pemeriksaan. Sebarannya sebagai berikut:

Tabel 22 Persebaran Kabupaten/Kota dengan rata-rata waktu pemeriksaan Diferi lebih dari 14 hari

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1.	Sumatera Utara	31	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padangsidempuan, Kota

			Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba
2.	Nusa Tenggara Timur	10	Belu, Kota Kupang, Kupang, Malaka, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Timor Tengah Selatan
3.	Sulawesi Selatan	10	Bantaeng, Barru, Bulukumba, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Kota Palopo, Kota Parepare, Luwu, Luwu Utara, dan Pinrang
4.	Sulawesi Tenggara	10	Buton Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna Barat, dan Wakatobi
5.	Lampung	9	Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus

6.	Kalimantan Selatan	8	Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kota Banjarmasin, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Tapin
7.	Sumatera Selatan	8	Banyu Asin, Empat Lawang, Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, dan Penukal Abab Lematang Ilir
8.	Kalimantan Tengah	7	Barito Selatan, Barito Utara, Kapuas, Kota Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Seruyan
9.	Aceh	6	Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Timur, Bireuen, dan Simeulue
10.	Sulawesi Tengah	6	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali, Parigi Moutong, dan Poso
11.	Jawa Tengah	5	Blora, Grobogan, Kebumen, Kota Surakarta, dan Wonogiri
12.	Nusa Tenggara Barat	5	Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa
13.	Kalimantan Barat	4	Kayong Utara, Kota Singkawang, Landak, dan Mempawah
14.	Kalimantan Timur	4	Kota Bontang, Kutai Barat, Paser, dan Penajam Paser Utara

15.	Kep. Bangka Belitung	4	Bangka, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang
16.	Papua	4	Biak Numfor, Jayapura, Keerom, dan Sarmi
17.	Papua Tengah	4	Deiyai, Mimika, Nabire, dan Paniai
18.	Bali	3	Gianyar, Kota Denpasar, dan Tabanan
19.	Papua Selatan	3	Asmat, Mappi, dan Merauke
20.	Sulawesi Utara	3	Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan, dan Minahasa Utara
21.	Sumatera Barat	3	Kota Pariaman, Kota Solok, dan Padang Pariaman
22.	Banten	2	Lebak dan Serang
23.	Jawa Barat	2	Kota Tasikmalaya dan Sukabumi
24.	Jawa Timur	2	Sidoarjo dan Trenggalek
25.	Kep. Riau	2	Bintan dan Kep. Anambas
26.	Papua Barat	2	Manokwari dan Teluk Bintuni
27.	Papua Barat Daya	2	Raja Ampat dan Sorong
28.	Riau	2	Kampar dan Kota Dumai
29.	Bengkulu	1	Lebong
30.	Jambi	1	Sarolangun
31.	Maluku	1	Kota Tual
32.	Maluku Utara	1	Pulau Morotai
33.	Sulawesi Barat	1	Pasangkayu



- c. Terdapat 44 Kabupaten/Kota (9%) dari 23 Provinsi tidak memiliki logistik spesimen carrier Difteri di wilayahnya. Selain itu, terdapat 86 Kabupaten/Kota (17%) dari 27 Provinsi sudah memiliki logistik spesimen *carrier* Difteri di wilayahnya namun belum sesuai standar. Rincian 44 Kabupaten/Kota yang tidak memiliki logistik spesimen carrier Difteri adalah sebagai berikut:

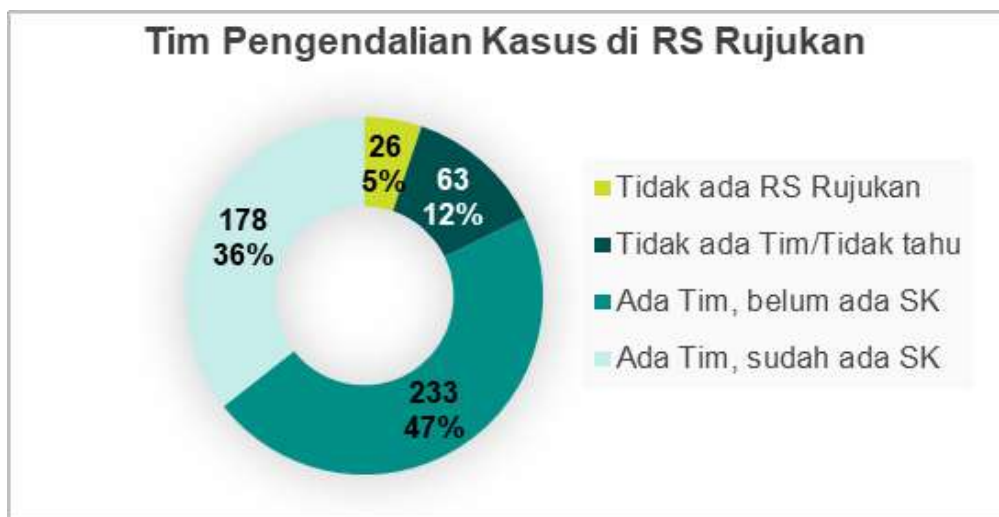
Tabel 23 Persebaran Kabupaten/Kota yang sudah memiliki logistik spesimen *carrier* Difteri di wilayahnya namun belum sesuai standar

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Sumatera Utara	5	Batubara, Kota Gunungsitoli, Nias Barat, Nias Selatan, dan Padang Lawas Utara
2	Papua Selatan	4	Asmat, Boven Digoel, Mappi, dan Merauke
3	Sulawesi Tenggara	4	Buton, Buton Utara, Konawe Selatan, dan Kota Bau-Bau
4	Bengkulu	3	Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, dan Seluma
5	Maluku Utara	3	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur
6	Sulawesi Tengah	3	Banggai, Buol, dan Tojo Una-Una

7	Jawa Barat	2	Cirebon dan Kota Cirebon
8	Kalimantan Selatan	2	Balangan dan Kotabaru
9	Lampung	2	Lampung Timur dan Tulang Bawang Barat
10	Nusa Tenggara Timur	2	Ende dan Malaka
11	Riau	2	Kampar dan Kuantan Singingi
12	Aceh	1	Aceh Tamiang
13	Gorontalo	1	Bone Bolango
14	Jambi	1	Merangin
15	Kalimantan Barat	1	Sekadau
16	Kalimantan Tengah	1	Gunung Mas
17	Kep. Bangka Belitung	1	Bangka Tengah
18	Kep. Riau	1	Kep. Anambas
19	Papua Barat	1	Manokwari Selatan
20	Sulawesi Barat	1	Mamasa
21	Sulawesi Utara	1	Kep. Talaud
22	Sumatera Barat	1	Kep. Mentawai
23	Sumatera Selatan	1	Musi Rawas Utara

3. Tatalaksana Kasus di Rumah Sakit

Dari 500 Kabupaten/Kota yang telah mengisi tool pemetaan risiko penyakit Difteri, terhadap subkategori **Tatalaksana Kasus di Rumah Sakit** diperoleh temuan sebagai berikut:

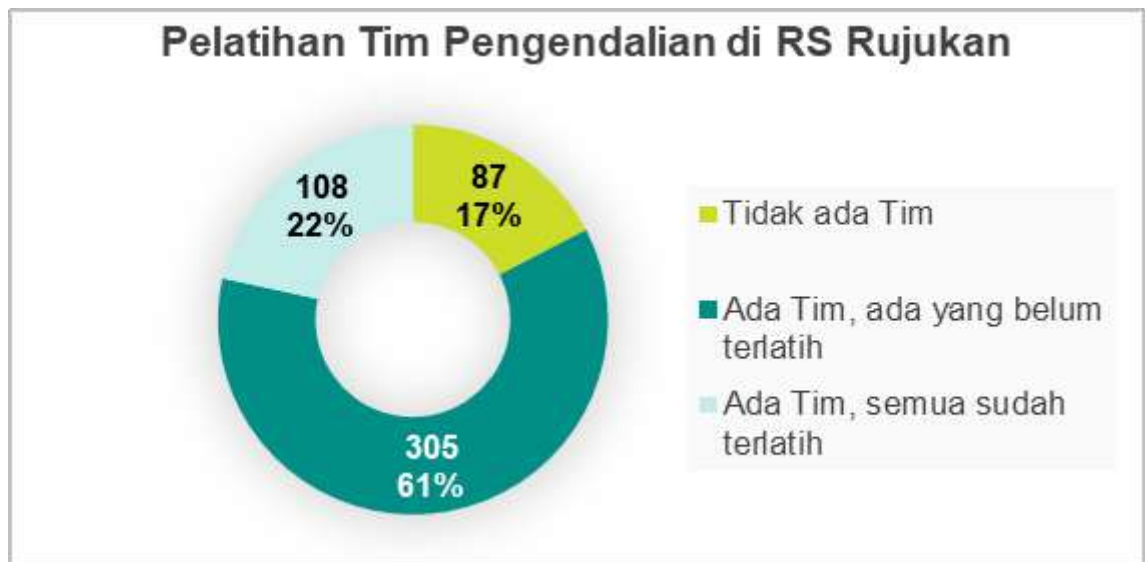


- a. Terdapat 26 Kabupaten/Kota (5%) dari 14 Provinsi yang menjawab tidak ada rumah sakit rujukan di wilayahnya. Selain itu, terdapat 63 Kabupaten/Kota (12%) dari 22 Provinsi yang tidak memiliki tim pengendalian kasus di rumah sakit rujukan. Terdapat 233 Kabupaten/Kota (47%) yang sudah memiliki tim pengendalian kasus di rumah sakit rujukan namun belum ada SK, yakni:

Tabel 24 Persebaran Kabupaten/Kota yang sudah memiliki tim penanggulangan kasus di RS Rujukan namun belum ada SK

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Sumatera Utara	19
2	Jawa Timur	16
3	Jawa Tengah	14
4	Jawa Barat	12
5	Nusa Tenggara Timur	11
6	Aceh	9
7	Sulawesi Selatan	9
8	Sulawesi Utara	9
9	Kalimantan Barat	8
10	Lampung	8
11	Sulawesi Tenggara	8
12	Sumatera Barat	8
13	Kalimantan Tengah	7
14	Kalimantan Selatan	6
15	Kep. Bangka Belitung	6
16	Kep. Riau	6
17	Maluku	6
18	Maluku Utara	6
19	Nusa Tenggara Barat	6
20	Bali	5
21	Papua Barat	5

22	Riau	5
23	Sulawesi Barat	5
24	Sulawesi Tengah	5
25	Sumatera Selatan	5
26	Gorontalo	4
27	Jambi	4
28	Papua	4
29	Bengkulu	3
30	Kalimantan Timur	3
31	Papua Barat Daya	3
32	Banten	2
33	DI Yogyakarta	2
34	DK Jakarta	1
35	Kalimantan Utara	1
36	Papua Selatan	1
37	Papua Tengah	1

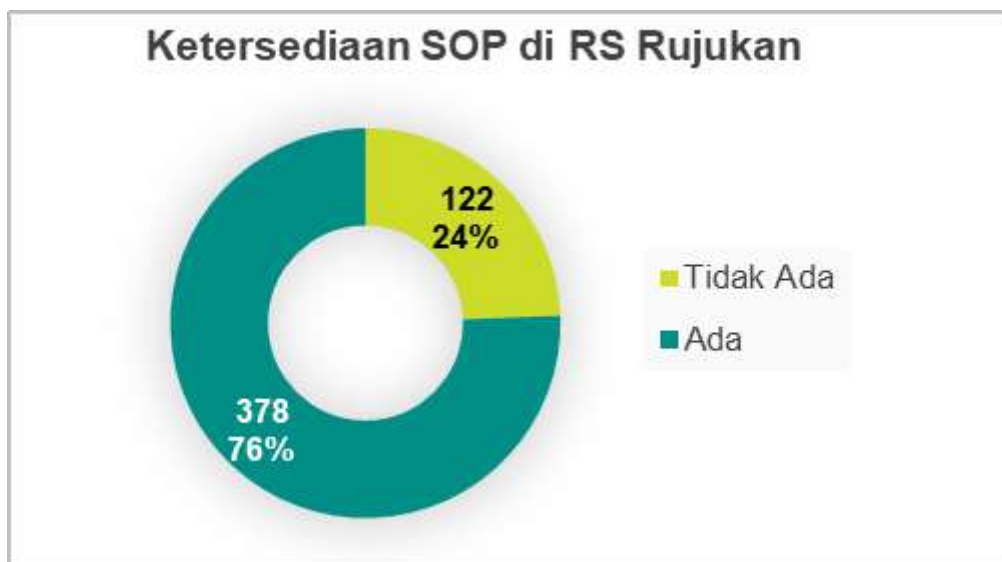


- b. Terdapat 87 Kabupaten/Kota (20%) dari 28 Provinsi menjawab tidak ada tim pengendalian kasus di rumah sakit rujukan. Selain itu, terdapat 305 Kabupaten/Kota (61%) dari 36 Provinsi yang menyatakan sudah ada tim pengendalian kasus di rumah sakit rujukan namun ada yang belum terlatih, yakni:

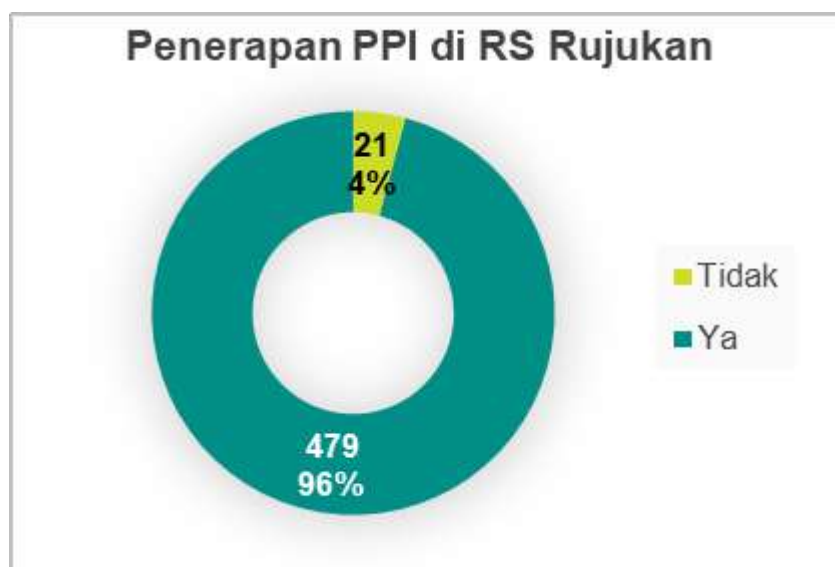
Tabel 25 Persebaran Kabupaten/Kota yang menyatakan sudah ada tim pengendalian kasus di RS Rujukan namun ada yang belum terlatih

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Jawa Timur	28
2	Sumatera Utara	22
3	Jawa Barat	17
4	Aceh	16

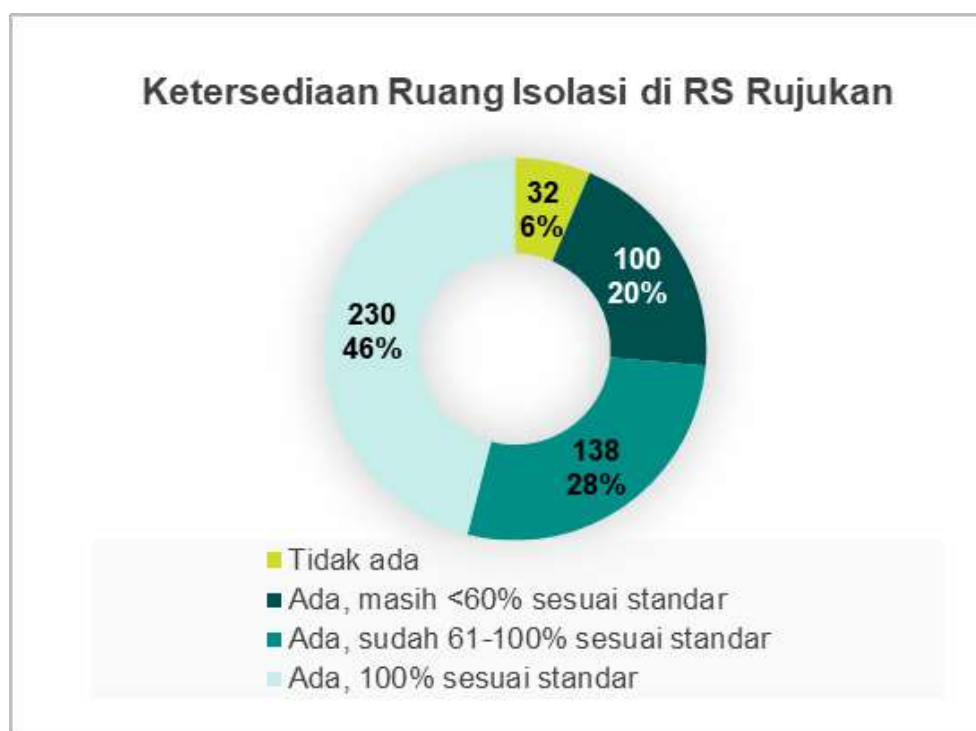
5	Jawa Tengah	16
6	Sulawesi Selatan	15
7	Nusa Tenggara Timur	13
8	Lampung	12
9	Sulawesi Tenggara	12
10	Riau	11
11	Kalimantan Barat	9
12	Sulawesi Tengah	9
13	Sulawesi Utara	9
14	Sumatera Selatan	9
15	Jambi	8
16	Bali	7
17	Kalimantan Tengah	7
18	Kep. Bangka Belitung	7
19	Nusa Tenggara Barat	7
20	Sumatera Barat	7
21	Banten	6
22	Kalimantan Timur	6
23	Kep. Riau	6
24	Maluku	6
25	Maluku Utara	6
26	Sulawesi Barat	6
27	Gorontalo	5
28	Kalimantan Selatan	5
29	Kalimantan Utara	5
30	Papua	3
31	Papua Barat	3
32	Papua Selatan	2
33	Papua Tengah	2
34	Bengkulu	1
35	DK Jakarta	1
36	Papua Barat Daya	1



- c. Terdapat 122 Kabupaten/Kota (24%) dari 32 Provinsi dengan rumah sakit rujukan tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) tatalaksana kasus dan pengelolaan spesimen.



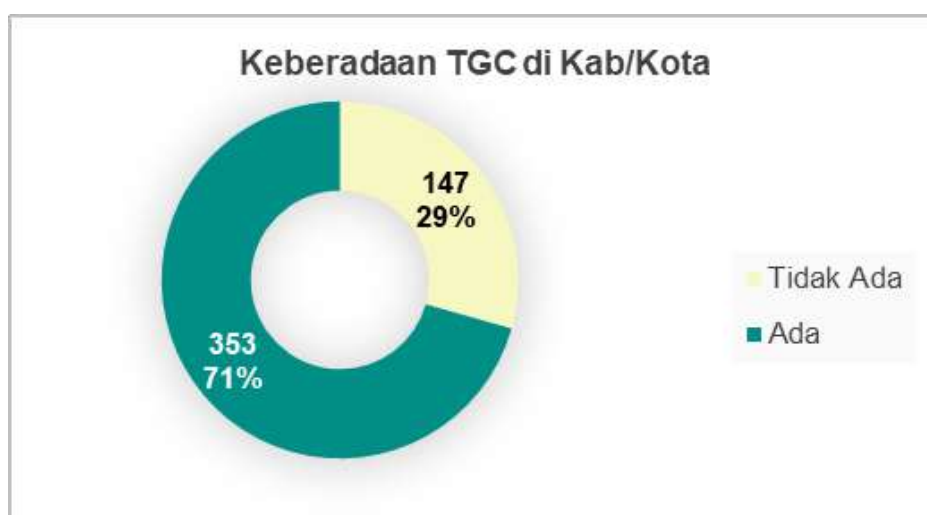
- d. Terdapat 21 Kabupaten/Kota (4%) dari 15 Provinsi yang belum menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di rumah sakit rujukan.



- e. Terdapat 32 Kabupaten/Kota (6%) dari 19 Provinsi yang menjawab tidak ada ruang isolasi di rumah sakit rujukan. Selain itu, 100 Kabupaten/Kota (20%) dari 32 Provinsi menyatakan sudah memiliki ruang isolasi di rumah sakit rujukan, namun masih <60% sesuai standar.

4. Penyelidikan Epidemiologi

Dari 500 Kabupaten/Kota yang telah mengisi tool pemetaan risiko penyakit Difteri, terhadap subkategori **Penyelidikan Epidemiologi** diperoleh temuan sebagai berikut:

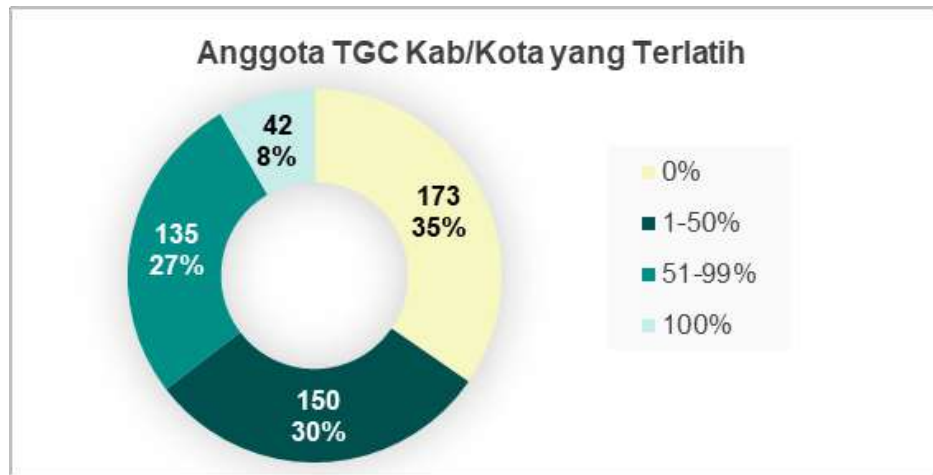


- a. Terdapat 147 Kabupaten/Kota (29%) dari 33 Provinsi yang belum memiliki Tim Gerak Cepat (TGC) dengan unsur anggota sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 (minimal 5 unsur yakni

epidemiolog/pengelola surveilans, entomolog/pengelola vektor, tenaga medis, analis laboratorium, dan sanitarian), yakni:

Tabel 26 Persebaran Kabupaten/Kota yang belum memiliki TGC sesuai ketentuan

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Sumatera Utara	25
2	Jawa Barat	11
3	Sulawesi Selatan	9
4	Jawa Timur	8
5	Aceh	6
6	Gorontalo	6
7	Sulawesi Tenggara	6
8	Sumatera Barat	6
9	Banten	5
10	Bengkulu	5
11	Kalimantan Barat	5
12	Papua	5
13	Sulawesi Barat	5
14	Sulawesi Utara	5
15	Kalimantan Tengah	4
16	Papua Tengah	4
17	Riau	4
18	Kalimantan Timur	3
19	Maluku	3
20	Papua Barat	3
21	Papua Selatan	3
22	Jawa Tengah	2
23	Kep. Bangka Belitung	2
24	Kep. Riau	2
25	Nusa Tenggara Timur	2
26	Bali	1
27	DI Yogyakarta	1
28	Jambi	1
29	Kalimantan Utara	1
30	Lampung	1
31	Maluku Utara	1
32	Sulawesi Tengah	1
33	Sumatera Selatan	1

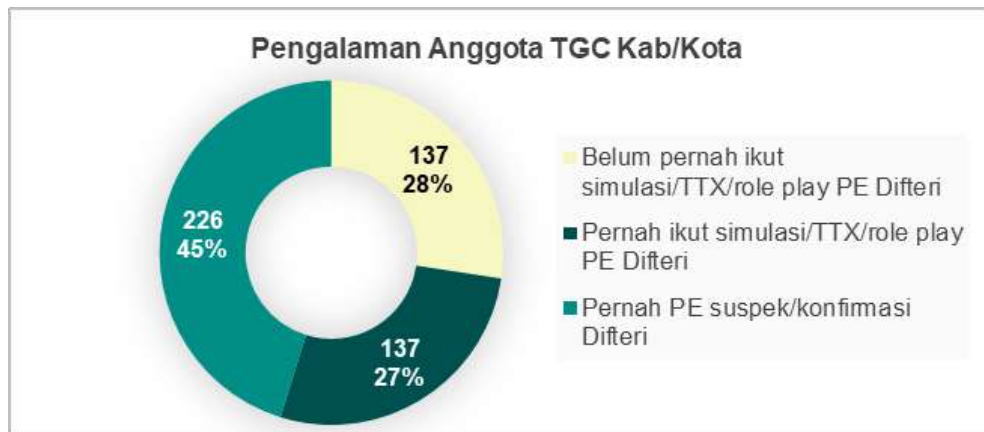


- b. Terdapat 173 Kabupaten/Kota (35%) dari 35 Provinsi dimana anggota TGC belum ada yang terlatih dan bersertifikat, yakni:

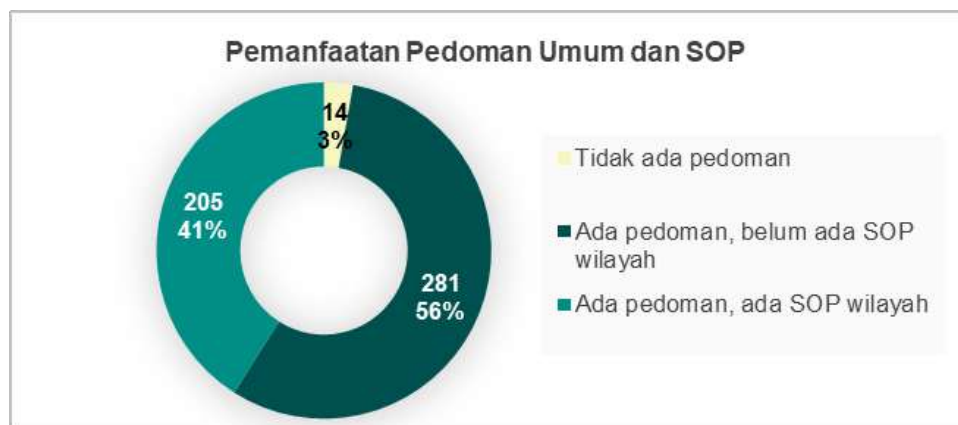
Tabel 27 Persebaran Kabupaten/Kota dengan anggota TGC belum ada yang terlatih dan bersertifikat

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Sumatera Utara	25
2	Jawa Barat	12
3	Jawa Timur	12
4	Sulawesi Selatan	10
5	Sumatera Barat	8
6	Sulawesi Tenggara	7
7	Bengkulu	6
8	Gorontalo	6
9	Banten	5
10	Papua	5
11	Papua Tengah	5
12	Riau	5
13	Sulawesi Barat	5
14	Sulawesi Utara	5
15	Aceh	4
16	Kalimantan Barat	4
17	Kalimantan Tengah	4
18	Kalimantan Timur	4
19	Maluku Utara	4
20	Papua Selatan	4
21	Sumatera Selatan	4
22	Jawa Tengah	3
23	Maluku	3
24	Nusa Tenggara Timur	3
25	Papua Barat	3
26	Sulawesi Tengah	3

27	Jambi	2
28	Kep. Bangka Belitung	2
29	Kep. Riau	2
30	Lampung	2
31	Papua Barat Daya	2
32	Bali	1
33	DI Yogyakarta	1
34	Kalimantan Utara	1
35	Nusa Tenggara Barat	1



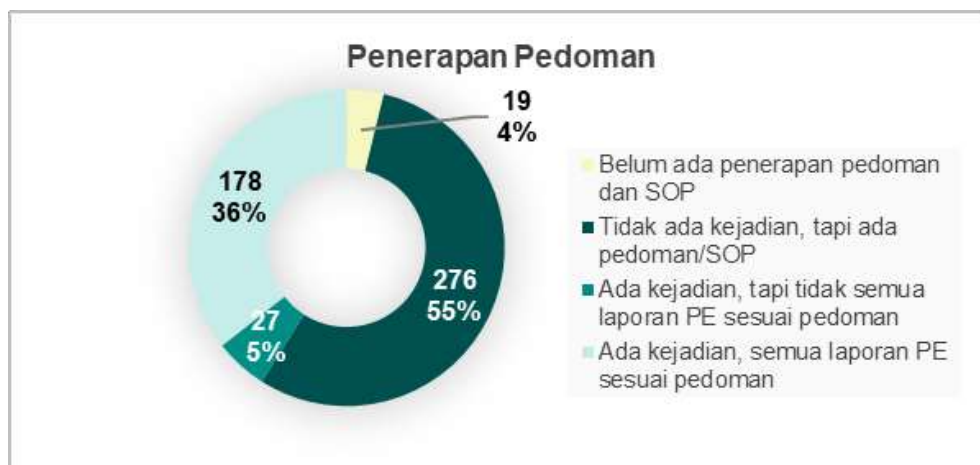
- c. Terdapat 137 Kabupaten/Kota (28%) dari 33 Provinsi yang belum pernah mengikuti simulasi/*tabletop exercise* (TTX)/*role play* penyelidikan epidemiologi Difteri.



- d. Terdapat 14 Kabupaten/Kota (3%) dari 11 Provinsi yang menjawab tidak memiliki pedoman difteri. Selain itu, terdapat 281 Kabupaten/Kota (56%) dari 35 Provinsi yang sudah memiliki pedoman umum namun belum melengkapi dengan prosedur operasional standar (POS), yakni:

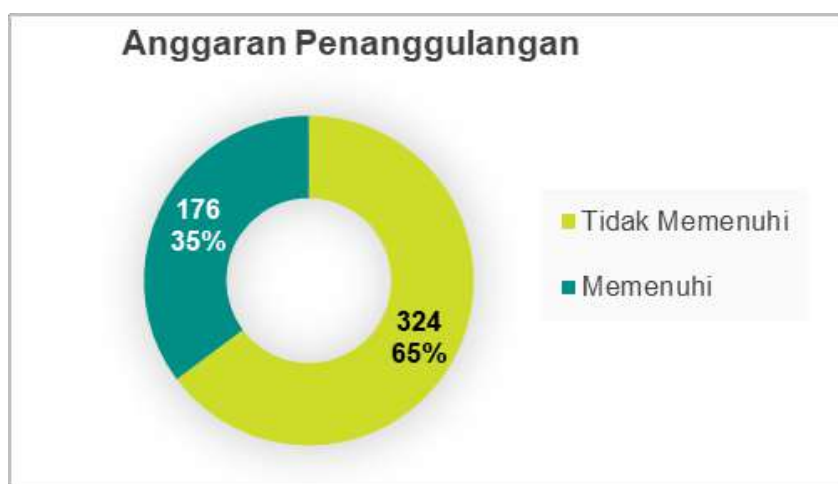
Tabel 28 Persebaran Kabupaten/Kota yang sudah memiliki pedoman umum namun belum melengkapi dengan POS

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Sumatera Utara	21
2	Sulawesi Selatan	18
3	Jawa Tengah	17
4	Jawa Timur	16
5	Nusa Tenggara Timur	16
6	Sulawesi Tenggara	14
7	Aceh	12
8	Sulawesi Utara	11
9	Maluku	10
10	Sulawesi Tengah	10
11	Sumatera Selatan	10
12	Sumatera Barat	9
13	Bengkulu	8
14	Jawa Barat	8
15	Kalimantan Barat	8
16	Kalimantan Tengah	8
17	Riau	8
18	Kep. Bangka Belitung	7
19	Gorontalo	6
20	Kalimantan Timur	6
21	Kep. Riau	6
22	Maluku Utara	6
23	Sulawesi Barat	6
24	Jambi	5
25	Papua	5
26	DI Yogyakarta	4
27	Kalimantan Selatan	4
28	Lampung	4
29	Papua Barat	4
30	Bali	3
31	Papua Barat Daya	3
32	Papua Tengah	3
33	Nusa Tenggara Barat	2
34	Papua Selatan	2
35	Kalimantan Utara	1



- e. Terdapat 19 Kabupaten/Kota (4%) dari 14 Provinsi yang menyatakan belum ada pedoman/SOP difteri. Selain itu, terdapat 27 Kabupaten/Kota (5%) dari 18 Provinsi yang sudah menemukan difteri, namun tidak semua laporan penyelidikan epidemiologi dibuat sesuai pedoman.

5. Anggaran Penanggulangan



Dari 500 Kabupaten/Kota yang telah mengisi tool pemetaan risiko penyakit Difteri, terhadap subkategori **Anggaran Penanggulangan** diperoleh temuan, yakni terdapat 324 Kabupaten/Kota (65%) dari 37 Provinsi yang memiliki anggaran penanggulangannya tidak memenuhi kebutuhan untuk memperkuat kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan difteri, yakni:

Tabel 29 Persebaran Kabupaten/Kota dengan anggaran penanggulangannya tidak memenuhi kebutuhan untuk memperkuat kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan difteri

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Jawa Tengah	26
2	Sumatera Utara	24
3	Jawa Timur	20
4	Sulawesi Selatan	20
5	Jawa Barat	19

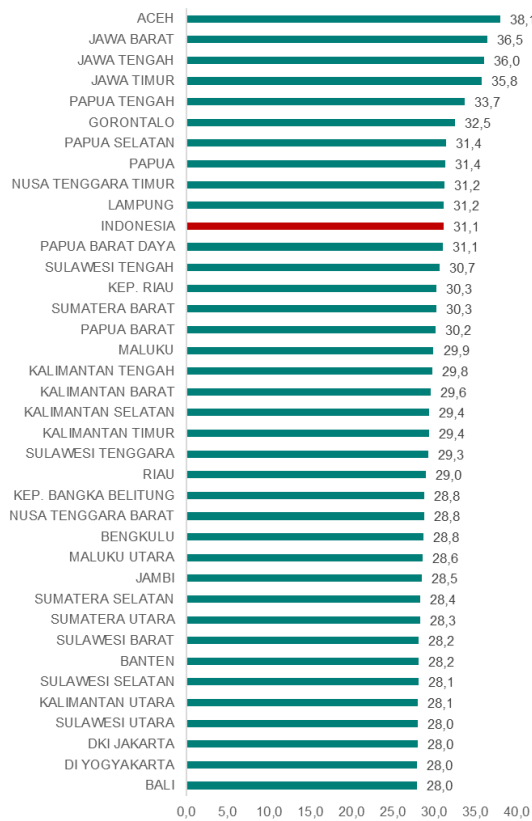
6	Aceh	15
7	Sulawesi Tenggara	15
8	Nusa Tenggara Timur	14
9	Sumatera Barat	13
10	Kalimantan Barat	12
11	Sulawesi Utara	11
12	Sulawesi Tengah	10
13	Lampung	9
14	Bengkulu	8
15	Nusa Tenggara Barat	8
16	Riau	8
17	Jambi	7
18	Kalimantan Selatan	7
19	Sumatera Selatan	7
20	Kalimantan Tengah	6
21	Maluku	6
22	Banten	5
23	DK Jakarta	5
24	Gorontalo	5
25	Kalimantan Timur	5
26	Kep. Riau	5
27	Papua	5
28	Papua Barat	4
29	Papua Tengah	4
30	Sulawesi Barat	4
31	DI Yogyakarta	3
32	Kep. Bangka Belitung	3
33	Papua Barat Daya	3
34	Papua Selatan	3
35	Bali	2
36	Kalimantan Utara	2
37	Maluku Utara	1

3. Gambaran Pemetaan Risiko Polio

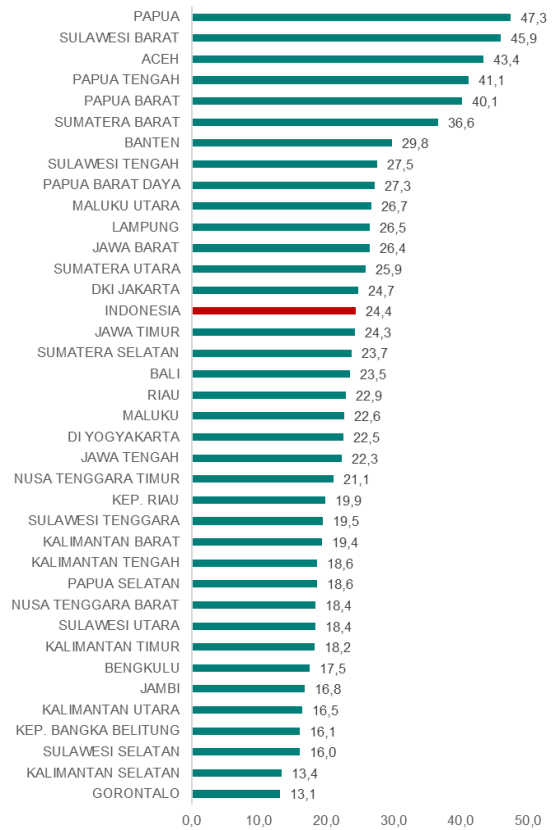
a. Nilai Hasil Ancaman, Kerentanan, dan Kapasitas Pemetaan Penyakit Polio di Indonesia Tahun 2024

Pada tahun 2024, terdapat 498 kabupaten/kota yang telah melakukan pemetaan risiko untuk polio. Berdasarkan penghitungan indeks pada setiap pertanyaan di subkategori, persebaran indeks ancaman, kerentanan, dan kapasitas pemetaan penyakit polio pada tahun 2024 ialah sebagai berikut:

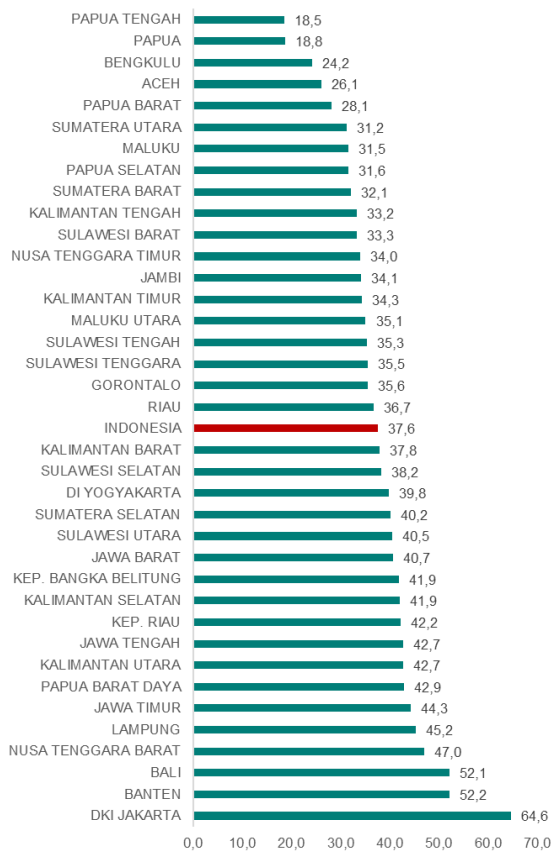
Persebaran Nilai Indeks Ancaman Polio di Indonesia Tahun 2024



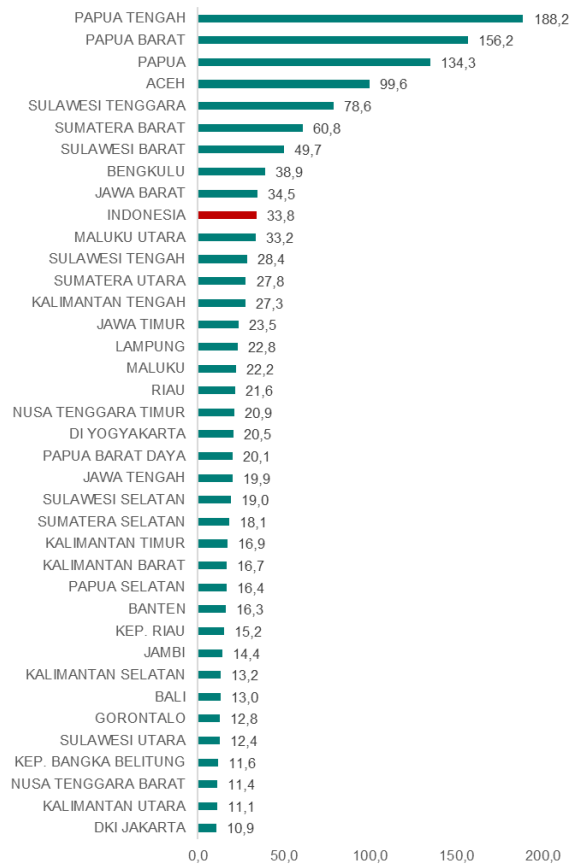
Persebaran Nilai Indeks Kerentanan Polio di Indonesia Tahun 2024



Persebaran Nilai Indeks Kapasitas Polio di Indonesia Tahun 2024



Persebaran Nilai Risiko Polio di Indonesia Tahun 2024



Berdasarkan ilustrasi di atas, **rerata nilai indeks ancaman di Indonesia adalah 31,1** serta Provinsi dengan nilai indeks ancaman Polio tertinggi adalah Provinsi Aceh. Terdapat 10 provinsi yang memiliki nilai indeks ancaman yang lebih tinggi daripada rerata Indonesia.

Untuk kategori kerentanan, **rerata nilai indeks kerentanan di Indonesia ialah sebesar 24,4** dengan Provinsi yang memiliki nilai indeks kerentanan polio tertinggi adalah Provinsi Papua. Terdapat 14 provinsi yang memiliki nilai rerata indeks kerentanan lebih tinggi dari rerata indeks kerentanan Indonesia.

Untuk kategori kapasitas, **rerata nilai indeks kapasitas di Indonesia sebesar 37,6** serta Provinsi dengan nilai indeks kapasitas polio terendah adalah Papua Tengah. Jumlah provinsi dengan nilai indeks kapasitas yang lebih rendah dari Indonesia sebanyak 19 provinsi.

Terakhir, **rerata nilai risiko polio di Indonesia sebesar 33,8**, dan provinsi dengan nilai risiko Polio tertinggi adalah Papua Tengah. Terdapat 9 provinsi dengan rerata nilai risiko polio lebih tinggi dibandingkan dari rerata Indonesia, yaitu Papua Tengah, Papua Barat, Papua, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Bengkulu, dan Jawa Barat.

b. Analisis Kategori Dominan pada Kategori Ancaman

No	SUBKATEGORI	BOBOT	ACEH	BALI	BANTEN	BENGLURU	DI.YOGYAKARTA	DI.YAKARTA	GORONTALO	JABAR	JAWA BARAT	JAWA TIMUR	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	KEP. BANGKA	KEP. BANGKA SELATAN	LAMPUNG	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT	PAPUA BARAT DAYA	PAPUA SELATAN	PAPUA TENGAH	RABU	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	SUMATERA BARAT	SUMATERA SELATAN	SUMATERA UTARA	DOMINASI	%									
1	Karakteristik Penyakit (literatur/im ahli)	13.55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	TINGGI	97.4						
2	Pengobatan (literatur/im ahli)	1.91	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	TINGGI	97.4					
3	Metode Penanggulangan Penularan Penyakit (literatur/im ahli)	10.50	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SEDANG	97.4			
4	Pencegahan Penularan Penyakit Perorangan (literatur/im ahli)	13.16	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SEDANG	97.4			
5	Pencegahan Penularan Penyakit di Masyarakat (literatur/im ahli)	13.95	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SEDANG	97.4			
6	Risiko importasi deklaras PHEIC - WHO (literatur/im ahli)	8.47	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	TINGGI	97.4			
7	Risiko importasi POLIO di wilayah Indonesia	8.47	T	S	S	S	S	S	S	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SEDANG	86.8		
8	Risiko penularan setempat	8.71	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SEDANG	97.4		
9	Dampak wilayah (periode KLB)	6.01	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SEDANG	94.7		
10	Dampak ekonomi saat terjadi keadaan KLB	6.61	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	SEDANG	84.2	
11	Dampak ekonomi saat tidak terjadi KLB (AFP)	5.22	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	SEDANG	94.7
12	Perhatian media	3.24	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SEDANG	89.5

Dari 12 (dua belas) subkategori Ancaman, terdapat 3 subkategori dengan dominasi **TINGGI** yaitu Karakteristik penyakit, pengobatan, dan risiko importasi deklaras PHEIC-WHO. Selain itu, terdapat 4 subkategori dengan dominasi **SEDANG** yaitu Metode penanggulangan penularan penyakit, pencegahan penularan penyakit di masyarakat, risiko importasi Polio di wilayah Indonesia, dan dampak wilayah (periode KLB).

c. Analisis Kategori Dominan dan Analisis per Subkategori pada Kategori Kerentanan

No	SUBKATEGORI	BOBOT	ACEH	BALI	BANTEN	BENGLURU	DI.YOGYAKARTA	DI.YAKARTA	GORONTALO	JABAR	JAWA BARAT	JAWA TIMUR	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	KEP. BANGKA	KEP. BANGKA SELATAN	LAMPUNG	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT	PAPUA BARAT DAYA	PAPUA SELATAN	PAPUA TENGAH	RABU	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	SUMATERA BARAT	SUMATERA SELATAN	SUMATERA UTARA	DOMINASI	%											
1	Kepadatan Penduduk	13.64	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	TINGGI	55.3	
2	% cakupan imunisasi polio 4	27.96	T	R	A	R	A	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	SEDANG	34.2	
3	% perilaku sehat (CTPS, SAMIK, SBABS)	31.10	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SEDANG	68.4
4	% sarana air minum layak diperiksa dan tidak memenuhi syarat	20.74	S	S	S	A	A	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	SEDANG	89.5
5	Transportasi Antar Kab/Kota/Provinsi	6.53	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	TINGGI	97.4

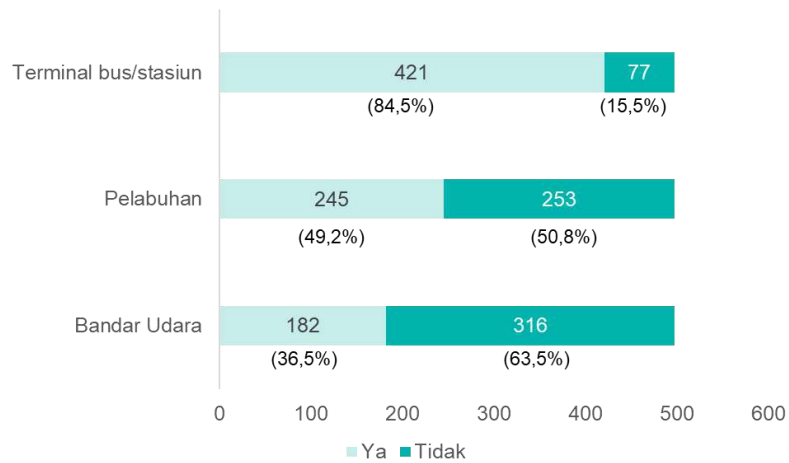
Dari 4 (empat) subkategori Kerentanan, terdapat satu (1) subkategori dengan dominasi **TINGGI** yaitu transportasi antar kabupaten/kota/provinsi. Selain itu, terdapat dua (2) subkategori dengan dominasi **SEDANG** yaitu persentase perilaku sehat (cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, penerapan stop buang air besar sembarangan) dan persentase sarana air minum tidak diperiksa dan tidak memenuhi syarat.

ANALISIS PER SUBKATEGORI DENGAN DOMINASI TINGGI

1. Transportasi antar Kab/Kota/Provinsi

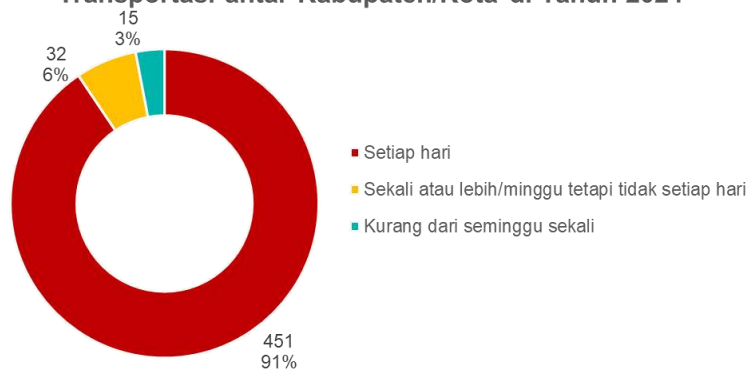
Dari 498 Kabupaten/Kota yang telah mengisi tool pemetaan risiko penyakit Polio, terhadap subkategori **Transportasi antar Kab/Kota/Provinsi** diperoleh temuan sebagai berikut:

Persebaran Jumlah Kab/Kota Berdasarkan Keberadaan Terminal/stasiun, Pelabuhan, dan Bandar Udara di Tahun 2024



Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penularan Polio adalah mobilitas penduduk antar wilayah. Untuk menilai kerentanan dalam mobilitas penduduk, dapat dilihat dari keberadaan terminal/stasiun/pelabuhan/bandara dan frekuensi transportasi antar kabupaten/kota. Gambaran persebaran kabupaten/kota berdasarkan keberadaan terminal/stasiun/pelabuhan/bandara dan frekuensi transportasi antar kabupaten/kota dapat dilihat pada grafik di atas. Dari 498 Kabupaten/Kota yang telah mengisi *tools* pemetaan risiko Polio, terhadap subkategori transportasi antar kabupaten/kota/provinsi, sebagian besar (84,5%) atau sebanyak 421 kabupaten/kota memiliki terminal bus/stasiun, sebagian (49,2%) atau sebanyak 245 kabupaten/kota terdapat pelabuhan, dan hanya sebagian kecil (36,5%) yang memiliki bandar udara.

Proporsi Jumlah Kab/Kota berdasarkan Frekuensi Transportasi antar Kabupaten/Kota di Tahun 2024



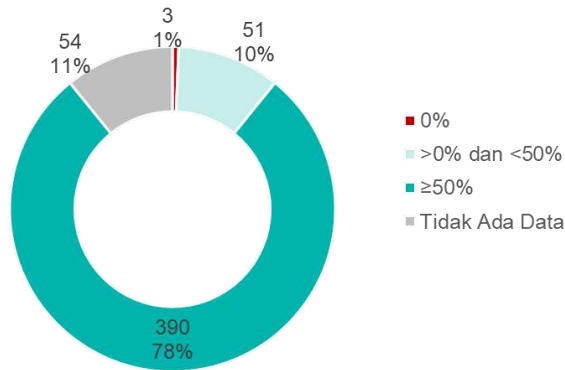
Berdasarkan frekuensi transportasi antar kabupaten/kota, mayoritas (91%) atau 451 kabupaten/kota memiliki frekuensi transportasi antar kabupaten/kota setiap hari. Sedangkan sebagian lainnya memiliki frekuensi sekali/lebih dari 1 kali seminggu namun tidak setiap hari (6%), dan kurang dari 1 minggu sekali (3%).

ANALISIS PER SUBKATEGORI DENGAN DOMINASI SEDANG

1. %Perilaku Sehat (CTPS, PAMM-RT, SBABS)

Dari 498 Kabupaten/Kota yang telah mengisi *tool* pemetaan risiko penyakit Polio, terhadap subkategori **%Perilaku Sehat (CTPS, PAMM-RT, SBABS)** diperoleh temuan sebagai berikut:

Persebaran Kab/Kota Berdasarkan Cakupan CTPS



Kerentanan masyarakat terhadap Polio dapat dipengaruhi oleh cakupan perilaku bersih dan sehat yang dicapai dengan pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Pilar STBM yang digunakan untuk menilai risiko Polio di Kabupaten/Kota yaitu cakupan cuci tangan pakai sabun (CTPS), pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga (PAMM-RT), dan stop buang air besar sembarangan (SBABS). Dari 498 kabupaten/kota yang melakukan penilaian risiko polio, sebagian besar (78%) atau sebanyak 390 kabupaten/kota memiliki cakupan CTPS lebih dari 50%. Namun masih ada 3 kabupaten (1%) yang cakupan CTPS 0%, 51 kabupaten/kota (10%) dengan cakupan kurang dari 50%, dan 54 kabupaten/kota (11%) yang tidak mengetahui capaiannya. Sehingga masih ada 108 kabupaten/kota dari 32 Provinsi yang tidak tercapai cakupannya. Berikut adalah persebaran 108 kabupaten/kota yang tidak tercapai cakupan CTPS per provinsi:

Tabel 30 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak tercapai cakupan CTPS

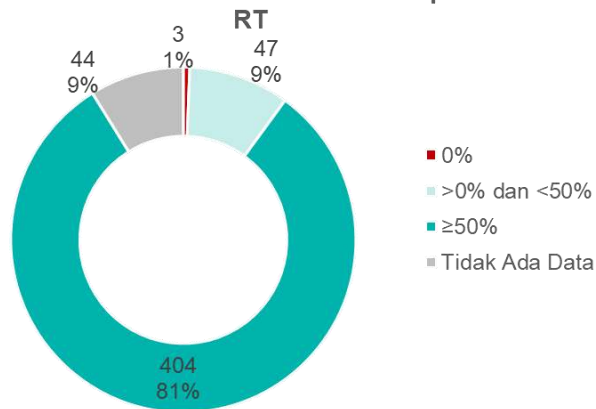
No	Provinsi Kab/Kota	Jumlah	Nama Kab/Kota
1	Aceh	11	Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Kota Lhokseumawe, Nagan Raya, dan Pidie

2	Nusa Tenggara Timur	11	Ende, Kupang, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Rote Ndao, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara
3	Kalimantan Barat	7	Kapuas Hulu, Kayong Utara, Landak, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang
4	Sumatera Barat	6	Dharmasraya, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Lima Puluh Kota, Sijunjung, dan Solok Selatan
5	Sumatera Utara	6	Batu Bara, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Nias Barat, Padang Lawas, dan Samosir
6	Kalimantan Tengah	5	Kapuas, Kota Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Lamandau, dan Sukamara
7	Lampung	5	Lampung Barat, Lampung Utara, Pesawaran, Tanggamus, dan Way Kanan
8	Maluku Utara	5	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Utara, dan Pulau Taliabu
9	Papua	5	Biak Numfor, Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya, dan Supiori
10	Papua Barat	5	Fakfak, Kaimana, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Teluk Bintuni
11	Sulawesi Barat	5	Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar
12	Jambi	3	Bungo, Merangin, dan Tebo

13	Kalimantan Timur	3	Kota Balikpapan, Mahakam Hulu, dan Penajam Paser Utara
14	Maluku	3	Buru, Kepulauan Aru, dan Maluku Tengah
15	Papua Selatan	3	Boven Digoel, Mappi, dan Merauke
16	Papua Tengah	3	Deiyai, Mimika, dan Nabire
17	Bengkulu	2	Bengkulu Utara, dan Seluma
18	Jawa Barat	2	Indramayu dan Tasikmalaya
19	Jawa Timur	2	Kediri dan Kota Batu
20	Kalimantan Utara	2	Kota Tarakan dan Nunukan
21	Riau	2	Kuantan Singingi dan Pelalawan
22	Sulawesi Tengah	2	Kota Palu dan Poso
23	DI Yogyakarta	1	Gunung Kidul
24	DK Jakarta	1	Kepulauan Seribu
25	Gorontalo	1	Gorontalo
26	Jawa Tengah	1	Pekalongan
27	Kep. Riau	1	Kota Tanjung Pinang
28	Nusa Tenggara Barat	1	Kota Bima
29	Papua Barat Daya	1	Sorong
30	Sulawesi Selatan	1	Sinjai
31	Sulawesi Tenggara	1	Konawe

32	Sumatera Selatan	1	Kota Palembang
----	------------------	---	----------------

Persebaran Kab/Kota Berdasarkan Cakupan PAMM-RT



Di pilar PAMM-RT, sebagian besar (81%) atau 404 kabupaten/kota memiliki cakupan PAMM-RT lebih dari 50%. Namun masih ada 3 kabupaten (1%) dengan cakupan 0%, 47 kabupaten/kota (9%) dengan cakupan kurang dari 50%, dan 44 kabupaten/kota (9%) yang tidak mengetahui capaiannya. Sehingga masih ada 94 kabupaten/kota dari 28 Provinsi yang tidak tercapai cakupannya. Berikut adalah persebaran 94 kabupaten/kota yang tidak tercapai cakupan PAMM-RT per provinsi:

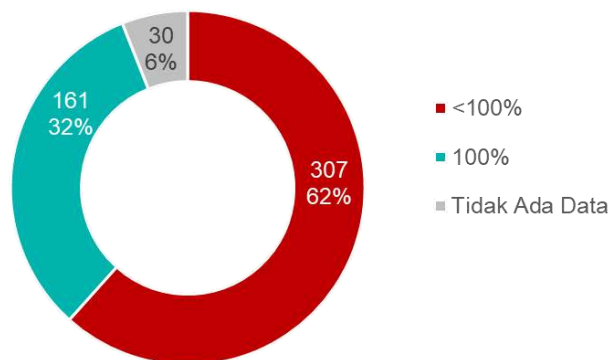
Tabel 31 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak tercapai cakupan PAMM-RT

No	Provinsi Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Aceh	7	Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Lues, Nagan Raya, dan Pidie
2	Kalimantan Barat	7	Kapuas Hulu, Kayong Utara, Melawi, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang
3	Nusa Tenggara Timur	6	Kota Kupang, Kupang, Rote Ndao, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah

4	Jawa Barat	5	Bandung, Cianjur, Indramayu, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya
5	Papua	5	Biak Numfor, Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya, dan Supiori
6	Papua Barat	5	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak
7	Sulawesi Tenggara	5	Buton Selatan, Buton Utara, Konawe, Konawe Selatan, dan Muna
8	Sumatera Utara	5	Batu Bara, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, dan Nias Utara
9	Kalimantan Tengah	4	Kota Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Lamandau, dan Sukamara
10	Maluku	4	Buru, Kota Tual, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara
11	Papua Tengah	4	Deiyai, Dogiyai, Mimika, dan Nabire
12	Sulawesi Barat	4	Mamasa, Mamuju, Pasangkayu, dan Polewali Mandar
13	Sulawesi Tengah	4	Buol, Kota Palu, Morowali Utara, dan Poso
14	Jambi	3	Bungo, Merangin, dan Tebo
15	Maluku Utara	3	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Pulau Taliabu
16	Sumatera Barat	3	Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, dan Pasaman
17	Banten	2	Kota Serang dan Serang

18	Jawa Timur	2	Kediri dan Kota Batu
19	Lampung	2	Lampung Utara dan Tanggamus
20	Papua Barat Daya	2	Sorong dan Sorong Selatan
21	Papua Selatan	2	Asmat dan Mappi
22	Riau	2	Kuantan Singingi dan Rokan Hilir
23	Sulawesi Utara	2	Kepulauan Sangihe dan Minahasa Utara
24	Sumatera Selatan	2	Ogan Komering Ulu Selatan dan Penukal Abab Lematang Ilir
25	Bengkulu	1	Seluma
26	Kalimantan Utara	1	Kota Tarakan
27	Kep. Bangka Belitung	1	Bangka Tengah
28	Kep. Riau	1	Kota Tanjung Pinang

Persebaran Kab/Kota Berdasarkan Cakupan Stop BABS



Di pilar Stop BABS, sebagian besar (62%) atau 307 kabupaten/kota memiliki cakupan stop BABS kurang dari 100% atau belum mencapai status *open*

defecation free. Sebanyak 161 kabupaten/kota (32%) sudah memiliki cakupan 100%. Adapun masih terdapat 30 kabupaten/kota (6%) yang tidak mengetahui cakupan stop BABS. Sehingga masih ada 337 kabupaten/kota dari 37 Provinsi yang tidak tercapai cakupannya. Berikut adalah persebaran 337 kabupaten/kota yang tidak tercapai cakupan stop BABS per provinsi:

Tabel 32 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak tercapai cakupan stop BABS

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Kabupaten/Kota
1	Sumatera Utara	29	Asahan, Batu Bara, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba
2	Aceh	20	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Kota Langsa, Kota Subulussalam, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulue
3	Nusa Tenggara Timur	17	Alor, Ende, Kupang, Lembata, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba

			Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara
4	Jawa Barat	16	Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Indramayu, Karawang, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Sumedang, dan Tasikmalaya
5	Jawa Timur	15	Bangkalan, Blitar, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Malang, Ngawi, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep
6	Kalimantan Barat	14	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang
7	Kalimantan Tengah	14	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kota Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, dan Sukamara
8	Sumatera Selatan	14	Banyu Asin, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Komering Ulu Timur
9	Sulawesi Tengah	13	Banggai, Banggai

			Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Kota Palu, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, dan Toli-Toli
10	Sulawesi Tenggara	12	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Muna, dan Muna Barat
11	Kalimantan Selatan	11	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarmasin, Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tapin
12	Maluku	11	Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kota Ambon, Kota Tual, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur
13	Riau	11	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Siak
14	Sumatera Barat	11	Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Kota Sawah Lunto, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, dan Tanah Datar
15	Maluku Utara	10	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan

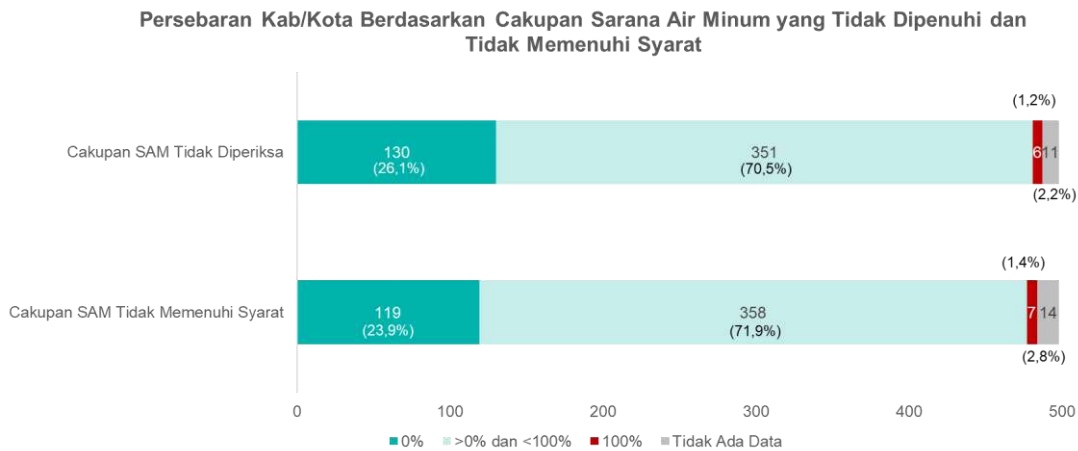
			Sula, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu
16	Bengkulu	9	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko, Rejang Lebong, dan Seluma
17	Kalimantan Timur	9	Berau, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, dan Penajam Paser Utara
18	Sulawesi Utara	9	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Siau Tagulandang Biaro
19	Jambi	8	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo
20	Bali	7	Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, dan Tabanan
21	Kep. Riau	7	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Lingga, dan Natuna
22	Papua Barat	7	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama
23	DK Jakarta	6	Kepulauan Seribu, Kota

			Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, dan Kota Jakarta Utara
24	Gorontalo	6	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, dan Pohuwato
25	Lampung	6	Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Tanggamus
26	Sulawesi Barat	6	Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar
27	Banten	5	Kota Serang, Lebak, Pandeglang, Serang, dan Tangerang
28	Kalimantan Utara	5	Bulungan, Kota Tarakan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung
29	Kep. Bangka Belitung	5	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, dan Kota Pangkal Pinang
30	Papua Tengah	5	Deiyai, Dogiyai, Mimika, Nabire, dan Paniai
31	Papua	4	Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya, dan Supiori
32	Papua Barat Daya	4	Kota Sorong, Raja Ampat, Sorong, dan Sorong Selatan
33	Papua Selatan	4	Asmat, Boven Digoel, Mappi, dan Merauke
34	Jawa Tengah	2	Banjarnegara dan Brebes
35	Nusa Tenggara Barat	2	Kota Bima dan Lombok Tengah

36	Sulawesi Selatan	2	Kota Makassar dan Luwu Timur
37	DI Yogyakarta	1	Kulon Progo

2. %Sarana Air Minum (SAM) Tidak Diperiksa dan Tidak Memenuhi Syarat

Dari 498 Kabupaten/Kota yang telah mengisi *tool* pemetaan risiko penyakit Polio, terhadap subkategori **%Sarana Air Minum (SAM) Tidak Diperiksa dan Tidak Memenuhi Syarat** diperoleh temuan sebagai berikut:



Pengawasan SAM merupakan jaminan untuk seluruh masyarakat untuk mendapatkan akses air minum aman untuk mencegah penularan penyakit yang ditularkan melalui *fecal-oral*, salah satunya Polio. Target pengawasan SAM adalah semua SAM di kabupaten/kota harus diperiksa. Berdasarkan status pemeriksaan SAM, terdapat 130 kabupaten/kota (26,1%) sudah memiliki capaian SAM diperiksa 100%. Sebagian besar (70,5%) atau 351 kabupaten/kota masih terdapat SAM yang tidak diperiksa. Selain itu juga terdapat sebagian kecil (1,2%) atau 5 kabupaten/kota yang SAM tidak diperiksa seluruhnya dan 2,2% atau 11 kabupaten/kota yang tidak mengetahui data cakupannya. Sehingga masih ada 368 kabupaten/kota dari 37 Provinsi yang tidak tercapai cakupannya. Berikut adalah persebaran 368 kabupaten/kota yang tidak tercapai cakupan SAM diperiksanya per provinsi:

Tabel 33 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak tercapai cakupan SAM diperiksa

No	Provinsi Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Jawa Tengah	25	Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Cilacap, Demak, Grobogan, Karanganyar, Kendal, Klaten, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, dan Wonosobo
2	Sulawesi Selatan	23	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Luwu, Luwu Timur, Maros, Pangkajene Dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Wajo

3	Jawa Timur	22	Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Gresik, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tulungagung
4	Jawa Barat	20	Bandung, Bandung Barat, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Karawang, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya
5	Aceh	19	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam, Nagan Raya, dan Pidie

6	Sumatera Utara	19	Asahan, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Tengah, dan Toba
7	Nusa Tenggara Timur	18	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kota Kupang, Kupang, Malaka, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Timor Tengah Selatan
8	Sumatera Selatan	16	Banyu Asin, Empat Lawang, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, dan Penukal Abab Lematang Ilir

9	Sulawesi Utara	14	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado, Kota Tomohon, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, dan Siau Tagulandang Biaro
10	Sumatera Barat	14	Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawah Lunto, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, dan Tanah Datar
11	Sulawesi Tenggara	13	Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kota Kendari, Muna, dan Wakatobi
12	Kalimantan Tengah	12	Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kota Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Pulang Pisau, Seruyan, dan Sukamara
13	Sulawesi Tengah	12	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Donggala, Kota Palu, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso,

			Sigi, Tojo Una-Una, dan Toli-Toli
14	Kalimantan Barat	10	Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kota Singkawang, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, dan Sekadau
15	Kalimantan Selatan	10	Balangan, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarmasin, Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tapin
16	Lampung	10	Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus, dan Tulangbawang
17	Maluku	9	Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kota Ambon, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur
18	Jambi	8	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo
19	Riau	8	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hilir, dan Siak

20	Banten	7	Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Lebak, Pandeglang, Serang, dan Tangerang
21	Maluku Utara	7	Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Pulau Taliabu
22	Nusa Tenggara Barat	7	Dompu, Kota Bima, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat
23	Kalimantan Timur	6	Berau, Kota Samarinda, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Paser
24	Kep. Bangka Belitung	6	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, dan Belitung Timur
25	Papua	6	Biak Numfor, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura, Mamberamo Raya, dan Supiori
26	Sulawesi Barat	6	Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar
27	Bengkulu	5	Bengkulu Tengah, Lebong, Mukomuko, Rejang Lebong, dan Seluma
28	Kep. Riau	5	Bintan, Karimun, Kota Tanjung Pinang, Lingga, dan Natuna

29	Papua Barat	5	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama
30	Gorontalo	4	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, dan Gorontalo Utara
31	Kalimantan Utara	4	Kota Tarakan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung
32	Papua Tengah	4	Deiyai, Dogiyai, Nabire, dan Paniai
33	Bali	3	Gianyar, Karang Asem, dan Tabanan
34	DI Yogyakarta	3	Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, dan Kulon Progo
35	Papua Barat Daya	3	Kota Sorong, Raja Ampat, dan Sorong
36	Papua Selatan	3	Asmat, Boven Digoel, dan Merauke
37	DK Jakarta	2	Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Selatan

Dari sejumlah SAM yang diperiksa, selanjutnya dilihat lagi kualitas SAM yang tidak memenuhi syarat atau tidak aman. Kualitas SAM aman dari aspek dilihat dari kualitas air yang memenuhi standar baku mutu yang berlaku yaitu tidak tercemar oleh zat-zat pencemar pada parameter fisik, kimia dan mikrobiologi. Berdasarkan cakupan SAM tidak memenuhi syarat, terdapat 119 kabupaten/kota (23,9%) sudah memiliki capaian SAM yang aman. Sebagian besar (71,9%) atau 358 kabupaten/kota masih memiliki SAM yang tidak memenuhi syarat. Selain itu juga terdapat sebagian kecil (1,4%) atau 7 kabupaten/kota yang seluruh SAM tidak memenuhi syarat dan 2,8% atau 14 kabupaten/kota yang tidak mengetahui data cakupannya. Sehingga masih ada 379 kabupaten/kota dari 37 Provinsi yang tidak tercapai cakupannya. Berikut adalah persebaran 379 kabupaten/kota yang tidak tercapai cakupan SAM tidak memenuhi syarat per provinsi:

Tabel 34 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak tercapai cakupan SAM tidak memenuhi syarat

No	Provinsi Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Jawa Tengah	31	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, dan Wonosobo
2	Sumatera Utara	25	Asahan, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padangsidempuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Nias, Nias Barat, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba

3	Jawa Timur	23	Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung
4	Sulawesi Selatan	22	Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jenepono, Kepulauan Selayar, Kota Makassar, Kota Palopo, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene Dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Wajo
5	Aceh	18	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Subulussalam, Nagan Raya, Pidie, dan Simeulue

6	Nusa Tenggara Timur	18	Alor, Belu, Ende, Kota Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara
7	Sumatera Barat	18	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawah Lunto, Kota Solok, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, dan Tanah Datar
8	Sumatera Selatan	15	Banyu Asin, Empat Lawang, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Komering Ulu Timur

9	Sulawesi Tenggara	14	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Kota Baubau, Kota Kendari, Muna, dan Wakatobi
10	Jawa Barat	13	Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cianjur, Garut, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Sukabumi, dan Tasikmalaya
11	Sulawesi Utara	13	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado, Kota Tomohon, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Siau Tagulandang Biaro
12	Riau	11	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Siak

13	Sulawesi Tengah	11	Banggai, Banggai Laut, Buol, Donggala, Kota Palu, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, dan Toli-Toli
14	Kalimantan Barat	10	Kapuas Hulu, Ketapang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kubu Raya, Landak, Mempawah, Sambas, Sanggau, dan Sintang
15	Kalimantan Tengah	10	Kapuas, Katingan, Kota Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, dan Sukamara
16	Maluku	10	Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kota Ambon, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur
17	Jambi	9	Bungo, Kerinci, Kota Jambi, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo
18	Kalimantan Selatan	9	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Banjar Baru, Kota Baru, dan Tanah Bumbu

19	Maluku Utara	9	Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu
20	Kalimantan Timur	8	Kota Bontang, Kota Samarinda, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Paser, dan Penajam Paser Utara
21	Lampung	8	Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus, dan Tulangbawang
22	Bali	6	Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, dan Klungkung
23	Banten	6	Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Lebak, Pandeglang, dan Tangerang
24	Kep. Bangka Belitung	6	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, dan Belitung Timur
25	Kep. Riau	6	Bintan, Karimun, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Lingga, dan Natuna
26	Nusa Tenggara Barat	6	Bima, Dompu, Kota Bima, Kota Mataram,

			Lombok Utara, dan Sumbawa Barat
27	Papua	6	Biak Numfor, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura, Mamberamo Raya, dan Supiori
28	Bengkulu	5	Bengkulu Utara, Lebong, Mukomuko, Rejang Lebong, dan Seluma
29	Papua Barat	5	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama
30	Papua Tengah	5	Deiyai, Dogiyai, Mimika, Nabire, dan Paniai
31	Sulawesi Barat	5	Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar
32	DK Jakarta	4	Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, dan Kota Jakarta Utara
33	Kalimantan Utara	4	Bulungan, Kota Tarakan, Malinau, dan Nunukan
34	Papua Barat Daya	4	Kota Sorong, Raja Ampat, Sorong, dan Sorong Selatan
35	DI Yogyakarta	2	Gunung Kidul dan Kulon Progo
36	Gorontalo	2	Bone Bolango dan Pohuwato
37	Papua Selatan	2	Boven Digoel dan Merauke

d. Analisis Kategori Dominan dan Analisis per Subkategori dengan Dominasi Abai pada Kategori Kapasitas

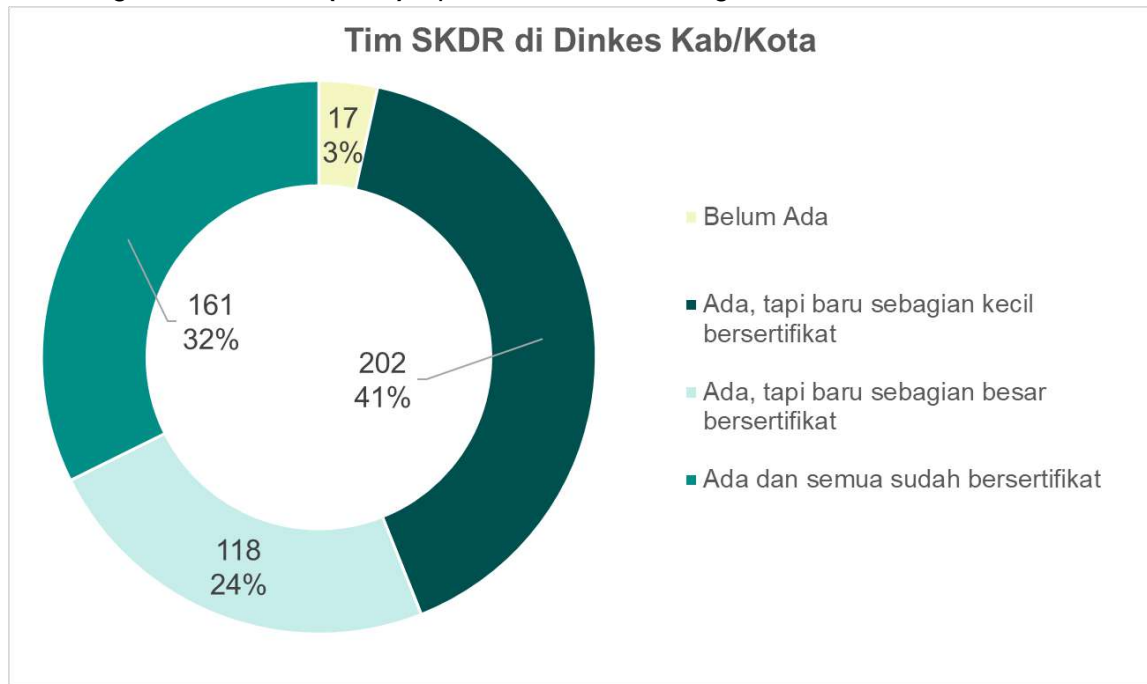
No	SUBKATEGORI	BOBOT	ACEH	BALI	BANTEN	BENGKULU	DIYOGRAMBARA	GORONTALO	JAWA	JAWA BARAT	JAWA TIMUR	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	KEP. BANGKA	KEP. BANGKA BELITUNG	LAMPUNG	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT	PAPUA MERDEKA	PAPUA PEGUNINGAN	PAPUA SELATAN	PAPUA TENGAH	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	SUMATERA BARAT	SUMATERA SELATAN	DOMINASI	%							
1	Kebijakan publik	3.52	R	S	S	R	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	55.3				
2	Kecerdigrahan	3.52	T	T	T	S	S	S	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	S	T	T	T	S	T	T	T	T	S	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	65.6				
3	Program imanisasi	7.75	S	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	94.7				
4	Pengobatan massal (PIN Polio)	2.37	T	S	T	T	S	T	T	S	S	S	R	I	T	T	T	T	R	T	R	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	44.7				
5	Pengendalian lingkungan dan Perilaku	3.15	S	T	T	T	T	T	T	S	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	86.8				
6	Kualitas program pencegahan dan pengendalian PIE	6.66	R	T	R	R	T	S	R	K	S	S	S	S	S	S	S	S	R	A	S	R	-	S	-	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	52.6			
7	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.40	A	R	R	A	S	S	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	R	R	A	R	A	A	R	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	85.3		
8	8a. Surveilans (SKD)	8.89	A	A	T	A	T	A	A	A	A	A	A	A	R	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	78.9		
8b. Sasaran deteksi dini kasus Polio (human diseases surveillance)	9.48	T	T	T	T	T	S	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	R	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	78.9			
8c. Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (Puskesmas)	9.08	R	R	S	A	S	T	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	R	A	R	A	R	S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	47.4	
8d. Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (RS)	11.20	A	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	A	84.2		
8e. Pelaksanaan Deteksi dini Polio di Lingkungan	7.06	A	A	A	A	A	T	A	T	A	A	A	A	A	A	A	A	A	T	T	A	T	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	T	T	A	A	78.9	
9	PE dan penanggulangan KLB	12.06	R	R	A	A	R	S	A	R	A	T	A	R	A	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	R	-	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	52.6
10	Kapasitas Laboratorium	1.75	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	97.4	
11	Media Promosi Kesehatan	10.10	S	T	T	S	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	78.9	

Dari 11 (sebelas) subkategori Kapasitas, terdapat 3 (tiga) subkategori dengan dominasi **ABAI** yaitu Surveilans (SKD), Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Lingkungan, dan Kapasitas Laboratorium. Selain itu, terdapat 4 (empat) subkategori dengan dominasi **RENDAH** yaitu Kebijakan Publik, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (Puskesmas), dan PE dan Penanggulangan KLB.

ANALISIS PER SUBKATEGORI DENGAN DOMINASI ABAI

1. Surveilans (SKD)

Dari 498 Kabupaten/Kota yang telah mengisi *tool* pemetaan risiko penyakit Polio, terhadap subkategori **Surveilans (SKD)** diperoleh temuan sebagai berikut:



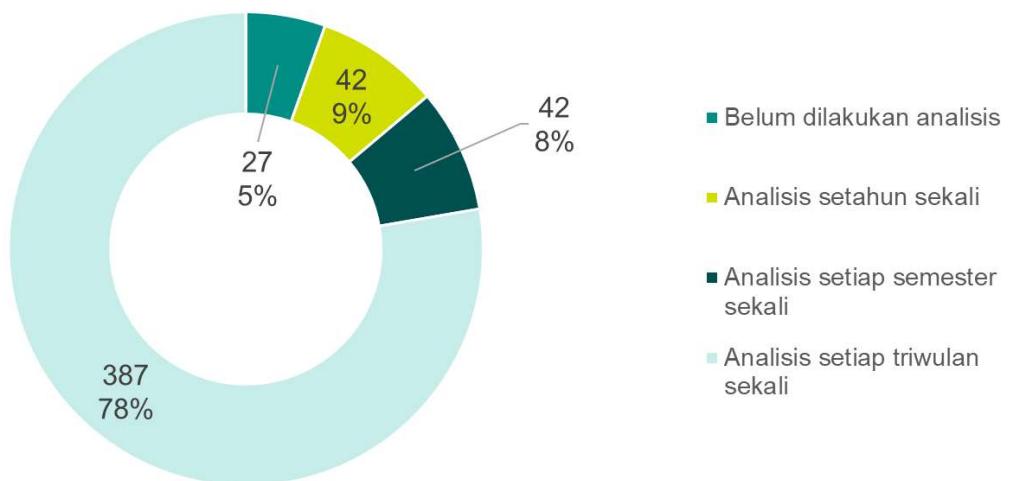
a. Terdapat 17 Kabupaten/Kota (3%) yang belum memiliki tim SKDR di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Selain itu, juga terdapat 202 Kabupaten/Kota (41%) dari 36 Provinsi yang sudah memiliki tim SKDR di Dinas Kesehatan namun baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat yakni:

Tabel 35 Persebaran Kabupaten/Kota yang sudah memiliki tim SKDR di Dinas Kesehatan namun baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat

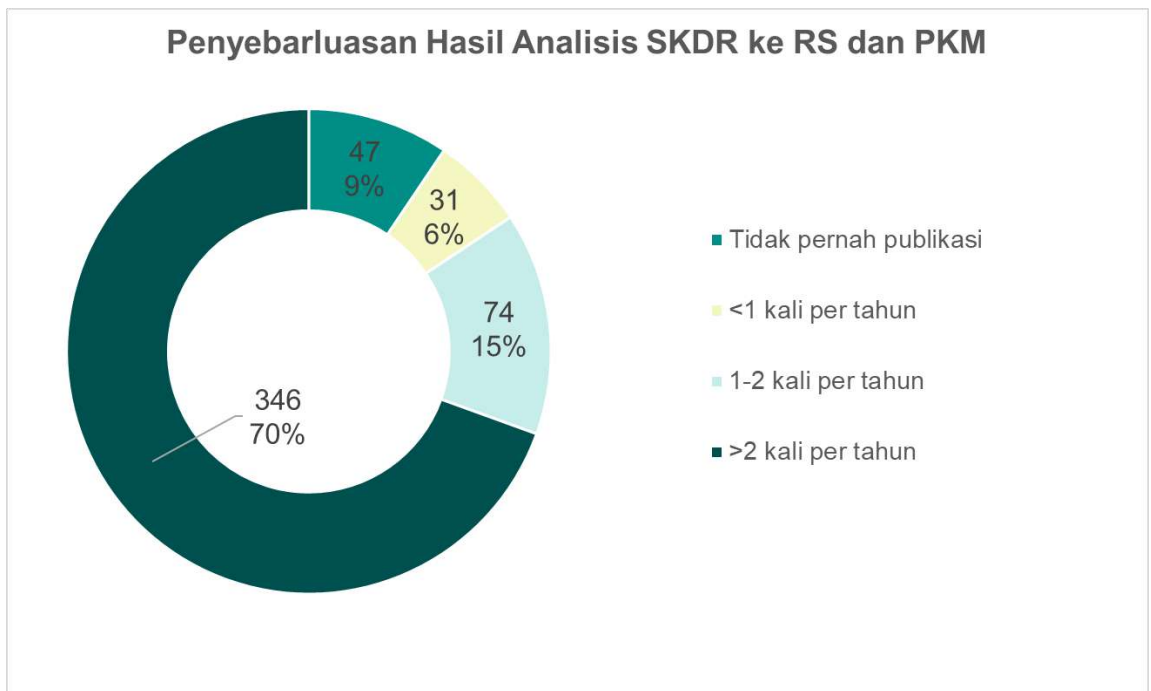
No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Jawa Timur	14
2	Sumatera Barat	14
3	Nusa Tenggara Timur	13
4	Aceh	12
5	Kalimantan Tengah	11
6	Maluku	10
7	Sulawesi Tengah	10
8	Sulawesi Selatan	8
9	Riau	7
10	Sulawesi Tenggara	7
11	Sumatera Utara	7
12	Bengkulu	6
13	Kalimantan Barat	6
14	Kalimantan Selatan	6
15	Lampung	6
16	Papua Barat	6
17	Sulawesi Utara	6
18	Jawa Barat	5
19	Kalimantan Timur	5
20	Bali	4
21	Jawa Tengah	4
22	Kep. Riau	4
23	Papua	4
24	Sumatera Selatan	4
25	Gorontalo	3

26	Papua Barat Daya	3
27	Papua Selatan	3
28	Papua Tengah	3
29	Jambi	2
30	Kalimantan Utara	2
31	Maluku Utara	2
32	Banten	1
33	DI Yogyakarta	1
34	Kep. Bangka Belitung	1
35	Nusa Tenggara Barat	1
36	Sulawesi Barat	1

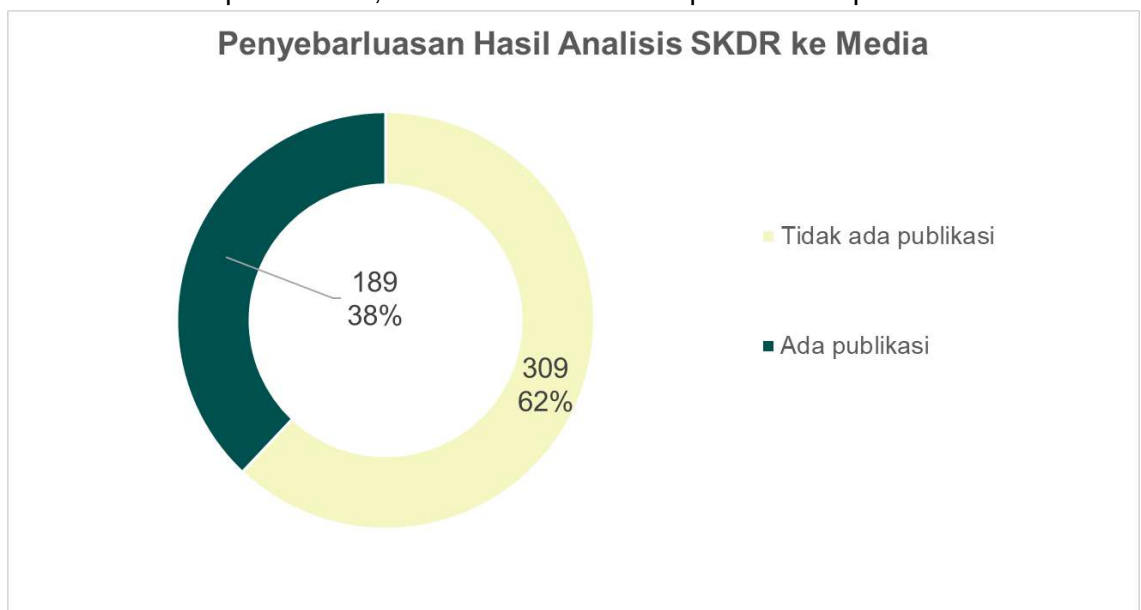
Analisis SKDR di Kab/Kota



- b. 27 Kabupaten/Kota (5%) dari 16 Provinsi belum melakukan analisis SKDR. Selain itu, terdapat 42 Kabupaten/Kota (9%) dari 19 Provinsi yang sudah melakukan analisis SKDR namun baru setahun sekali.



- c. 47 Kabupaten/Kota (9%) dari 23 Provinsi belum melakukan penyebarluasan hasil analisis SKDR ke rumah sakit dan puskesmas. Selain itu, terdapat 31 Kabupaten/Kota (6%) dari 16 Provinsi yang sudah melakukan penyebarluasan hasil analisis SKDR ke rumah sakit dan puskesmas, namun di bawah 1 kali per sasaran per tahun.



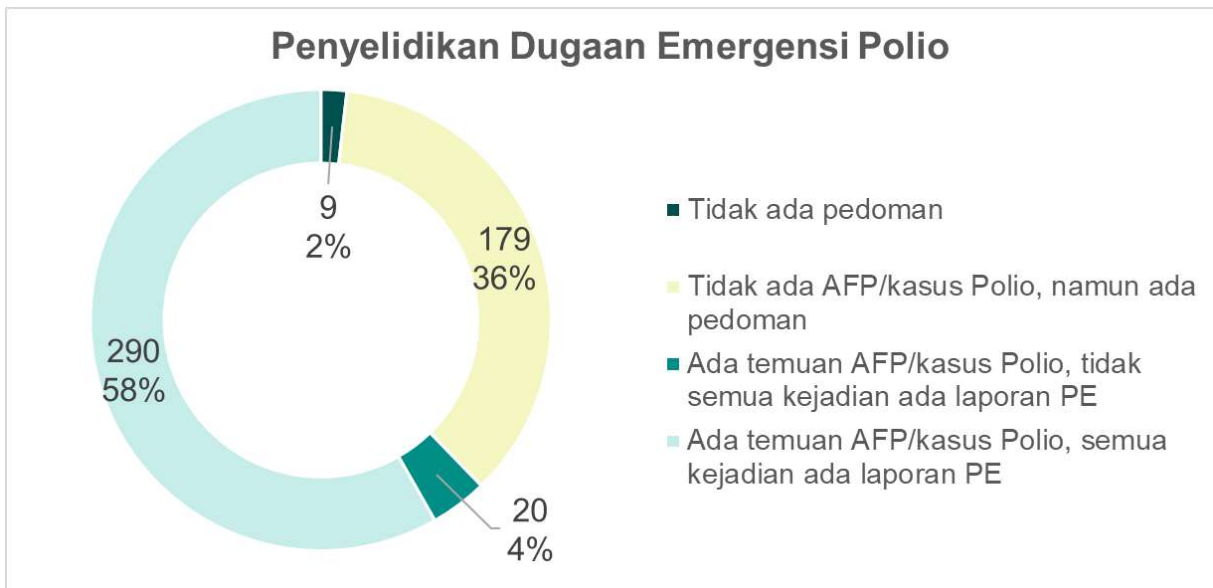
- d. 309 Kabupaten/Kota (62%) dari 35 Provinsi belum melakukan penyebarluasan hasil analisis SKDR ke media dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 36 Persebaran Kabupaten/Kota yang belum melakukan penyebarluasan hasil analisis SKDR ke media

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Jawa Timur	24
2	Sumatera Utara	24

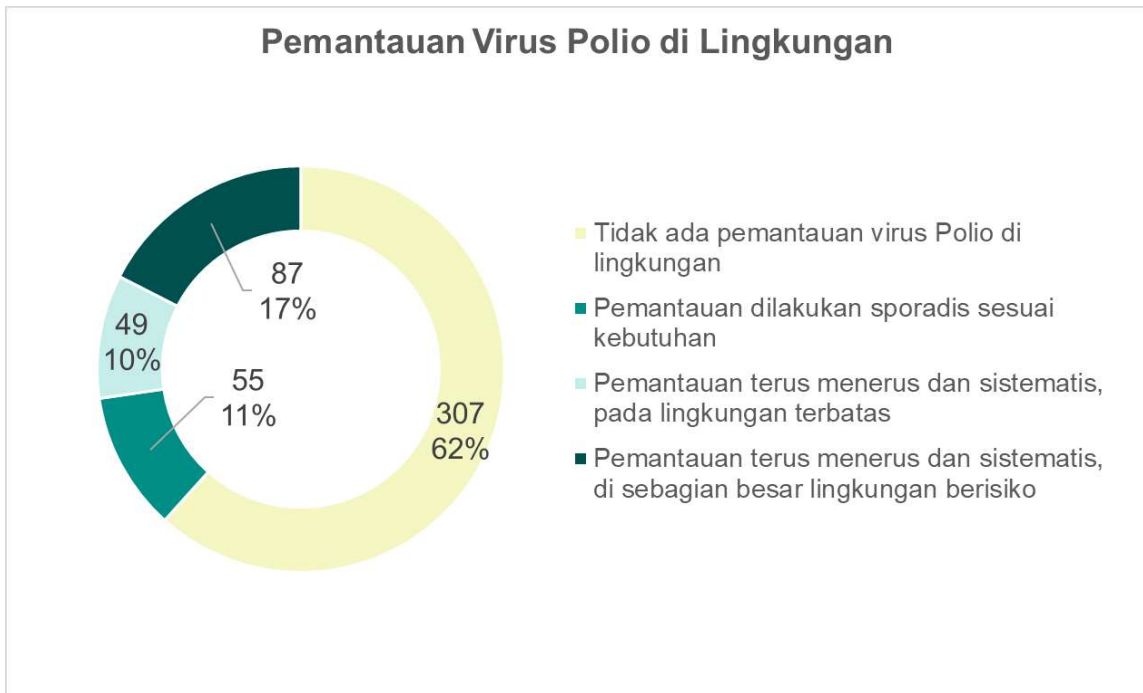
3	Aceh	18
4	Jawa Barat	18
5	Jawa Tengah	18
6	Nusa Tenggara Timur	16
7	Sulawesi Selatan	15
8	Sulawesi Tenggara	14
9	Sumatera Barat	14
10	Sumatera Selatan	10
11	Jambi	9
12	Bengkulu	8
13	Kalimantan Barat	8
14	Kalimantan Tengah	8
15	Kalimantan Timur	8
16	Maluku	8
17	Sulawesi Utara	8
18	Kep. Bangka Belitung	7
19	Riau	7
20	Bali	6
21	Kalimantan Selatan	6
22	Kep. Riau	6
23	Lampung	6
24	Nusa Tenggara Barat	6
25	Papua	6
26	Papua Barat	6
27	Sulawesi Tengah	6
28	Papua Tengah	4
29	Banten	3

30	DI Yogyakarta	3
31	Papua Barat Daya	3
32	Gorontalo	2
33	Maluku Utara	2
34	Kalimantan Utara	1
35	Papua Selatan	1



e. 9 Kabupaten/Kota (2%) dari 8 Provinsi menjawab tidak ada pedoman Polio. Selain itu, masih terdapat 20 Kabupaten/Kota (4%) dari 13 Provinsi yang sudah ada temuan AFP/kasus Polio, namun belum semua kasus dibuat laporan penyelidikan epidemiologi sesuai pedoman.

2. Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Lingkungan



Dari 498 Kabupaten/Kota yang telah mengisi *tool* pemetaan risiko penyakit Polio, terhadap subkategori **Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Lingkungan** diperoleh temuan yakni 307 Kabupaten/Kota (62%) dari 36 Provinsi tidak ada pemantauan virus Polio di lingkungan dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 37 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak ada pemantauan virus Polio di lingkungan

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kabupaten/Kota
1	Jawa Tengah	34	Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, dan Wonosobo
2	Sumatera Utara	30	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang

			Hasundutan, Karo, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Toba
3	Sulawesi Selatan	23	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene Dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, dan Wajo
4	Jawa Barat	18	Bandung, Bekasi, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Majalengka, Subang, Sukabumi, dan Sumedang
5	Jawa Timur	14	Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Kediri, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tulungagung
6	Kalimantan Barat	12	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Kota

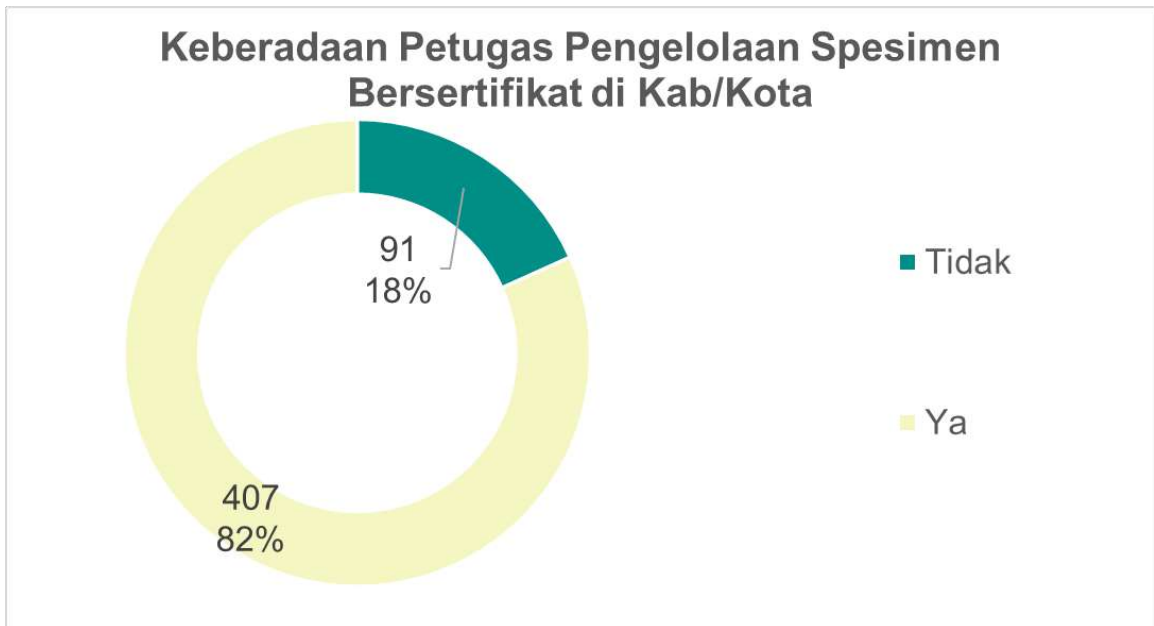
			Pontianak, Kota Singkawang, Kubu Raya, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang
7	Nusa Tenggara Timur	11	Belu, Flores Timur, Kota Kupang, Kupang, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Sabu Raijua, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara
8	Sulawesi Tenggara	11	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, dan Muna Barat
9	Nusa Tenggara Barat	10	Bima, Dompu, Kota Bima, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Sumbawa Barat
10	Sumatera Selatan	10	Empat Lawang, Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, dan Penukal Abab Lematang Ilir
11	Aceh	9	Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Nagan Raya, dan Simeulue
12	Bali	8	Badung, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Kota Denpasar, dan Tabanan

13	Kalimantan Tengah	8	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Kapuas, Kota Palangka Raya, Lamandau, Pulang Pisau, dan Seruyan
14	Riau	8	Indragiri Hilir, Kampar, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hilir, dan Siak
15	Sumatera Barat	8	Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, Sijunjung, dan Solok
16	Bengkulu	7	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Mukomuko, dan Seluma
17	Kalimantan Selatan	7	Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Kota Banjar Baru, Tabalong, dan Tanah Laut
18	Sulawesi Tengah	7	Banggai, Banggai Kepulauan, Buol, Donggala, Kota Palu, Morowali, dan Sigi
19	Gorontalo	6	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, dan Pohuwato
20	Maluku	6	Buru, Buru Selatan, Kota Tual, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, dan Seram Bagian Timur
21	Kalimantan Timur	5	Berau, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Paser, dan Penajam Paser Utara
22	Kalimantan Utara	5	Bulungan, Kota Tarakan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung

23	Lampung	5	Kota Metro, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, dan Way Kanan
24	Papua	5	Biak Numfor, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura, dan Mamberamo Raya
25	Sulawesi Barat	5	Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar
26	Banten	4	Kota Cilegon, Kota Tangerang, Serang, dan Tangerang
27	Kep. Bangka Belitung	4	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang
28	Papua Selatan	4	Asmat, Boven Digoel, Mappi, dan Merauke
29	Papua Tengah	4	Deiyai, Dogiyai, Mimika, dan Nabire
30	Sulawesi Utara	4	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Minahasa Selatan, dan Minahasa Tenggara
31	DI Yogyakarta	3	Kota Yogyakarta, Kulon Progo, dan Sleman
32	Jambi	3	Kota Jambi, Merangin, dan Sarolangun
33	Papua Barat Daya	3	Kota Sorong, Sorong, dan Sorong Selatan
34	Kep. Riau	2	Bintan dan Karimun
35	Maluku Utara	2	Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu
36	Papua Barat	2	Fakfak dan Teluk Bintuni

3. Kapasitas Laboratorium

Dari 498 Kabupaten/Kota yang telah mengisi *tool* pemetaan risiko penyakit Polio, terhadap subkategori **Kapasitas Laboratorium** diperoleh temuan sebagai berikut:



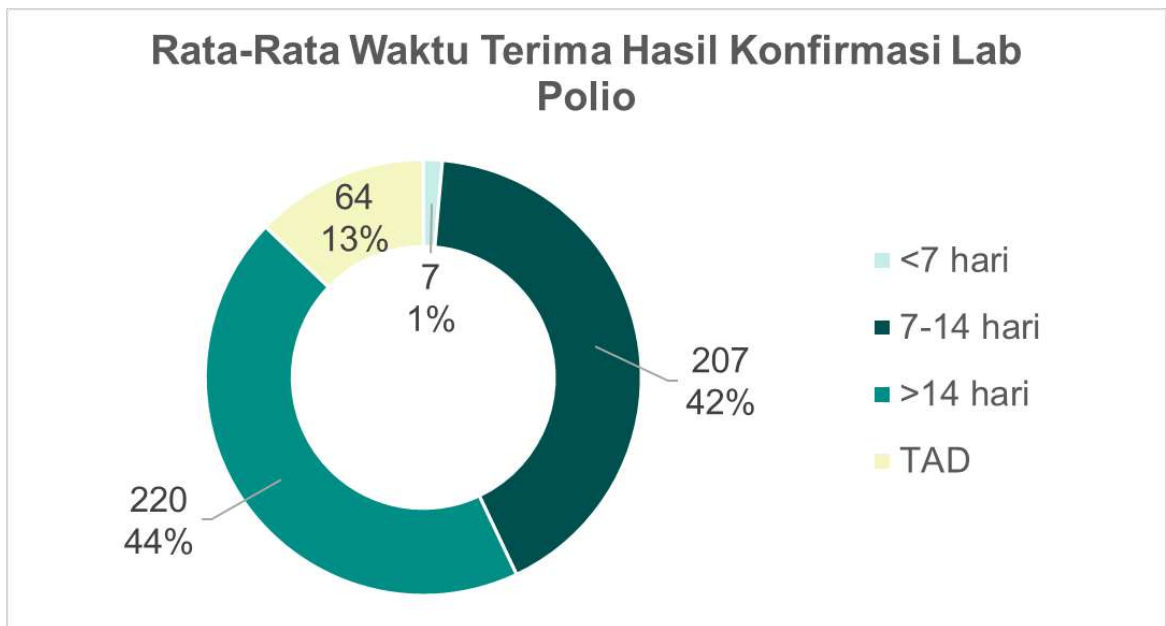
- a. Terdapat 91 Kabupaten/Kota (18%) dari 28 Provinsi yang tidak memiliki petugas pengelolaan spesimen bersertifikat dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 38 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak memiliki petugas pengelolaan spesimen bersertifikat

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Aceh	11	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Kota Lhokseumawe, Kota Subulussalam, dan Simeulue
2	Bengkulu	8	Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Kota Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong, dan Seluma
3	Sumatera Barat	8	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Sijunjung, dan Solok Selatan
4	Jawa Timur	6	Madiun, Malang, Mojokerto, Pacitan, Sampang, dan Trenggalek

5	Sumatera Utara	6	Batu Bara, Deli Serdang, Nias Selatan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Toba
6	Sulawesi Tenggara	5	Buton, Buton Tengah, Buton Utara, Konawe, dan Wakatobi
7	Nusa Tenggara Timur	4	Alor, Kota Kupang, Lembata, dan Ngada
8	Papua Barat	4	Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Teluk Bintuni
9	DI Yogyakarta	3	Kota Yogyakarta, Kulon Progo, dan Sleman
10	Gorontalo	3	Boalemo, Bone Bolango, dan Kota Gorontalo
11	Kalimantan Tengah	3	Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara
12	Kalimantan Timur	3	Kota Samarinda, Kutai Barat, dan Penajam Paser Utara
13	Maluku Utara	3	Halmahera Utara, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu
14	Papua Tengah	3	Deiyai, Dogiyai, dan Nabire
15	Sulawesi Selatan	3	Bantaeng, Kota Parepare, dan Tana Toraja
16	Jambi	2	Merangin dan Tebo
17	Kalimantan Barat	2	Kapuas Hulu dan Sekadau
18	Maluku	2	Buru Selatan dan Kep. Aru
19	Papua	2	Mamberamo Raya dan Supiori
20	Papua Barat Daya	2	Raja Ampat dan Sorong
21	Bali	1	Karangasem
22	Jawa Barat	1	Bandung Barat

23	Kalimantan Selatan	1	Kotabaru
24	Lampung	1	Tulang Bawang
25	Riau	1	Kuantan Singingi
26	Sulawesi Tengah	1	Morowali
27	Sulawesi Utara	1	Bolaang Mongondow Selatan
28	Sumatera Selatan	1	Lahat



- b. Terdapat 220 Kabupaten/Kota (44%) dari 35 Provinsi yang rata-rata waktu terima hasil konfirmasinya lebih dari 14 hari setelah pengiriman dengan sebaran sebagai berikut:
Tabel 39 Persebaran Kabupaten/Kota yang rata-rata waktu terima hasil konfirmasinya lebih dari 14 hari

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Sumatera Utara	30	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padangsidempuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias

			Selatan, Padang Lawas, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba
2	Jawa Tengah	16	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Grobogan, Kebumen, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Rembang, Semarang, dan Wonosobo
3	Sumatera Selatan	15	Banyu Asin, Empat Lawang, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, dan Penukal Abab Lematang Ilir
4	Sulawesi Selatan	11	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Kota Palopo, Kota Parepare, Luwu, Luwu Utara, dan Toraja Utara
5	Kalimantan Selatan	10	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kota Banjar Baru, Kota Banjarmasin, Kota Baru, Tabalong, dan Tanah Bumbu
6	Sulawesi Tenggara	10	Bombana, Buton, Buton Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, dan

			Wakatobi
7	Nusa Tenggara Timur	9	Belu, Kota Kupang, Malaka, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Timor Tengah Selatan
8	Riau	9	Indragiri Hilir, Kampar, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, dan Siak
9	Kalimantan Tengah	8	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Kapuas, Kota Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Seruyan
10	Aceh	7	Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bireuen, dan Kota Banda Aceh
11	Jawa Timur	7	Jember, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Nganjuk, Sidoarjo, dan Trenggalek
12	Lampung	7	Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Barat, Lampung Tengah, Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus
13	Nusa Tenggara Barat	7	Bima, Kota Bima, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa
14	Jambi	6	Batang Hari, Kota Jambi, Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur
15	Kalimantan Barat	6	Kayong Utara, Kota

			Pontianak, Kota Singkawang, Kubu Raya, Landak, dan Mempawah
16	Sulawesi Tengah	6	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali, Parigi Moutong, dan Poso
17	Kalimantan Timur	5	Berau, Kota Bontang, Kota Samarinda, Paser, dan Penajam Paser Utara
18	Kep. Bangka Belitung	5	Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang
19	Sulawesi Barat	5	Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar
20	Kep. Riau	4	Bintan, Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Lingga
21	Papua Barat Daya	4	Kota Sorong, Raja Ampat, Sorong, dan Sorong Selatan
22	Papua Tengah	4	Deiyai, Mimika, Nabire, dan Paniai
23	Sulawesi Utara	4	Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Minahasa Utara
24	Bali	3	Badung, Gianyar, dan Tabanan
25	Papua	3	Biak Numfor, Jayapura, dan Keerom
26	Papua Selatan	3	Asmat, Mappi, dan Merauke
27	Banten	2	Kota Tangerang Selatan dan Serang
28	Bengkulu	2	Kota Bengkulu dan Lebong
29	Jawa Barat	2	Kota Tasikmalaya dan Sukabumi

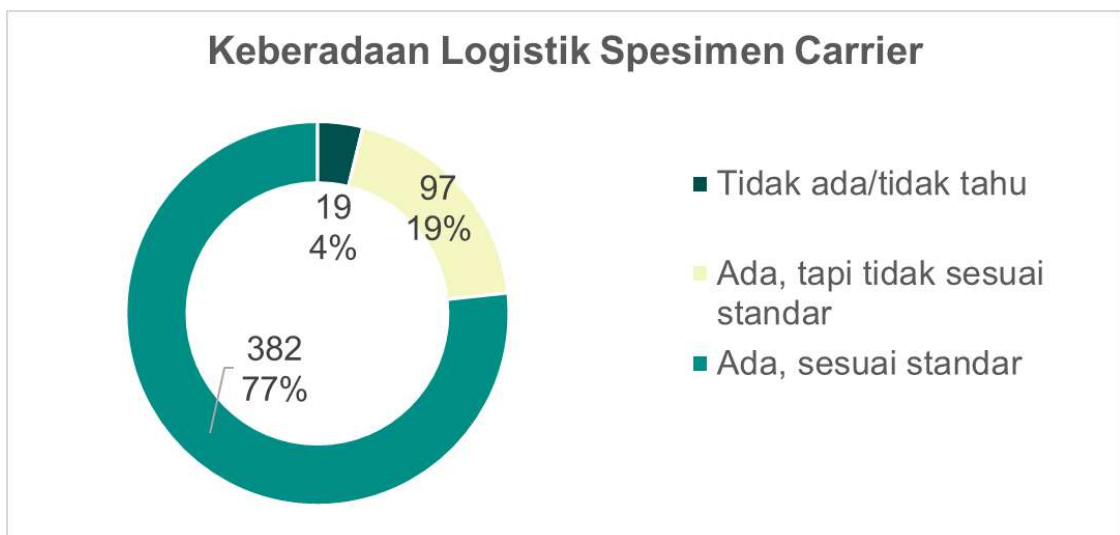
30	Kalimantan Utara	2	Nunukan dan Tana Tidung
31	Maluku	2	Kota Ambon dan Kota Tual
32	Papua Barat	2	Fakfak dan Teluk Bintuni
33	Sumatera Barat	2	Kota Pariaman dan Sijunjung
34	Gorontalo	1	Boalemo
35	Maluku Utara	1	Pulau Morotai

- c. Selain itu, terdapat 207 Kabupaten/Kota (42%) dari 33 Provinsi yang rata-rata waktu terima hasil konfirmasi 7-14 hari setelah pengiriman dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 40 Persebaran Kabupaten/Kota yang rata-rata waktu terima hasil konfirmasi 7-14 hari setelah pengiriman

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Jawa Timur	27
2	Jawa Barat	22
3	Jawa Tengah	19
4	Sulawesi Selatan	13
5	Sumatera Barat	12
6	Sulawesi Utara	10
7	Aceh	9
8	Bali	6
9	DK Jakarta	6
10	Maluku Utara	6
11	Nusa Tenggara Timur	6
12	Sulawesi Tengah	6
13	Banten	5
14	Bengkulu	5
15	DI Yogyakarta	5
16	Gorontalo	5
17	Kalimantan Barat	5

18	Kalimantan Tengah	4
19	Maluku	4
20	Jambi	3
21	Kalimantan Utara	3
22	Lampung	3
23	Nusa Tenggara Barat	3
24	Riau	3
25	Sulawesi Tenggara	3
26	Sumatera Utara	3
27	Kalimantan Timur	2
28	Kep. Bangka Belitung	2
29	Kep. Riau	2
30	Papua Barat	2
31	Papua	1
32	Sulawesi Barat	1
33	Sumatera Selatan	1



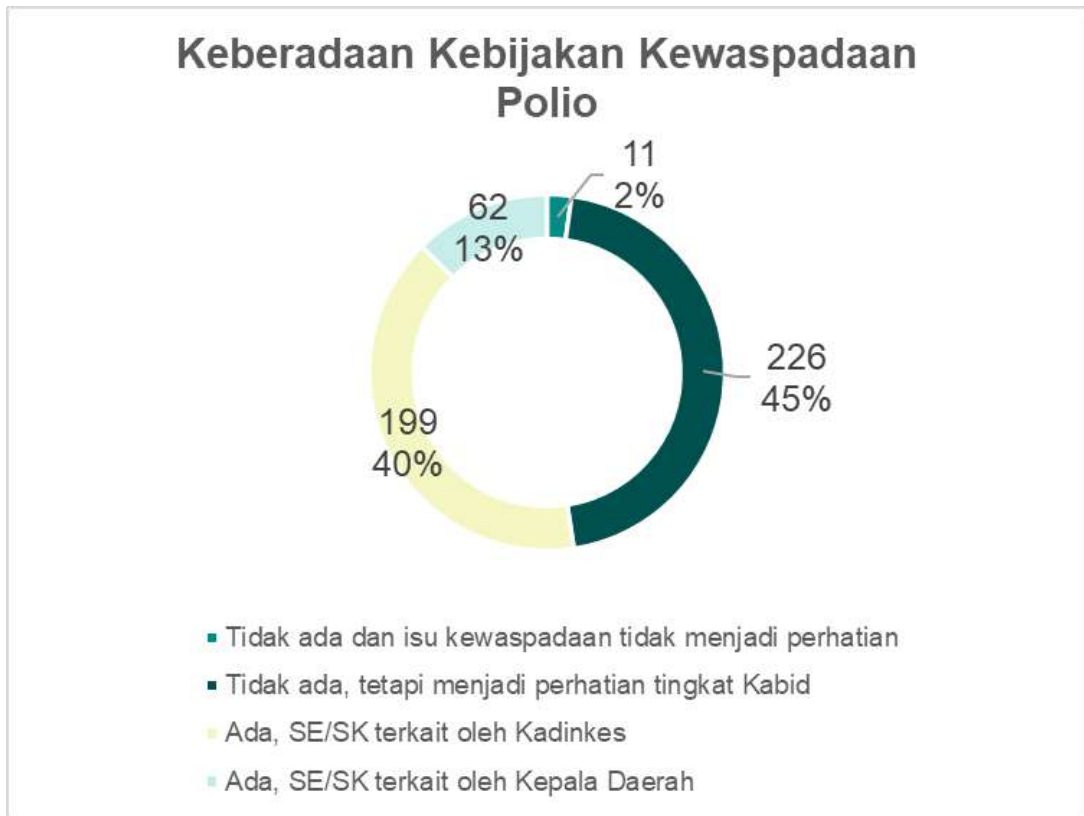
- d. 19 Kabupaten/Kota (4%) dari 15 Provinsi tidak memiliki logistik spesimen carrier Polio di wilayahnya. Selain itu, terdapat 97 Kabupaten/Kota (19%) dari 28 Provinsi sudah memiliki logistik spesimen *carrier* Polio di wilayahnya. Rincian 19 Kabupaten/Kota yang tidak memiliki logistik spesimen *carrier* Polio di wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak memiliki logistik spesimen *carrier* Polio di wilayah

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Maluku	2	Kota Ambon dan Maluku Tenggara Barat
2	Nusa Tenggara Timur	2	Ende dan Malaka
3	Sulawesi Tenggara	2	Buton dan Buton Utara
4	Sumatera Utara	2	Kota Gunungsitoli dan Nias Selatan
5	Aceh	1	Kota Subulussalam
6	Bengkulu	1	Seluma
7	Gorontalo	1	Bone Bolango
8	Jawa Tengah	1	Karanganyar
9	Kalimantan Barat	1	Kapuas Hulu
10	Kalimantan Selatan	1	Kotabaru
11	Kep. Riau	1	Kep. Anambas
12	Maluku Utara	1	Halmahera Barat
13	Riau	1	Kampar
14	Sulawesi Tengah	1	Buol
15	Sulawesi Utara	1	Kep. Talaud

ANALISIS PER SUBKATEGORI DENGAN DOMINASI RENDAH

1. Kebijakan Publik



Dari 498 Kabupaten/Kota yang telah mengisi *tool* pemetaan risiko penyakit Polio, terhadap subkategori **Kebijakan Publik** diperoleh temuan yakni 11 Kabupaten/Kota (2%) dari 9 Provinsi tidak memiliki kebijakan kewaspadaan Polio serta isu kewaspadaan Polio tidak menjadi perhatian. Selain itu, terdapat 226 Kabupaten/Kota (45%) dari 36 Provinsi yang tidak memiliki kebijakan kewaspadaan Polio di wilayahnya serta isu kewaspadaan baru menjadi perhatian tingkat kepala bidang di Dinas Kesehatan. Sebaran 226 Kabupaten/Kota tersebut ialah sebagai berikut:

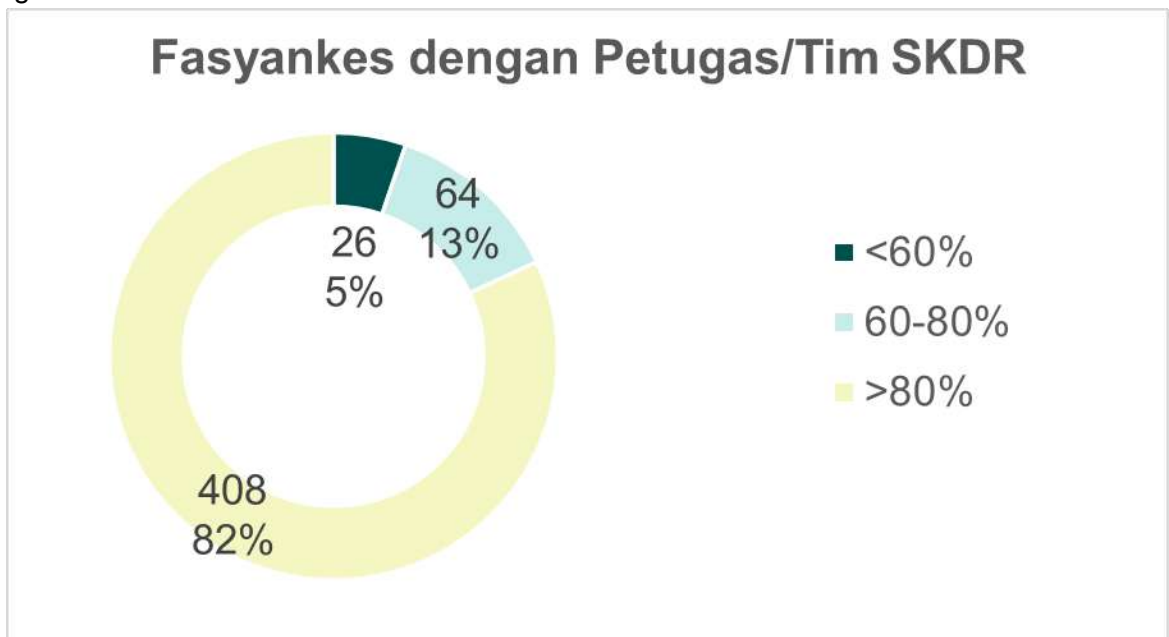
Tabel 42 Persebaran Kabupaten/Kota yang tidak memiliki kebijakan kewaspadaan Polio di wilayahnya serta isu kewaspadaan baru menjadi perhatian tingkat kepala bidang di Dinas Kesehatan

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Sulawesi Selatan	16
2	Nusa Tenggara Timur	13
3	Jawa Timur	10
4	Maluku	10
5	Sulawesi Tenggara	10
6	Sumatera Barat	10
7	Aceh	9
8	Nusa Tenggara Barat	9
9	Sulawesi Utara	9
10	Bengkulu	8
11	Jambi	8
12	Kalimantan Tengah	8
13	Sulawesi Tengah	8

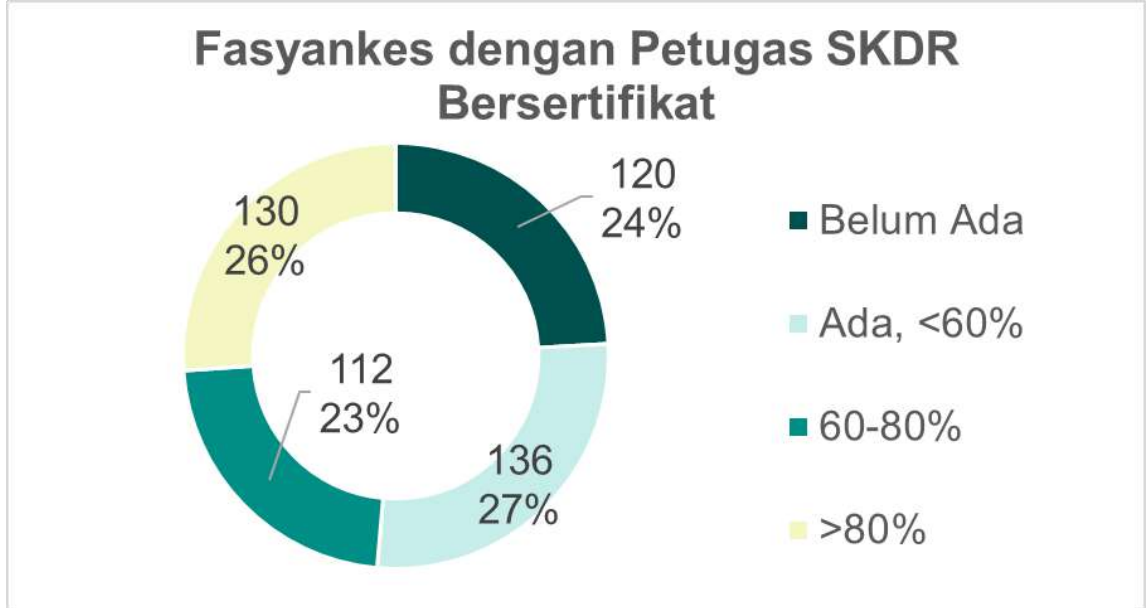
14	Kalimantan Timur	7
15	Jawa Barat	6
16	Jawa Tengah	6
17	Kalimantan Selatan	6
18	Maluku Utara	6
19	Sulawesi Barat	6
20	Gorontalo	5
21	Kep. Bangka Belitung	5
22	Lampung	5
23	Papua	5
24	Papua Barat	5
25	Sumatera Selatan	5
26	Papua Barat Daya	4
27	Papua Selatan	4
28	Riau	4
29	Bali	3
30	Banten	3
31	Kalimantan Barat	3
32	Papua Tengah	3
33	DI Yogyakarta	2
34	Kep. Riau	2
35	Sumatera Utara	2
36	Kalimantan Utara	1

2. Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (Puskesmas)

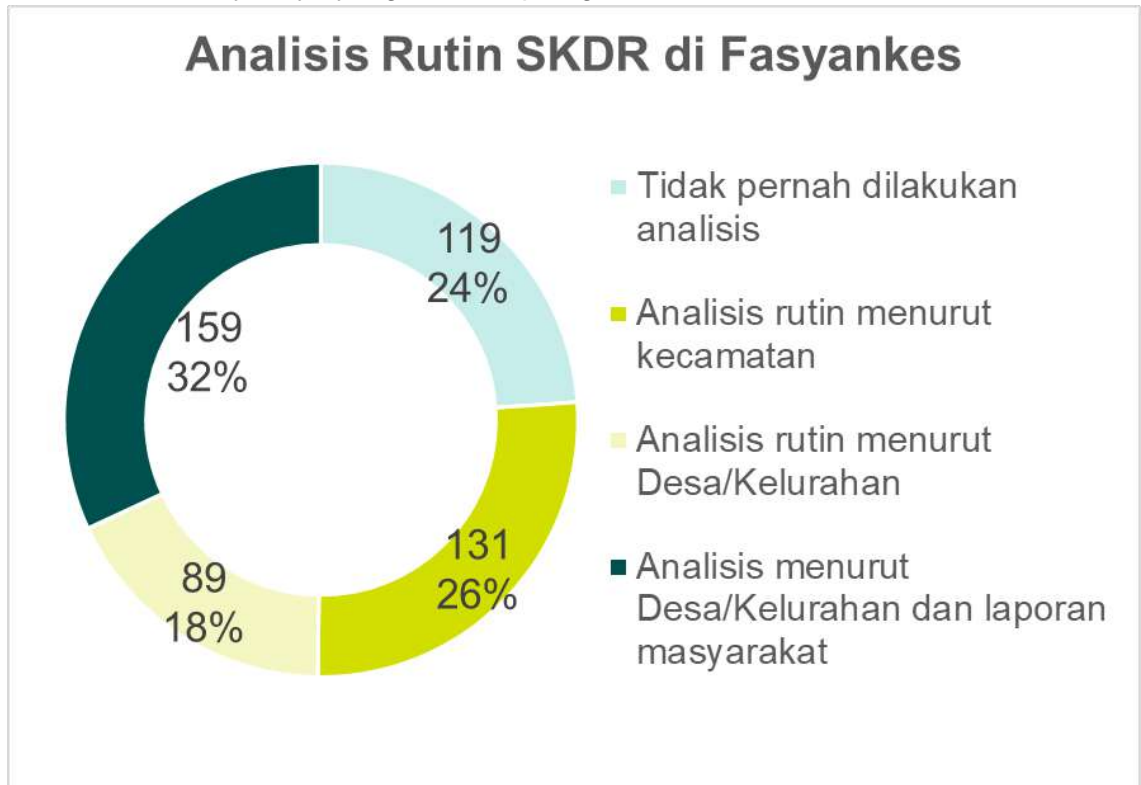
Dari 498 Kabupaten/Kota yang telah mengisi *tool* pemetaan risiko penyakit Polio, terhadap subkategori **Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Fasyankes (Puskesmas)** diperoleh temuan sebagai berikut:



- a. Terdapat 26 Kabupaten/Kota (5%) dari 17 Provinsi yang kurang dari 60% fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya tidak memiliki tim SKDR.



- b. Terdapat 120 Kabupaten/Kota (24%) dari 30 Provinsi yang fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya tidak memiliki petugas SKDR bersertifikat. Selain itu, terdapat 136 Kabupaten/Kota (27%) dari 32 Provinsi dengan kurang dari 60% fasilitas kesehatan di wilayahnya yang memiliki petugas SKDR bersertifikat.



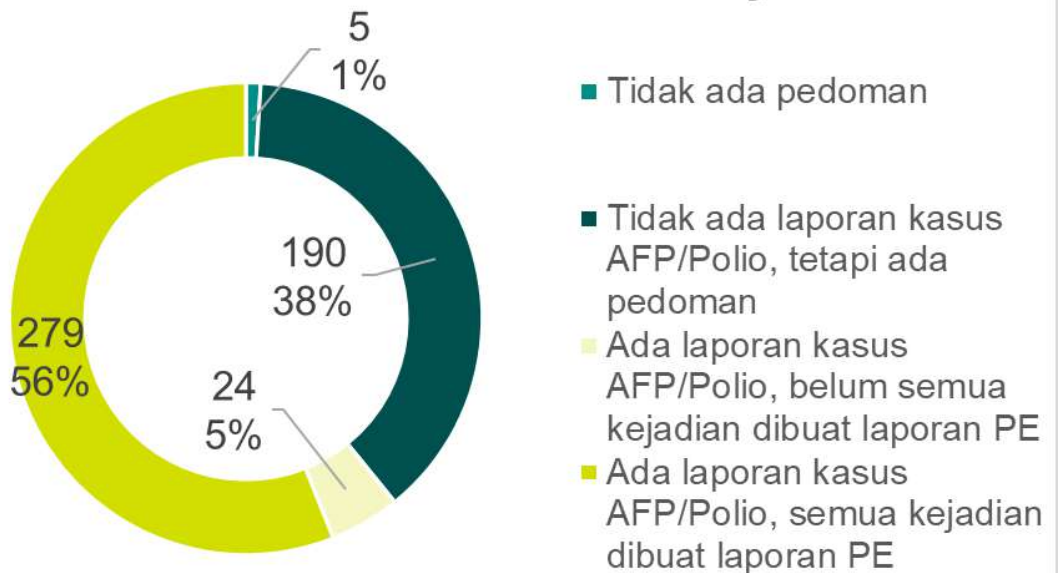
- c. Terdapat 119 Kabupaten/Kota (24%) dari 32 Provinsi tidak melakukan analisis rutin SKDR. Selain itu, terdapat 131 Kabupaten/Kota (26%) dari 32 Provinsi sudah melakukan analisis rutin namun terbatas pada tingkat kecamatan.

Kelengkapan Laporan Mingguan SKDR Fasyankes



- d. Terdapat 13 Kabupaten/Kota (3%) dari 7 Provinsi dengan Puskesmas yang tidak pernah membuat laporan mingguan. Selain itu, terdapat 10 Kabupaten/Kota (2%) dari 9 Provinsi yang seluruh Puskesmas di wilayahnya melapor namun kelengkapan laporan <60%.

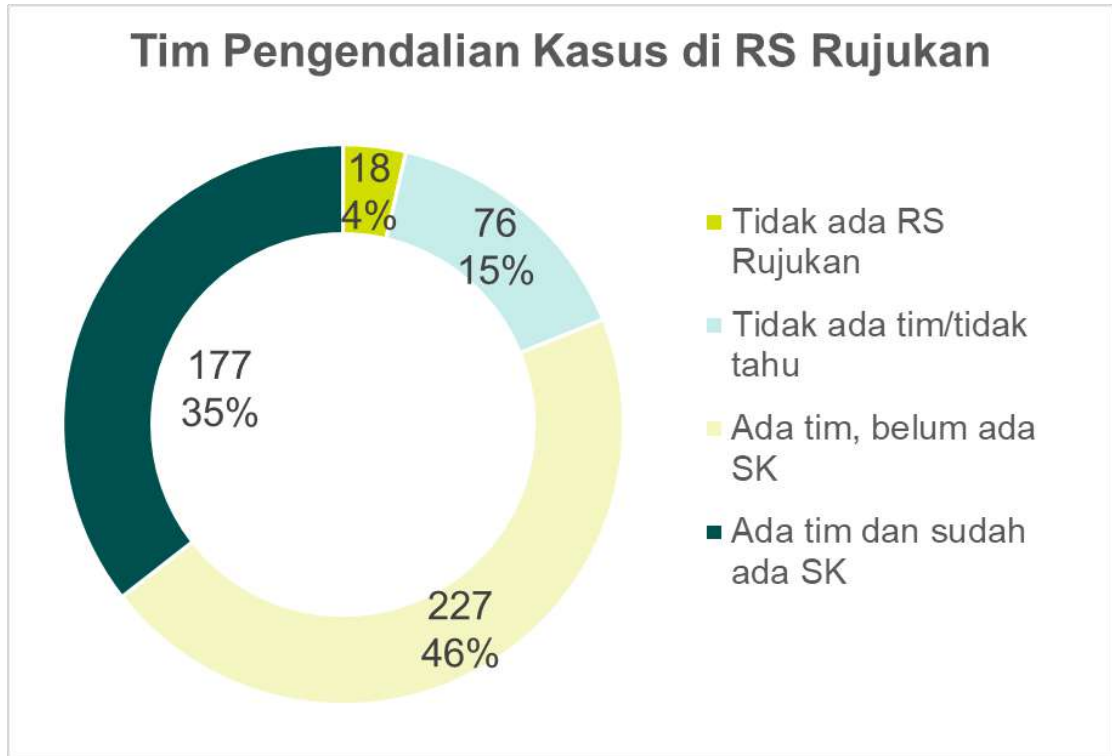
Pemanfaatan Pedoman di Fasyankes



- e. Terdapat 5 Kabupaten/Kota (1%) dari 4 Provinsi menjawab tidak adanya pedoman di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, terdapat 24 Kabupaten/Kota (5%) dari 14 Provinsi yang melaporkan kasus AFP/Polio, namun belum semua kejadian dibuat laporan penyelidikan epidemiologi.

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Dari 498 Kabupaten/Kota yang telah mengisi *tool* pemetaan risiko penyakit Polio, terhadap subkategori **Fasilitas Pelayanan Kesehatan** diperoleh temuan sebagai berikut:

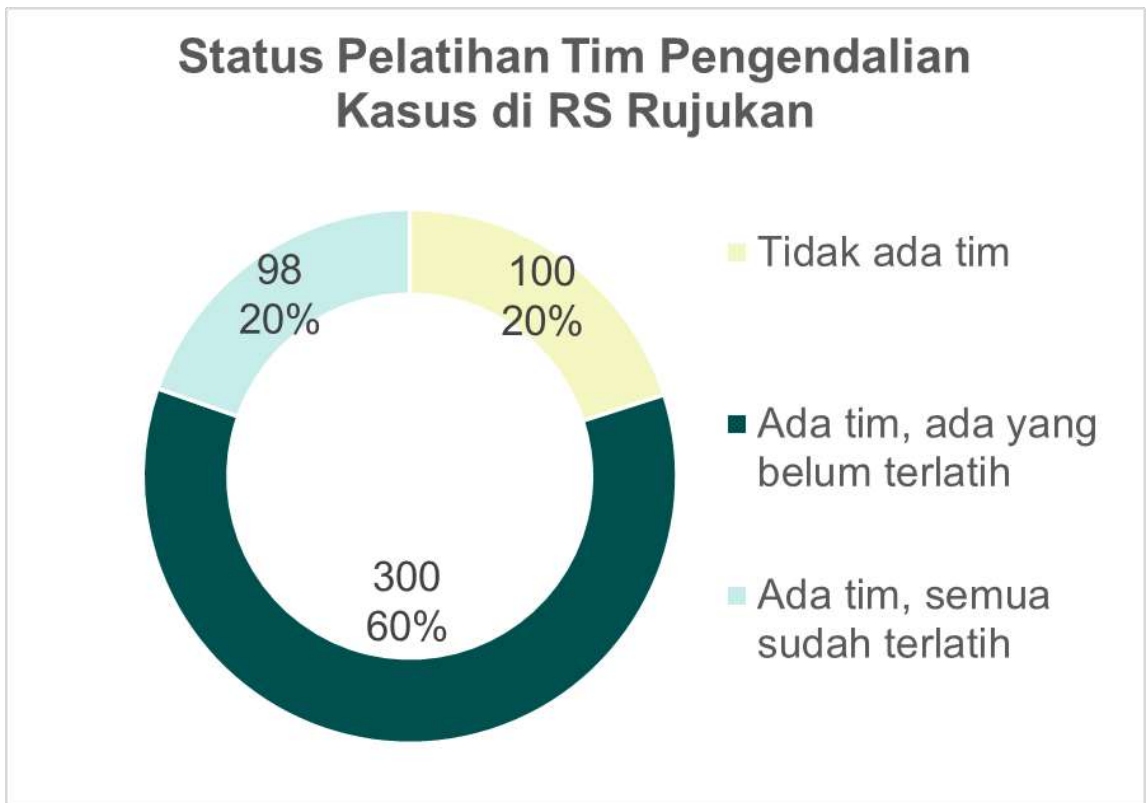


- a. Terdapat 18 Kabupaten/Kota (5%) dari 15 Provinsi yang menjawab tidak ada rumah sakit rujukan di wilayahnya. Selain itu, terdapat 76 Kabupaten/Kota (15%) dari 28 Provinsi yang tidak memiliki tim pengendalian kasus di rumah sakit rujukan. Terdapat 227 Kabupaten/Kota (46%) dari 35 Provinsi yang sudah memiliki tim pengendalian kasus di rumah sakit rujukan namun belum ada SK, dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 43 Persebaran Kabupaten/Kota yang sudah memiliki tim pengendalian kasus di RS Rujukan namun belum ada SK

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Sumatera Utara	17
2	Jawa Timur	16
3	Jawa Tengah	13
4	Nusa Tenggara Timur	12
5	Sumatera Barat	11
6	Sulawesi Selatan	10
7	Kalimantan Barat	9
8	Lampung	9
9	Sulawesi Tenggara	9
10	Sulawesi Utara	9
11	Jawa Barat	8
12	Aceh	7
13	Kalimantan Selatan	7
14	Kalimantan Tengah	7
15	Maluku Utara	7

16	Maluku	6
17	Nusa Tenggara Barat	6
18	Riau	6
19	Sumatera Selatan	6
20	Kep. Riau	5
21	Papua	5
22	Sulawesi Barat	5
23	Jambi	4
24	Kalimantan Timur	4
25	Papua Barat	4
26	Sulawesi Tengah	4
27	Bali	3
28	DI Yogyakarta	3
29	Gorontalo	3
30	Kep. Bangka Belitung	3
31	Papua Selatan	3
32	Bengkulu	2
33	Papua Barat Daya	2
34	Banten	1
35	Papua Tengah	1



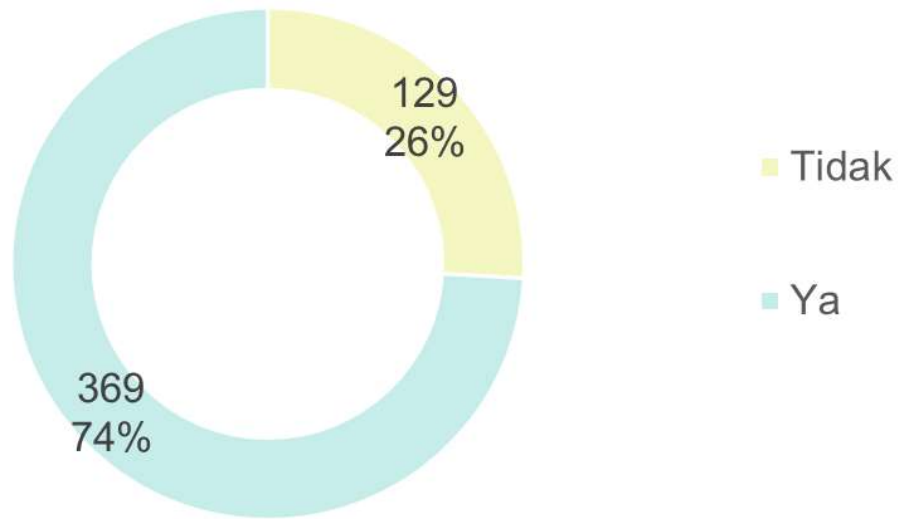
- b. Terdapat 100 Kabupaten/Kota (20%) dari 32 Provinsi menjawab tidak ada tim pengendalian kasus di rumah sakit rujukan. Selain itu, terdapat 300 Kabupaten/Kota (60%) dari 37 Provinsi yang menyatakan sudah ada tim pengendalian kasus di rumah sakit rujukan namun ada yang belum terlatih. Sebaran Kabupaten/Kota yang

menyatakan ada tim pengendalian kasus di rumah sakit rujukan namun ada yang belum terlatih ialah sebagai berikut:

Tabel 44 Persebaran Kabupaten/Kota yang menyatakan ada tim pengendalian kasus di RS Rujukan namun ada yang belum terlatih

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Jawa Timur	23
2	Jawa Barat	20
3	Jawa Tengah	20
4	Sumatera Utara	20
5	Nusa Tenggara Timur	16
6	Sulawesi Selatan	16
7	Aceh	13
8	Lampung	12
9	Sulawesi Tenggara	12
10	Sumatera Barat	11
11	Sulawesi Utara	10
12	Jambi	8
13	Kalimantan Barat	8
14	Kalimantan Selatan	8
15	Kalimantan Timur	8
16	Riau	8
17	Sumatera Selatan	8
18	Nusa Tenggara Barat	7
19	Sulawesi Tengah	7
20	Bali	6
21	Kalimantan Tengah	6
22	Maluku	6
23	Kalimantan Utara	5
24	Maluku Utara	5
25	Banten	4
26	Gorontalo	4
27	Kep. Bangka Belitung	4
28	Kep. Riau	4
29	Sulawesi Barat	4
30	Bengkulu	3
31	Papua	3
32	Papua Barat	3
33	DI Yogyakarta	2
34	Papua Barat Daya	2
35	Papua Tengah	2
36	DK Jakarta	1
37	Papua Selatan	1

Ketersediaan SOP Tatalaksana Kasus dan Pengelolaan Spesimen di RS Rujukan

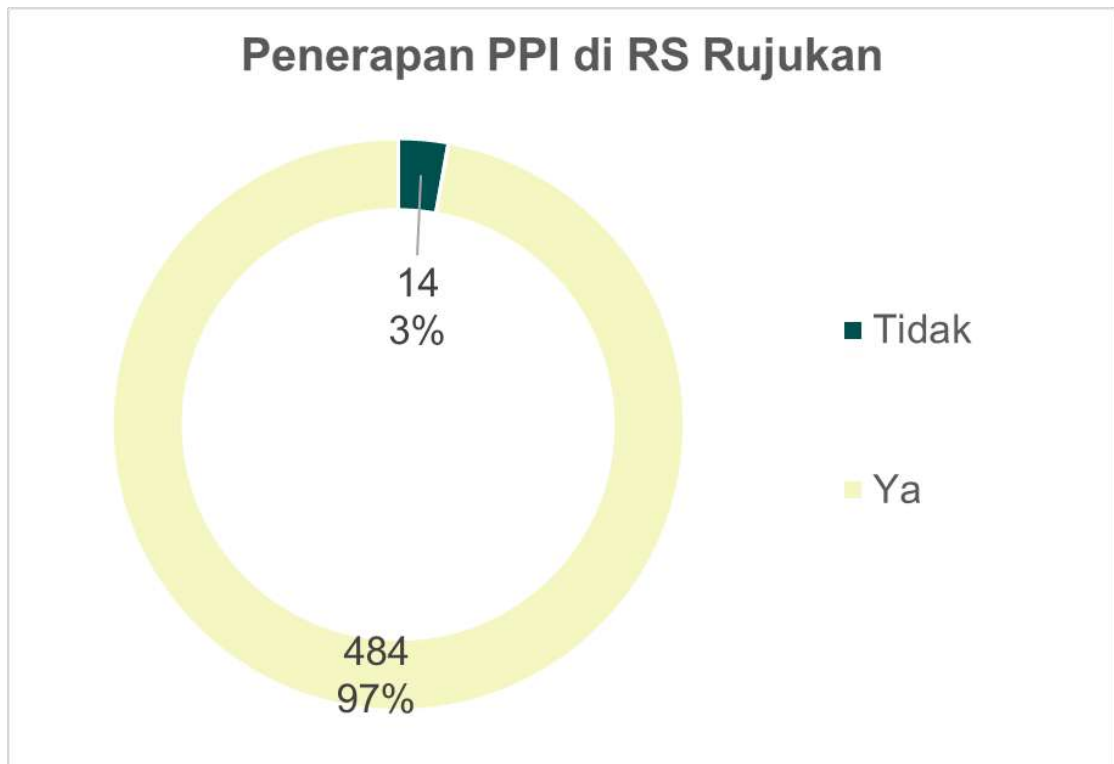


- c. Terdapat 129 Kabupaten/Kota (26%) dari 30 Provinsi dengan rumah sakit rujukan tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) tatalaksana kasus dan pengelolaan spesimen. Sebaran Kabupaten/Kotanya ialah sebagai berikut:

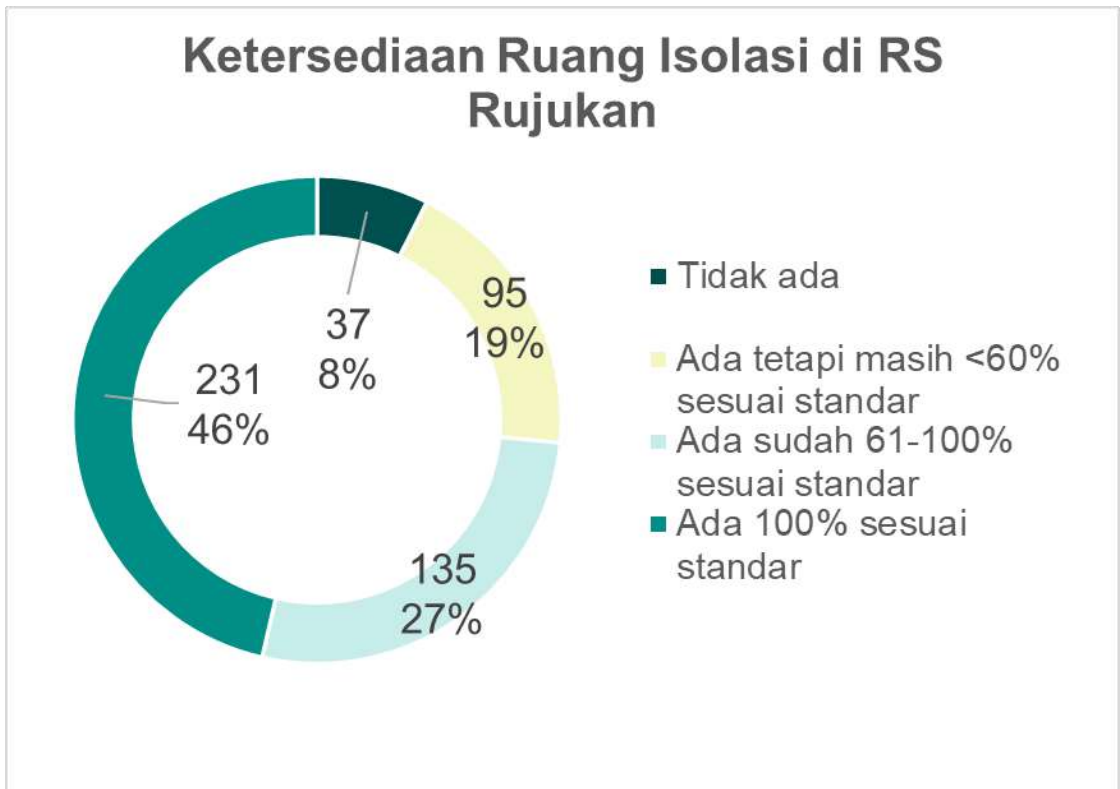
Tabel 45 Persebaran Kabupaten/Kota dengan RS Rujukan tidak memiliki SOP tatalaksana kasus dan pengelolaan spesimen

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Sumatera Utara	23
2	Nusa Tenggara Timur	9
3	Jawa Tengah	8
4	Aceh	7
5	Gorontalo	5
6	Jawa Timur	5
7	Sulawesi Barat	5
8	Sulawesi Tenggara	5
9	Sumatera Barat	5
10	Bengkulu	4
11	Jawa Barat	4
12	Kep. Bangka Belitung	4
13	Papua	4
14	Papua Barat	4
15	Riau	4
16	Sulawesi Selatan	4
17	Sulawesi Utara	4
18	Kalimantan Timur	3
19	Nusa Tenggara Barat	3

20	Sulawesi Tengah	3
21	Sumatera Selatan	3
22	Kalimantan Barat	2
23	Kalimantan Selatan	2
24	Maluku	2
25	Papua Tengah	2
26	Bali	1
27	DI Yogyakarta	1
28	Jambi	1
29	Lampung	1
30	Papua Selatan	1



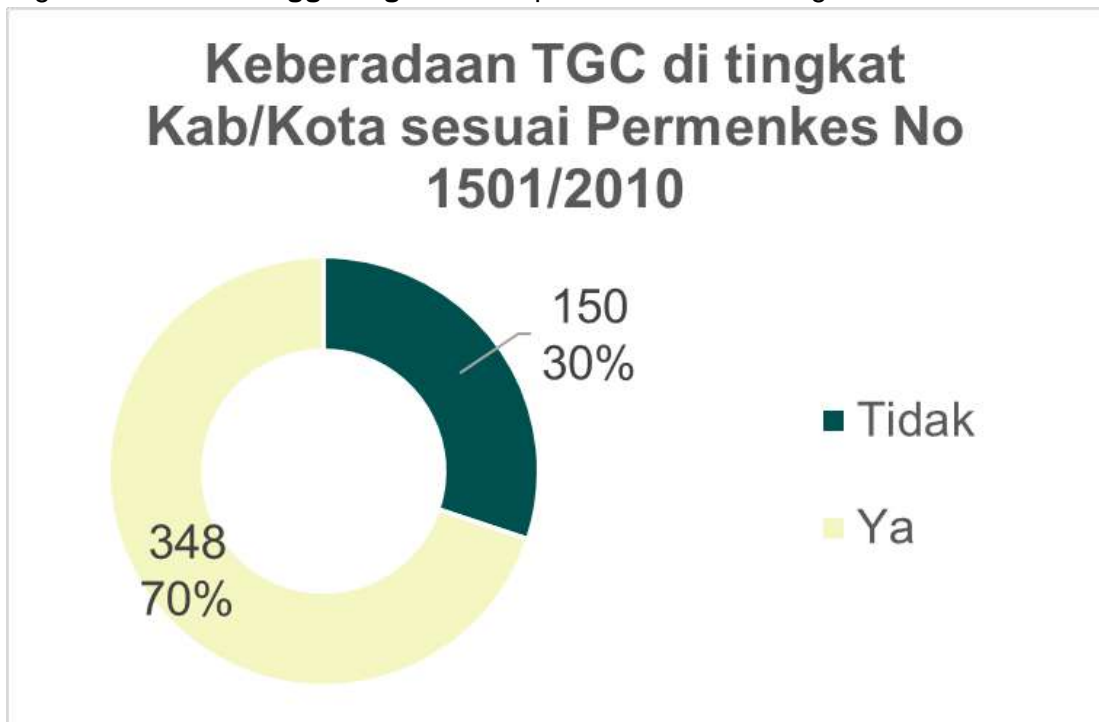
- d. Terdapat 14 Kabupaten/Kota (3%) dari 10 Provinsi yang belum menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di rumah sakit rujukan.



- e. Terdapat 37 Kabupaten/Kota (8%) dari 19 Provinsi yang menjawab tidak ada ruang isolasi di rumah sakit rujukan. Selain itu, 95 Kabupaten/Kota (19%) dari 27 Provinsi menyatakan sudah memiliki ruang isolasi di rumah sakit rujukan, namun masih <60% sesuai standar.

4. PE dan Penanggulangan KLB

Dari 498 Kabupaten/Kota yang telah mengisi *tool* pemetaan risiko penyakit Polio, terhadap subkategori **PE dan Penanggulangan KLB** diperoleh temuan sebagai berikut:

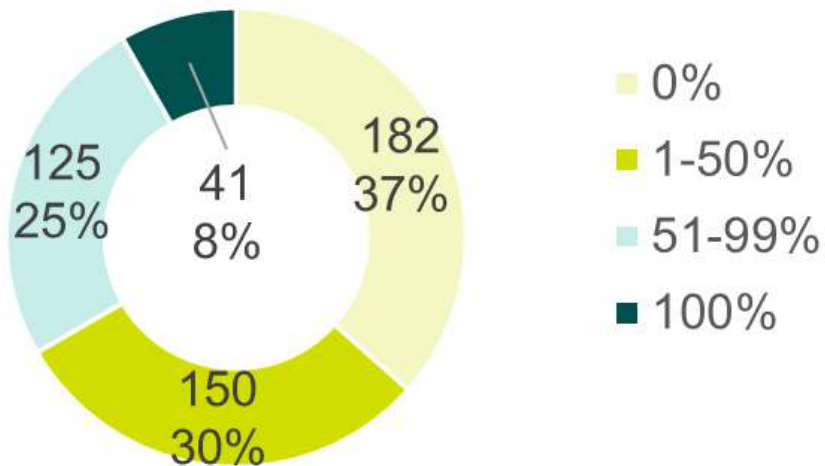


- a. Terdapat 150 Kabupaten/Kota (30%) dari 32 Provinsi yang belum memiliki Tim Gerak Cepat (TGC) dengan unsur anggota sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 (minimal 5 unsur yakni epidemiolog/pengelola surveilans, entomolog/pengelola vektor, tenaga medis, analis laboratorium, dan sanitarian). Sebaran kabupaten/kota yang memiliki TGC ialah sebagai berikut:

Tabel 46 Persebaran Kabupaten/Kota yang belum memiliki TGC dengan unsur sesuai ketentuan

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Sumatera Utara	25
2	Jawa Barat	10
3	Sulawesi Selatan	10
4	Jawa Timur	8
5	Sumatera Barat	7
6	Aceh	6
7	Bengkulu	6
8	Gorontalo	6
9	Riau	6
10	Sulawesi Tenggara	6
11	Banten	5
12	Kalimantan Barat	5
13	Papua	5
14	Sulawesi Barat	5
15	Kalimantan Tengah	4
16	Papua Tengah	4
17	Jawa Tengah	3
18	Kalimantan Timur	3
19	Kep. Riau	3
20	Maluku	3
21	Papua Barat	3
22	Papua Selatan	3
23	Sulawesi Utara	3
24	Kep. Bangka Belitung	2
25	Maluku Utara	2
26	Bali	1
27	DI Yogyakarta	1
28	Kalimantan Utara	1
29	Lampung	1
30	Nusa Tenggara Timur	1
31	Sulawesi Tengah	1
32	Sumatera Selatan	1

Persentase Anggota TGC Kab/Kota Terlatih dan Bersertifikat



- b. Terdapat 182 Kabupaten/Kota (37%) dari 35 Provinsi dimana anggota TGC belum ada yang terlatih dan bersertifikat, dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 47 Persebaran Kabupaten/Kota dengan anggota TGC belum ada yang terlatih dan bersertifikat

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Sumatera Utara	26
2	Jawa Timur	15
3	Sulawesi Selatan	13
4	Jawa Barat	12
5	Sulawesi Tenggara	8
6	Sumatera Barat	8
7	Riau	7
8	Bengkulu	6
9	Kalimantan Barat	6
10	Aceh	5
11	Banten	5
12	Gorontalo	5
13	Kalimantan Tengah	5
14	Sulawesi Barat	5
15	Sulawesi Utara	5
16	Jawa Tengah	4
17	Kep. Riau	4
18	Maluku	4
19	Maluku Utara	4
20	Papua	4

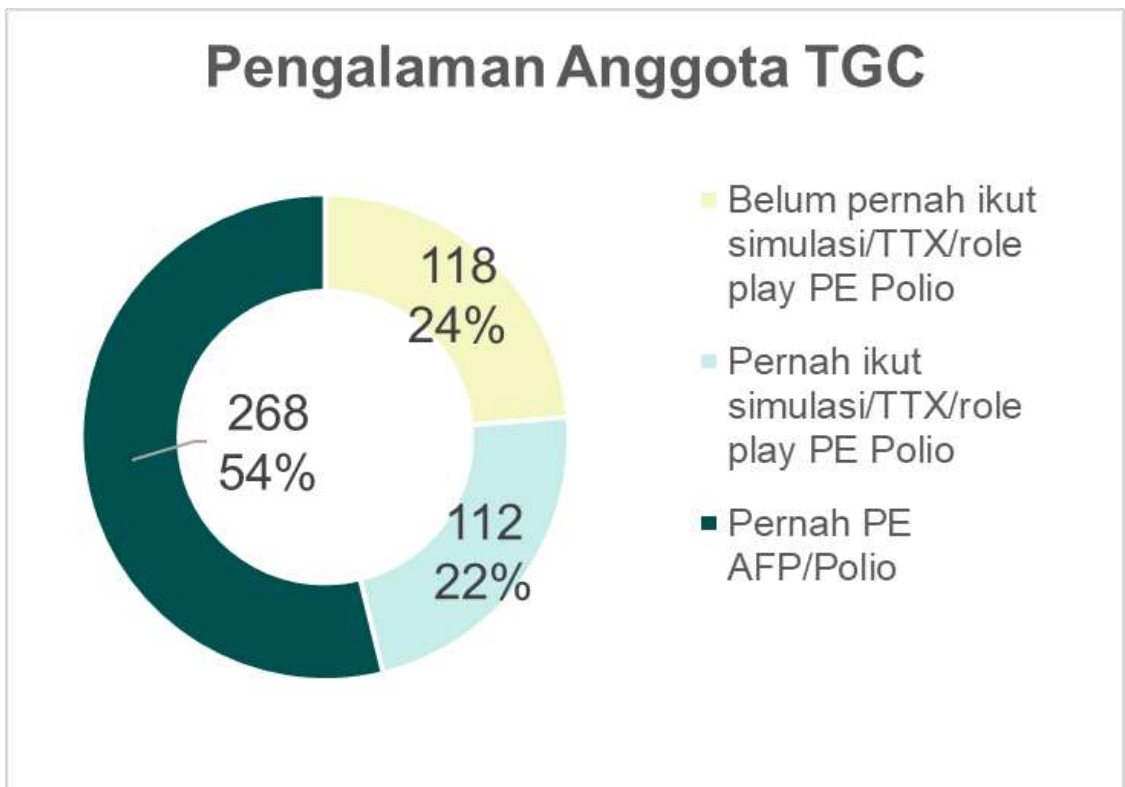
21	Papua Tengah	4
22	Kalimantan Timur	3
23	Papua Barat	3
24	Papua Barat Daya	3
25	Papua Selatan	3
26	DI Yogyakarta	2
27	Kep. Bangka Belitung	2
28	Lampung	2
29	Nusa Tenggara Timur	2
30	Sumatera Selatan	2
31	Bali	1
32	Jambi	1
33	Kalimantan Utara	1
34	Nusa Tenggara Barat	1
35	Sulawesi Tengah	1

- c. Selain itu, terdapat 150 Kabupaten/Kota (30%) dari 33 Provinsi dimana anggota TGC baru terlatih 50% ke bawah, dengan sebaran yakni:

Tabel 48 Persebaran Kabupaten/Kota dengan anggota TGC baru terlatih 50% ke bawah

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Jawa Tengah	18
2	Nusa Tenggara Timur	11
3	Aceh	10
4	Jawa Barat	8
5	Jawa Timur	8
6	Bali	7
7	Lampung	7
8	Sumatera Selatan	7
9	Kalimantan Tengah	6
10	Sulawesi Selatan	6
11	Sulawesi Tenggara	6
12	Sulawesi Utara	6
13	Jambi	5
14	Kalimantan Timur	5
15	Sumatera Utara	5
16	Kalimantan Barat	4
17	Kalimantan Selatan	4
18	Sumatera Barat	4
19	Nusa Tenggara Barat	3
20	Riau	3
21	Bengkulu	2
22	Maluku Utara	2
23	Papua Barat	2

24	Sulawesi Tengah	2
25	Banten	1
26	DI Yogyakarta	1
27	DK Jakarta	1
28	Gorontalo	1
29	Kalimantan Utara	1
30	Kep. Riau	1
31	Papua	1
32	Papua Selatan	1
33	Papua Tengah	1



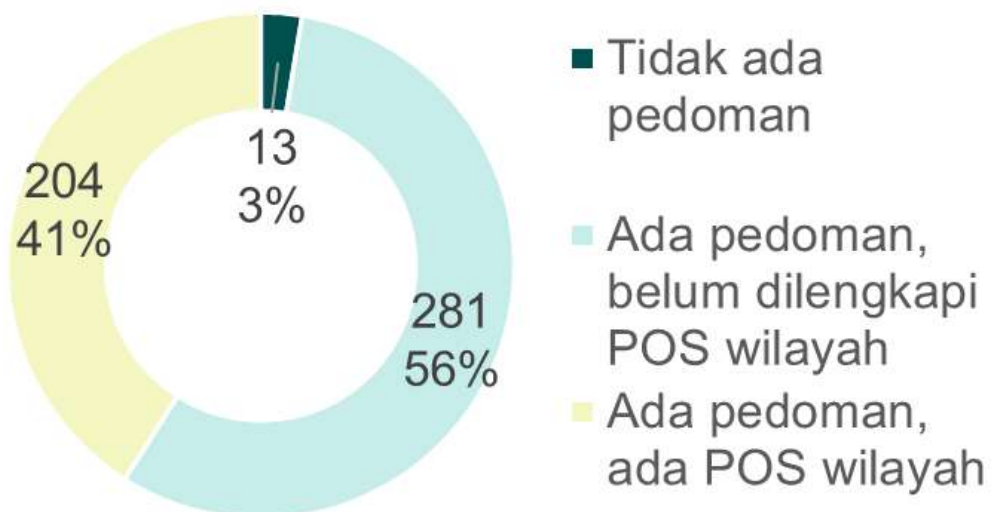
- d. Terdapat 118 Kabupaten/Kota (24%) dari 31 Provinsi yang belum pernah mengikuti simulasi/*table top exercise* (TTX)/*role play* penyelidikan epidemiologi Polio, dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 49 Persebaran Kabupaten/Kota yang belum pernah mengikuti simulasi/TTX/role play penyelidikan epidemiologi Polio

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Jawa Timur	10
2	Sumatera Utara	10
3	Sulawesi Selatan	9
4	Sumatera Barat	8
5	Bengkulu	7
6	Kalimantan Tengah	6
7	Sulawesi Utara	6
8	Aceh	5

9	Jawa Barat	5
10	Lampung	4
11	Nusa Tenggara Timur	4
12	Sulawesi Tengah	4
13	Kalimantan Barat	3
14	Kep. Riau	3
15	Maluku	3
16	Maluku Utara	3
17	Papua	3
18	Papua Barat	3
19	Papua Tengah	3
20	Sulawesi Tenggara	3
21	Jambi	2
22	Kalimantan Selatan	2
23	Papua Selatan	2
24	Riau	2
25	Sumatera Selatan	2
26	Banten	1
27	Gorontalo	1
28	Jawa Tengah	1
29	Kalimantan Timur	1
30	Kalimantan Utara	1
31	Kep. Bangka Belitung	1

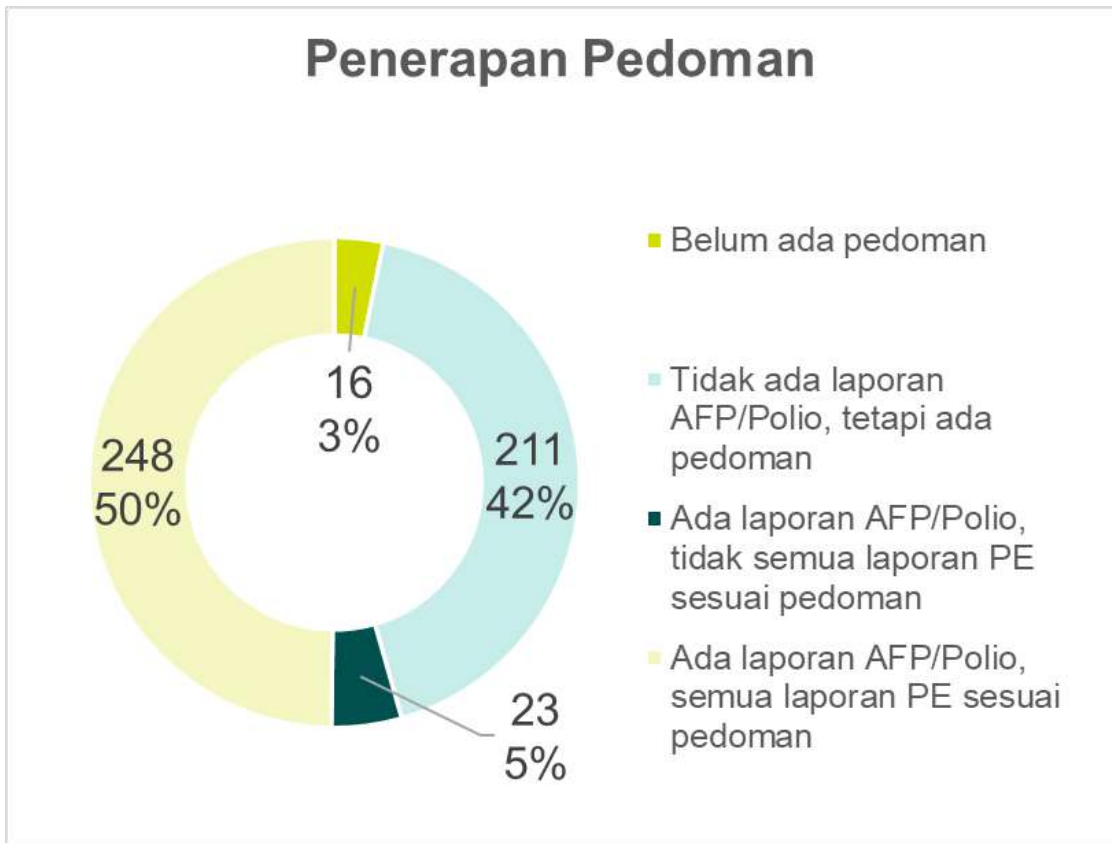
Pemanfaatan Pedoman Umum dan POS



- e. Terdapat 281 Kabupaten/Kota (56%) dari 36 Provinsi yang sudah memiliki pedoman umum namun belum melengkapi dengan prosedur operasional standar (POS) wilayah dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 50 Persebaran Kabupaten/Kota yang sudah memiliki pedoman umum namun belum melengkapi dengan POS wilayah

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Sumatera Utara	23
2	Nusa Tenggara Timur	17
3	Sulawesi Selatan	17
4	Jawa Tengah	16
5	Jawa Timur	14
6	Sulawesi Tenggara	14
7	Aceh	13
8	Sulawesi Tengah	11
9	Sumatera Selatan	11
10	Bengkulu	10
11	Maluku	9
12	Riau	9
13	Sumatera Barat	9
14	Jambi	8
15	Jawa Barat	8
16	Kalimantan Barat	8
17	Kalimantan Tengah	8
18	Maluku Utara	8
19	Sulawesi Utara	8
20	Kalimantan Selatan	6
21	Gorontalo	5
22	Kalimantan Timur	5
23	Kep. Bangka Belitung	5
24	Nusa Tenggara Barat	5
25	Sulawesi Barat	5
26	DI Yogyakarta	4
27	Papua	4
28	Papua Barat	4
29	Kep. Riau	3
30	Lampung	3
31	Papua Selatan	3
32	Bali	2
33	Papua Barat Daya	2
34	Papua Tengah	2
35	Banten	1
36	Kalimantan Utara	1



- f. Terdapat 16 Kabupaten/Kota (3%) dari 11 Provinsi yang menyatakan belum ada pedoman Polio. Selain itu, terdapat 23 Kabupaten/Kota (5%) dari 13 Provinsi yang sudah menemukan AFP/kasus Polio, namun tidak semua laporan penyelidikan epidemiologi dibuat sesuai pedoman.

Lampiran 5. Rekapitulasi Isu Prioritas Utama dan Rekomendasi atas Pemetaan Risiko Penyakit Infeksi Emerging Tahun 2024

A. 10 isu prioritas utama terkait pencegahan dan penanggulangan MERS dan rekomendasinya

Tabel 51 Isu Prioritas Utama terkait Pencegahan dan Penanggulangan MERS dan Rekomendasinya

No.	Isu Prioritas	Jumlah Kab/Kota	Rekomendasi
1.	Tim Gerak Cepat	260	<ul style="list-style-type: none"> ● Membuat atau revisi Surat Keputusan Tim Gerak Cepat di tingkat Kabupaten/Kota ● Koordinasi LPLS untuk pelibatan unsur surveilans vektor/entomolog dan tenaga laboratorium sebagai anggota TGC ● Usulan ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Bapelkes terkait kebutuhan pelatihan TGC bersertifikat
2.	Kompetensi Penyelidikan Epidemiologi MERS-CoV	245	<ul style="list-style-type: none"> ● Usulan anggaran/usulan ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Bapelkes terkait kebutuhan pelatihan/simulasi/<i>workshop/role play/tabletop exercise</i> penyelidikan epidemiologi MERS bagi anggota TGC di Dinas Kesehatan
3.	Rumah Sakit Rujukan	233	<ul style="list-style-type: none"> ● Advokasi ke Direktur RS atau Kepala Bidang Pelayanan Medik RS terkait kebutuhan SK Tim Penanggulangan Penyakit Potensial KLB di RS dan perawatan ruang isolasi ● Advokasi dan pendampingan ke RS terkait penyusunan SOP tatalaksana kasus dan pengelolaan spesimen MERS di RS ● Usulan anggaran/usulan ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Bapelkes terkait kebutuhan pelatihan tatalaksana kasus MERS bagi petugas di RS (dokter, perawat,

			<p>surveilans, dan tenaga laboratorium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi terkait penyiapan rumah sakit rujukan dan standardisasi ruang isolasi
4.	Rencana Kontijensi	176	<ul style="list-style-type: none"> • Telaah kepada Kepala Dinas Kesehatan terkait kebutuhan anggaran untuk pertemuan lintas program dan lintas sektor penyusunan dokumen rencana kontijensi • Usulan ke Dinas Kesehatan Provinsi terkait pelatihan/bimbingan teknis cara penyusunan dokumen rencana kontijensi atau contoh dokumen rencana kontijensi • Membentuk tim penyusunan dan menyusun draft dokumen rencana kontijensi • Kaji tiru ke Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen rencana kontijensi
5.	Promosi peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan	145	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan ke bidang perencanaan/Kepala Dinas Kesehatan terkait kebutuhan pengadaan media KIE MERS • Penyusunan iklan layanan masyarakat terkait MERS untuk disebarluaskan ke sosial media, fasilitas publik, dan media <i>broadcast</i> • Mengunduh dan distribusi media KIE MERS dari Kementerian Kesehatan
6.	Kapasitas Laboratorium	108	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan anggaran/usulan ke Dinas Kesehatan Provinsi terkait pelatihan pengelolaan spesimen bagi petugas laboratorium • Usulan pengadaan logistik spesimen <i>carrier</i> dan <i>media transport</i> (VTM) untuk spesimen MERS • Advokasi ke Kepala Dinas

			<p>Kesehatan Kab/Kota terkait pengadaan jasa ekspedisi terstandar di Dinas Kesehatan serta pembuatan MoU pengiriman spesimen dengan jasa ekspedisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat telaah ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan terkait lama keluarnya hasil pemeriksaan laboratorium (rerata lebih dari 10 hari)
7.	Anggaran Penanggulangan	95	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi ke LPLS untuk pemetaan anggaran yang dimiliki terkait kewaspadaan dan penanggulangan MERS • Advokasi ke Kepala Dinas Kesehatan/Pemkot/Bapelitbangda/ Lintas Sektor terkait untuk rencana penambahan anggaran kewaspadaan dan penanggulangan MERS-CoV
8.	Surveilans Rumah Sakit	69	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan penunjukkan petugas surveilans dan pengaktifan akun SKDR pada RS yang belum aktif • Usulan peningkatan kapasitas petugas surveilans di RS terkait SKDR baik melalui bimtek/ pelatihan/workshop/OJT
9.	Kebijakan Publik	40	Telaah kepada Kepala Dinkes terkait kebutuhan kebijakan kewaspadaan PIE termasuk MERS di tingkat Kabupaten/Kota baik dalam bentuk SE atau Perda
10.	Surveilans Pintu Masuk oleh BKK	24	Dinas Kesehatan Koordinasi dan melakukan pendekatan dengan B/BKK terkait pelaporan rutin mingguan dan <i>zero reporting</i>
11	Surveilans Wilayah oleh Puskesmas	22	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan LPLS terkait yang menangani kesehatan haji (seperti Yankes, Puskris, Kanwil Kemenag, dll) terkait dengan pelaksanaan surveilans kesehatan/pemantauan haji dan pelaporan SISKOHATKES

			<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan puskesmas terkait penganggaran dana BOK Puskesmas untuk pemantauan dan pelaporan pasca haji • Pembuatan SK Penyelenggaraan Haji untuk pemantauan kesehatan jamaah haji saat keberangkatan dan kepulangan • Sosialisasi terkait MERS untuk travel umrah dan kepada PPLN dari Timur Tengah bersama B/BKK
--	--	--	--

B. 10 isu prioritas utama terkait pencegahan dan penanggulangan Difteri dan rekomendasinya

Tabel 52 Isu Prioritas Utama terkait Pencegahan dan Penanggulangan Difteri dan Rekomendasinya

No.	Isu Prioritas	Jumlah Kab/Kota	Rekomendasi
1.	Cakupan Imunisasi DPT4	380	<ul style="list-style-type: none"> • Workshop penginputan data pada aplikasi ASIK dan monev penginputan data ASIK secara real time • Advokasi ke Dinas Pendidikan terkait memasukkan materi imunisasi dalam kurikulum serta menjadikan imunisasi lengkap sebagai syarat masuk sekolah (salah satunya dapat mengakses bahan ajar kesehatan di Merdeka Mengajar) • Koordinasi LPLS (termasuk Kementerian Agama) terkait perumusan strategi isu penolakan vaksin (Cth: fatwa halal-haram atau regulasi lainnya) • Membuat SK Kadinkes terkait penetapan petugas input ASIK di setiap Puskesmas • Bimtek kader kesehatan di posyandu untuk <i>sweeping</i>, <i>tracking</i>, dan edukasi serta membuat grup koordinasi dengan kader • Edukasi pentingnya imunisasi (termasuk <i>counterhoax</i> isu imunisasi seperti isu kepercayaan dan KIPI
2.	Cakupan Imunisasi DT	283	
3.	Cakupan Imunisasi DPT3	270	
4.	Cakupan Imunisasi Td	189	

			<p>serta imunisasi lanjutan) via sosial media (IG, TikTok, FB) dan penyuluhan langsung dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan pengadaan <i>refrigerator</i> dan <i>vaccine carrier</i> serta pemeliharannya • Usulan anggaran untuk pengadaan media KIE, pelaksanaan <i>sweeping</i> dan imunisasi kejar, dan edukasi • Validasi dan verifikasi data sasaran imunisasi dan koordinasi ke Dinkes Provinsi terkait kebutuhan vaksin
5.	Penyelidikan Epidemiologi	319	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat atau revisi Surat Keputusan Tim Gerak Cepat di tingkat Kabupaten/Kota • Koordinasi LPLS untuk pelibatan unsur tenaga medis, surveilans vektor/entomolog dan tenaga laboratorium sebagai anggota TGC • Usulan ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Bapelkes terkait kebutuhan pelatihan TGC dan simulasi PE Difteri bersertifikat • Penyusunan dokumen SOP PE dan Penanggulangan KLB berbasis wilayah Kabupaten/Kota • Pendataan anggota TGC yang belum mendapatkan pelatihan bersertifikat
6.	Analisis Ancaman Difteri di Wilayah	249	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun analisis beban kerja petugas surveilans Dinas Kesehatan sebagai bahan dasar pengajuan perlunya penambahan petugas surveilans di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota • Usulan ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Bapelkes terkait kebutuhan pelatihan SKDR bersertifikat (termasuk analisis data dan cara pembuatan buletin) dan workshop SKDR • Koordinasi ke pengelola sosial media/website Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, atau radio/televisi

			<p>setempat terkait publikasi hasil analisis SKDR ke media</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat sosial media/website Dinas Kesehatan • Distribusi link <i>google drive</i> pedoman dan format pelaporan surveilans PD3I
7.	Deteksi Dini Difteri di Fasyankes	225	<ul style="list-style-type: none"> • Monev dan bimtek SKDR (terutama penemuan kasus Difteri dan cara analisis) pada petugas surveilans di PKM dan RS • Usulan anggaran/usulan ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Bapelkes terkait pelatihan SKDR bersertifikat bagi petugas surveilans • Koordinasi ke Direktur RS atau surat edaran dari Kadinkes ke Direktur RS terkait pentingnya pelaporan rutin SKDR • Usulan ke Dinkes Provinsi terkait aktivasi akun SKDR beberapa RS yang belum aktif • Membuat Surat Edaran Kadinkes terkait kewajiban pelaporan SKDR atau surat teguran pada faskes dengan kelengkapan <100%
8.	Tatalaksana Kasus di RS	212	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi ke Direktur RS atau Kepala Bidang Pelayanan Medik RS terkait kebutuhan SK Tim Penanggulangan Penyakit Potensial KLB di RS dan perawatan ruang isolasi • Advokasi dan pendampingan ke RS terkait penyusunan SOP tatalaksana kasus dan pengelolaan spesimen Difteri di RS • Usulan anggaran/usulan ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Bapelkes terkait kebutuhan pelatihan tatalaksana kasus PD3I bagi petugas di RS (dokter, perawat, surveilans, dan tenaga lab) • Koordinasi dengan Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi terkait penyiapan rumah sakit rujukan dan standarisasi ruang isolasi
9.	Kapasitas Laboratorium	124	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi pengadaan spesimen

			<p>carrier PD3I sesuai standar dan logistik lainnya termasuk reagen dan media transport amies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan SOP pengelolaan spesimen PD3I • Usulan anggaran untuk pengiriman spesimen • Usulan ke Dinkes Provinsi atau Bapelkes terkait kebutuhan pelatihan pengelolaan spesimen PD3I termasuk Difteri bagi petugas laboratorium PKM, RS, dan Labkesda.
10.	Anggaran Penanggulangan	96	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan anggaran untuk pelatihan/OJT petugas surveilans, imunisasi, pranata laboratorium, medis, dan petugas lain yang dibutuhkan di dinas kesehatan, PKM, RS, dan Labkesda. • Usulan anggaran untuk pengadaan logistik PD3I, pengiriman spesimen, dan media KIE. • Advokasi dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait Dana Desa untuk mendukung Kesiapsiagaan Difteri.

C. 10 isu prioritas utama terkait pencegahan dan penanggulangan Polio dan rekomendasinya

Tabel 53 Isu Prioritas Utama terkait Pencegahan dan Penanggulangan Polio dan Rekomendasinya

No.	Isu Prioritas	Jumlah Kab/Kota	Rekomendasi
1.	Perilaku Sehat (Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Air Minum dan Makan Keluarga, dan Stop Buang Air Besar Sembarangan)	391	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan dan pemetaan Desa/Kelurahan yang belum memiliki akses air bersih dan jamban sehat • Edukasi perilaku sehat via sosial media (Instagram, TikTok, Facebook), penyuluhan langsung, serta pemicuan STBM di sekolah dan masyarakat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kader,

			<p>gerakan pemuda</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Penyusunan media KIE termasuk iklan layanan masyarakat (ILM) terkait perilaku sehat ● Koordinasi lintas program dan lintas sektor (Camat, Lurah, Dinas Pekerjaan Umum, Perusahaan Daerah Air Minum, dan Perumahan Rakyat, <i>Corporate Social Responsibility [CSR]</i> Perusahaan) terkait dukungan pembangunan jamban sehat ber-<i>septic tank</i>, fasilitas cuci tangan, serta penyediaan air bersih ● <i>Refreshing</i> petugas sanitarian serta monitoring dan evaluasi terkait pelaporan sistem informasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM (SiSTBM) ● Penyusunan surat edaran pelibatan lintas program dan lintas sektor di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat dalam mendukung capaian STBM ● Advokasi ke Kepala Puskesmas terkait kebutuhan laptop bagi petugas sanitarian di Puskesmas (untuk pelaporan SiSTBM) ● Usulan pelatihan komunikasi risiko bagi penyuluh kesehatan dan kader dalam mendukung promosi kesehatan terkait STBM
2.	Cakupan Imunisasi Polio 4	328	<ul style="list-style-type: none"> ● Menyusun peraturan daerah terkait kewaspadaan PD3I termasuk kewajiban imunisasi bagi anak-anak ● Identifikasi dan analisis data terkait potensi pelaksanaan imunisasi kejar ● Usulan pengadaan <i>on the job training microplanning</i> program imunisasi, dan cara komunikasi interpersonal/perubahan perilaku terhadap pengelola imunisasi dan juru imunisasi

			<ul style="list-style-type: none">• Advokasi ke Dinas Pendidikan terkait memasukkan materi imunisasi dalam kurikulum serta menjadikan imunisasi lengkap sebagai syarat masuk PAUD/sekolah (salah satunya dapat mengakses bahan ajar kesehatan di Merdeka Mengajar)• Advokasi ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait memasukkan materi imunisasi pada pendidikan catin• Edukasi pentingnya imunisasi (termasuk <i>counterhoax</i> isu imunisasi seperti isu kepercayaan dan efek samping) via sosial media (Instagram, TikTok, Facebook) dan penyuluhan langsung dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kader, dan gerakan pemuda• Koordinasi lintas program dan lintas sektor termasuk Kementerian Agama terkait perumusan strategi isu penolakan vaksin, salah satunya terkait sosialisasi kembali Fatwa MUI No. 16 Tahun 2005 tentang Penggunaan Vaksin Polio Oral dan Fatwa MUI tahun 2002 tentang Penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV)• Pelibatan kader, bidan, dan Saka Bhakti Husada (SBH) dalam penginputan data ASIK• <i>Workshop</i> penginputan data pada aplikasi ASIK dan monitoring-evaluasi penginputan data ASIK (termasuk mekanisme <i>reward-punishment</i>)• Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan terkait penetapan petugas input ASIK di setiap Puskesmas• Usulan pengadaan <i>cold chain (refrigerator)</i> dan <i>vaccine carrier</i> serta pemeliharannya
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • Usulan anggaran untuk pengadaan media KIE, pelaksanaan <i>sweeping</i> dan imunisasi kejar serta edukasi • Validasi dan verifikasi data sasaran imunisasi • Koordinasi dengan Dinas Kominfo dan Kemkomdigi terkait peningkatan akses internet • Koordinasi dengan Dinas Dukcapil dan Kemendagri terkait regulasi dan mekanisme pembuatan NIK untuk bayi baru lahir • Koordinasi dengan Pemerintah Desa terkait pembuatan spanduk <i>defaulter tracking</i>
3.	Sarana Air Minum Tidak Diperiksa dan Tidak Memenuhi Syarat	316	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan dan pemetaan lokasi sarana air minum di wilayah sebagai data dukung dalam perencanaan sanitarian kit dan reagen • Membuat analisis beban kerja terkait kebutuhan penambahan petugas sanitarian • Usulan ke Dinas Kesehatan Provinsi terkait pengadaan sanitarian kit, reagen, dan insentif kader untuk pemeriksaan sarana air minum di Puskesmas • Usulan anggaran untuk kalibrasi/<i>maintenance</i> sanitarian kit di Puskesmas • Edukasi dan himbauan serta regulasi ke pengelola sarana air minum untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan rutin • Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup/Dinas PUPR terkait pertimbangan pencabutan izin penyedia air minum apabila tidak memenuhi syarat • <i>On the job training</i> petugas sanitarian di Puskesmas terkait cara pengambilan dan pemeriksaan sampel air melibatkan Laboratorium

			<p>Kesehatan Masyarakat atau Laboratorium Kesehatan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Pemerintah Daerah terkait pemberian subsidi pemeriksaan sarana air minum
4.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	308	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat atau revisi Surat Keputusan Tim Gerak Cepat di tingkat Kabupaten/Kota • Koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk pelibatan unsur surveilans vektor/entomolog dan tenaga laboratorium sebagai anggota TGC • Usulan ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Bapelkes terkait kebutuhan pelatihan TGC dan simulasi PE Polio bersertifikat • Penyusunan dokumen SOP PE dan Penanggulangan KLB berbasis wilayah Kabupaten/Kota • Pendataan anggota TGC yang belum mendapatkan pelatihan bersertifikat
5.	Surveilans (SKD)	277	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun analisis beban kerja petugas surveilans Dinas Kesehatan sebagai bahan dasar pengajuan perlunya penambahan petugas surveilans di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota • Usulan ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Bapelkes terkait kebutuhan pelatihan SKDR bersertifikat (termasuk cara pembuatan buletin dan peta tematik) dan workshop SKDR • Koordinasi ke pengelola sosial media/website Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, atau radio setempat terkait publikasi hasil analisis SKDR ke media • Usulan ke Kepala Dinas Kesehatan terkait pembuatan atau aktivasi website/sosial

			<p>media Dinas Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribusi link <i>google drive</i> pedoman dan format pelaporan surveilans PD3I • Sosialisasi kode ICD-10 yang termasuk ke dalam AFP
6.	Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Puskesmas	205	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Surat Edaran atau surat himbauan dari Kepala Dinas Kesehatan untuk Kepala Puskesmas terkait kewajiban buletin SKDR mingguan yang dilengkapi analisis menurut Desa/Kelurahan • Menyusun analisis beban kerja petugas surveilans Puskesmas sebagai bahan dasar pengajuan perlunya penambahan petugas surveilans di Puskesmas • <i>Desk review/monitoring</i> dan evaluasi serta <i>refreshing</i> ke petugas surveilans di Puskesmas terkait cara analisis SKDR rutin • Advokasi dan koordinasi ke Dinas Kominfo dan Kemkomdigi terkait usulan 1 Puskesmas, 1 WIFI • Usulan ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Bapelkes terkait kebutuhan pelatihan SKDR bersertifikat (termasuk cara pembuatan buletin dan peta tematik) dan workshop SKDR
7.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	128	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi dan koordinasi ke Direktur RS terkait kebutuhan tim penanggulangan kasus penyakit infeksi emerging (beserta SK-nya) dan standar operasional prosedur (SOP) tatalaksana kasus dan pengelolaan spesimen, serta peningkatan standar ruang isolasi • Melakukan pendataan tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan yang belum mendapatkan pelatihan pengendalian kasus penyakit infeksi emerging • Usulan pelatihan pengendalian

			kasus PIE terhadap tenaga kesehatan di rumah sakit ke Dinas Kesehatan Provinsi
8.	Kapasitas Laboratorium	116	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan anggaran untuk pelatihan tenaga laboratorium Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD terkait pengelolaan spesimen • Advokasi ke Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait pengadaan jasa ekspedisi terstandar di Dinas Kesehatan serta pembuatan MoU pengiriman spesimen dengan jasa ekspedisi • Advokasi pengadaan anggaran untuk spesimen carrier termasuk media transport • Membuat telaah ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan terkait lama keluarnya hasil pemeriksaan laboratorium (rerata lebih dari 30 hari)
9.	Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Rumah Sakit	109	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan aktivasi akun SKDR RS ke Dinas Kesehatan Provinsi • Advokasi ke Direktur RS terkait kebutuhan pembentukan tim SKDR di rumah sakit (termasuk SK-nya) dan pelaporan rutin mingguan via SKDR • Usulan ke Dinas Kesehatan Provinsi terkait kebutuhan pelatihan SKDR bersertifikat • Monitoring dan evaluasi SKDR serta <i>hospital record review</i> di RS
10.	Pelaksanaan Deteksi Dini Polio di Lingkungan	56	Koordinasi dengan Balai Besar/Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat di wilayahnya terkait pemilihan lokus untuk pemeriksaan polio lingkungan

Lampiran 6. Daftar Kabupaten/Kota dengan Hasil Pemetaan Risiko Perlu Menjadi Perhatian

1. Daftar Kabupaten/Kota yang sudah memiliki tim penanggulangan penyakit infeksi emerging, namun ada anggota dalam tim yang belum terlatih (n=394 Kabupaten/Kota)

Tabel 54 Daftar Kabupaten/Kota yang sudah memiliki tim penanggulangan PIE namun ada anggota tim yang belum terlatih

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Jawa Timur	35	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung
2	Sumatera Utara	25	Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah
3	Jawa Tengah	23	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Grobogan, Jepara, Kebumen, Kendal, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kudus, Magelang, Pekalongan, Pematang, Purbalingga, Purworejo, Tegal, dan Wonosobo

4	Jawa Barat	22	Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, dan Sumedang
5	Aceh	19	Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Subulussalam, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulue
6	Sulawesi Selatan	19	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, dan Wajo
7	Nusa Tenggara Timur	18	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kota Kupang, Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara
8	Lampung	13	Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulangbawang, dan Way Kanan
9	Sulawesi Utara	13	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang

			Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kota Bitung, Kota Tomohon, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, dan Siau Tagulandang Biaro
10	Sumatera Barat	13	Agam, Dharmasraya, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, dan Tanah Datar
11	Sumatera Selatan	13	Banyu Asin, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, dan Penukal Abab Lematang Ilir
12	Kalimantan Barat	12	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, dan Sanggau
13	Sulawesi Tengah	12	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Kota Palu, Morowali, Morowali Utara, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, dan Toli-Toli
14	Sulawesi Tenggara	12	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Kota Baubau, Kota Kendari, dan Muna Barat
15	Kalimantan Selatan	11	Balangan, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarbaru, Kotabaru, Tabalong,

			Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tapin
16	Riau	11	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Siak
17	Jambi	10	Batang Hari, Bungo, Kerinci, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur
18	Kalimantan Tengah	10	Barito Selatan, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, dan Sukamara
19	Kalimantan Timur	9	Berau, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Paser, dan Penajam Paser Utara
20	Maluku	8	Buru Selatan, Kota Ambon, Kota Tual, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur
21	Maluku Utara	8	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Pulau Morotai
22	Nusa Tenggara Barat	8	Bima, Dompu, Kota Bima, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Sumbawa Barat
23	Bali	7	Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Klungkung, Kota Denpasar, dan Tabanan
24	Kep. Bangka Belitung	7	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah,

			Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang
25	Banten	6	Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Lebak, Pandeglang, dan Serang
26	Gorontalo	6	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, dan Pohuwato
27	Kep. Riau	6	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Kota Batam, Lingga, dan Natuna
28	Sulawesi Barat	6	Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar
29	Bengkulu	5	Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Mukomuko, dan Seluma
30	Kalimantan Utara	5	Bulungan, Kota Tarakan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung
31	Papua	5	Biak Numfor, Keerom, Kota Jayapura, Sarmi, dan Supiori
32	Papua Barat	4	Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama
33	Papua Barat Daya	4	Kota Sorong, Raja Ampat, Sorong, dan Tambrau
34	DI Yogyakarta	3	Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kulon Progo
35	Papua Selatan	3	Asmat, Boven Digoel, dan Merauke
36	Papua Tengah	2	Dogiyai dan Paniai
37	DK Jakarta	1	Kepulauan Seribu

2. Daftar Kabupaten/Kota yang sudah memiliki tim SKDR di Dinas Kesehatan namun baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat (n=243 Kabupaten/Kota)

Tabel 55 Daftar Kabupaten/Kota yang sudah memiliki tim SKDR di Dinas Kesehatan namun baru sebagian kecil memiliki sertifikat

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Jawa Timur	18	Bondowoso, Gresik, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sampang, Situbondo, Trenggalek, dan Tuban
2	Nusa Tenggara Timur	17	Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, dan Timor Tengah Utara
3	Sumatera Barat	14	Dharmasraya, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Solok, dan Solok Selatan
4	Aceh	13	Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam, dan Simeulue
5	Kalimantan Tengah	12	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, dan Sukamara
6	Sulawesi Tengah	11	Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, dan Toli-Toli
7	Maluku	10	Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kota Ambon, Maluku Barat

			Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur
8	Sulawesi Selatan	10	Bantaeng, Bulukumba, Gowa, Luwu Timur, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Tana Toraja, dan Toraja Utara
9	Sumatera Utara	10	Kota Padangsidempuan, Kota Pematangsiantar, Kota Tebing Tinggi, Nias Barat, Nias Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Toba
10	Sulawesi Tenggara	9	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Muna Barat, dan Wakatobi
11	Kalimantan Barat	8	Kapuas Hulu, Ketapang, Kota Singkawang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Sekadau, dan Sintang
12	Lampung	8	Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesisir Barat, Tanggamus, dan Way Kanan
13	Kalimantan Selatan	7	Balangan, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarbaru, Tabalong, dan Tanah Laut
14	Papua Barat	7	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama
15	Riau	7	Bengkalis, Indragiri Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Siak
16	Sulawesi Utara	7	Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan

			Talaud, Kota Tomohon, dan Minahasa
17	Bengkulu	6	Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Lebong, Mukomuko, Rejang Lebong, dan Seluma
18	Jawa Barat	6	Bandung Barat, Ciamis, Kota Bekasi, Purwakarta, Sukabumi, dan Tasikmalaya
19	Jawa Tengah	6	Blora, Boyolali, Kendal, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, dan Pekalongan
20	Kalimantan Timur	6	Berau, Kota Samarinda, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, dan Penajam Paser Utara
21	Sumatera Selatan	6	Kota Pagar Alam, Kota Palembang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas Utara
22	Kep. Riau	5	Karimun, Kepulauan Anambas, Kota Tanjung Pinang, Lingga, dan Natuna
23	Maluku Utara	5	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Kota Ternate
24	Bali	4	Bangli, Gianyar, Kota Denpasar, dan Tabanan
25	Papua	4	Biak Numfor, Kota Jayapura, Mamberamo Raya, dan Supiori
26	Papua Barat Daya	4	Kota Sorong, Raja Ampat, Sorong, dan Sorong Selatan
27	DI Yogyakarta	3	Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kulon Progo
28	Gorontalo	3	Boalemo, Bone Bolango, dan Kota Gorontalo
29	Jambi	3	Bungo, Kota Jambi, dan Muaro Jambi
30	Kalimantan Utara	3	Kota Tarakan, Malinau, dan Tana

			Tidung
31	Papua Selatan	3	Asmat, Boven Digoel, dan Merauke
32	Papua Tengah	3	Dogiyai, Mimika, dan Nabire
33	Banten	2	Kota Serang dan Lebak
34	Kep. Bangka Belitung	1	Bangka Barat
35	Nusa Tenggara Barat	1	Bima
36	Sulawesi Barat	1	Pasangkayu

3. Daftar Kabupaten/Kota menyatakan belum pernah dilakukan analisis SKDR (n=39 Kabupaten/Kota)

Tabel 56 Persebaran Kabupaten/Kota menyatakan belum pernah dilakukan analisis SKDR

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Aceh	4	Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Subulussalam
2	Bengkulu	4	Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, dan Seluma
3	Jawa Tengah	3	Jejara, Kendal, dan Klaten
4	Maluku	3	Buru, Buru Selatan, dan Seram Bagian Barat
5	Papua	3	Jayapura, Mamberamo Raya, dan Supiori
6	Sumatera Barat	3	Agam, Kepulauan Mentawai, dan Lima Puluh Kota
7	Kalimantan Tengah	2	Kotawaringin Timur dan Murung Raya
8	Maluku Utara	2	Halmahera Timur dan Pulau Taliabu
9	Papua Barat	2	Pegunungan Arfak dan Teluk Bintuni
10	Papua Tengah	2	Deiyai dan Dogiyai

11	Sulawesi Selatan	2	Gowa dan Takalar
12	Jambi	1	Merangin
13	Kalimantan Selatan	1	Hulu Sungai Selatan
14	Kalimantan Timur	1	Kota Samarinda
15	Kep. Riau	1	Natuna
16	Nusa Tenggara Timur	1	Malaka
17	Sumatera Selatan	1	Musi Rawas Utara
18	Sumatera Utara	1	Humbang Hasundutan

4. Daftar Kabupaten/Kota yang fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya tidak memiliki petugas SKDR bersertifikat (n=143 Kabupaten/Kota)

Tabel 57 Daftar Kabupaten/Kota yang fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya tidak memiliki petugas SKDR bersertifikat

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Sumatera Utara	16	Batu Bara, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Kota Binjai, Kota Padangsidempuan, Kota Pematang Siantar, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Samosir, Tapanuli Selatan, dan Toba
2	Jawa Timur	13	Blitar, Kota Batu, Kota Malang, Lamongan, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pamekasan, Pasuruan, Sumenep, Tuban, dan Tulungagung
3	Sumatera Barat	12	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Padang Pariaman, Pasaman, Sijunjung, Solok, dan Solok Selatan

4	Nusa Tenggara Timur	9	Alor, Lembata, Manggarai, Nagekeo, Ngada, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sumba Timur
5	Riau	8	Indragiri Hilir, Kampar, Kota Dumai, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Siak
6	Jawa Barat	7	Bandung Barat, Ciamis, Garut, Karawang, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Purwakarta
7	Papua Barat	6	Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Teluk Bintuni
8	Aceh	5	Aceh Barat, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Kota Banda Aceh, dan Kota Lhokseumawe
9	Bengkulu	5	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Kaur, Kota Bengkulu, dan Seluma
10	Jawa Tengah	5	Kendal, Kota Pekalongan, Pekalongan, Pemalang, dan Wonosobo
11	Sumatera Selatan	5	Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Ogan Komering Ilir
12	Kep. Riau	4	Karimun, Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Lingga
13	Sulawesi Tenggara	4	Buton, Buton Selatan, Buton Utara, dan Wakatobi
14	Gorontalo	3	Boalemo, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara
15	Kalimantan Barat	3	Ketapang, Sekadau, dan Sintang
16	Lampung	3	Lampung Barat, Tulang Bawang, dan Way Kanan
17	Papua Barat	3	Raja Ampat, Sorong, dan

	Daya		Sorong Selatan
18	Papua Selatan	3	Asmat, Boven Digoel, dan Merauke
19	Papua Tengah	3	Deiyai, Dogiyai, dan Paniai
20	Sulawesi Utara	3	Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, dan Kota Manado
21	Bali	2	Bangli dan Tabanan
22	DI Yogyakarta	2	Bantul dan Kota Yogyakarta
23	Jambi	2	Merangin dan Tanjung Jabung Timur
24	Kalimantan Selatan	2	Balangan dan Kotabaru
25	Kalimantan Timur	2	Kota Samarinda dan Kutai Barat
26	Maluku	2	Kota Ambon dan Maluku Tenggara Barat
27	Maluku Utara	2	Halmahera Timur dan Pulau Taliabu
28	Papua	2	Mamberamo Raya dan Supiori
29	Sulawesi Selatan	2	Gowa dan Tana Toraja
30	Banten	1	Lebak
31	Kalimantan Tengah	1	Murung Raya
32	Kalimantan Utara	1	Tana Tidung
33	Kep. Bangka Belitung	1	Bangka Selatan
34	Sulawesi Tengah	1	Buol

5. Daftar Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya tidak pernah melakukan analisis rutin SKDR (n=158 Kabupaten/Kota)

Tabel 58 Daftar Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya tidak pernah melakukan analisis rutin SKDR

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Sumatera Utara	17	Batu Bara, Humbang Hasundutan, Karo, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Nias Selatan, Samosir, Serdang Bedagai, dan Tapanuli Selatan
2	Maluku	9	Buru, Buru Selatan, Kota Ambon, Kota Tual, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur
3	Sumatera Barat	9	Agam, Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Sijunjung
4	Aceh	8	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, Gayo Lues, Kota Subulussalam, dan Simeulue
5	Sulawesi Selatan	8	Bantaeng, Bone, Gowa, Kepulauan Selayar, Kota Palopo, Kota Parepare, Sinjai, dan Toraja Utara
6	Bengkulu	7	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong, dan Seluma
7	Nusa Tenggara	7	Flores Timur, Malaka,

	Timur		Manggarai, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur
8	Papua	7	Biak Numfor, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura, Mamberamo Raya, Sarmi, dan Supiori
9	Sumatera Selatan	7	Kota Prabumulih, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, dan Penukal Abab Lematang Ilir
10	Jawa Tengah	6	Batang, Jepara, Karanganyar, Klaten, Kota Pekalongan, dan Pekalongan
11	Kep. Riau	6	Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Kota Batam, Lingga, dan Natuna
12	Jambi	5	Batang Hari, Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo
13	Jawa Barat	4	Indramayu, Kota Cirebon, Majalengka, dan Sukabumi
14	Jawa Timur	4	Kota Probolinggo, Madiun, Nganjuk, dan Pamekasan
15	Kalimantan Timur	4	Berau, Kota Samarinda, Kutai Barat, dan Paser
16	Papua Barat	4	Fakfak, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Teluk Bintuni
17	Sulawesi Tengah	4	Buol, Morowali Utara, Parigi Moutong, dan Sigi
18	Sulawesi Tenggara	4	Kolaka Timur, Konawe Selatan, Muna, dan Wakatobi
19	Bali	3	Badung, Karangasem, dan Tabanan
20	Kalimantan	3	Kota Palangkaraya,

	Tengah		Kotawaringin Timur, dan Seruyan
21	Kep. Bangka Belitung	3	Bangka, Bangka Selatan, dan Belitung Timur
22	Maluku Utara	3	Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu
23	Papua Barat Daya	3	Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Tambrauw
24	Papua Tengah	3	Deiyai, Nabire, dan Paniai
25	Sulawesi Barat	3	Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar
26	Sulawesi Utara	3	Kep. Talaud, Kota Bitung, dan Minahasa Selatan
27	Gorontalo	2	Boalemo dan Gorontalo Utara
28	Kalimantan Barat	2	Sekadau dan Sintang
29	Lampung	2	Lampung Barat dan Way Kanan
30	Nusa Tenggara Barat	2	Bima dan Sumbawa
31	Papua Selatan	2	Boven Digoel dan Merauke
32	DI Yogyakarta	1	Gunung Kidul
33	Kalimantan Selatan	1	Tabalong
34	Kalimantan Utara	1	Tana Tidung
35	Riau	1	Kuantan Singingi

6. Daftar Kabupaten/Kota yang menyatakan terdapat fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan/atau Rumah Sakit) di wilayahnya yang tidak pernah membuat laporan SKDR (n=118 Kabupaten/Kota)

Tabel 59 Daftar Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya tidak pernah membuat laporan SKDR

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Sumatera Utara	15	Asahan, Batu Bara, Karo, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Nias Selatan, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Utara, dan Toba
2	Aceh	11	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Bireuen, Gayo Lues, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam, dan Nagan Raya
3	Sumatera Selatan	9	Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih, Muara Enim, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, dan Penukal Abab Lematang Ilir
4	Jawa Tengah	7	Banyumas, Brebes, Jepara, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Pemalang, dan Rembang
5	Jawa Barat	7	Bandung Barat, Bekasi, Indramayu, Kota Bekasi, Kota Depok, Sukabumi, dan Tasikmalaya
6	Sulawesi Selatan	6	Bone, Gowa, Sidenreng Rappang, Sinjai, Tana Toraja, dan Toraja Utara
7	Sulawesi Barat	5	Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar

8	Maluku	5	Kota Ambon, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur
9	Jawa Timur	4	Gresik, Madiun, Pamekasan, dan Probolinggo
10	Papua	4	Biak Numfor, Jayapura, Keerom, dan Supiori
11	Sulawesi Tenggara	4	Buton Tengah, Kolaka, Muna, dan Wakatobi
12	Nusa Tenggara Timur	4	Ende, Lembata, Manggarai Barat, dan Rote Ndao
13	Kalimantan Selatan	4	Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarbaru, dan Kotabaru
14	Riau	4	Bengkalis, Kota Dumai, Kuantan Singingi, dan Rokan Hilir
15	Jambi	3	Merangin, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Barat
16	Kalimantan Tengah	3	Kapuas, Kota Palangkaraya, dan Pulang Pisau
17	Papua Tengah	3	Deiyai, Dogiyai, dan Nabire
18	Sulawesi Utara	3	Kep. Talaud, Kota Manado, dan Minahasa
19	Bengkulu	2	Mukomuko dan Seluma
20	Kalimantan Timur	2	Berau dan Penajam Paser Utara
21	Kep. Riau	2	Kep. Anambas dan Kota Batam
22	Maluku Utara	2	Halmahera Barat dan Halmahera Timur
23	Sumatera Barat	2	Kota Padang dan Pasaman
24	Papua Barat	1	Teluk Bintuni

25	Papua Barat Daya	1	Tambrauw
26	Sulawesi Tengah	1	Morowali Utara
27	Bali	1	Jembrana
28	Banten	1	Lebak
29	Gorontalo	1	Bone Bolango
30	Kalimantan Barat	1	Kota Singkawang

7. Daftar Kabupaten/Kota yang belum memiliki Tim Gerak Cepat atau sudah memiliki Tim Gerak Cepat namun belum memenuhi unsur sesuai ketentuan (n=191 Kabupaten/Kota)

Tabel 60 Daftar Kabupaten/Kota yang belum memiliki TGC atau sudah memiliki TGC namun belum memenuhi unsur sesuai ketentuan

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Sumatera Utara	27	Asahan, Batu Bara, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidempuan, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Toba
2	Jawa Barat	12	Bekasi, Ciamis, Cianjur, Indramayu, Karawang, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kuningan, Majalengka, Sukabumi, dan Tasikmalaya
3	Jawa Timur	12	Bondowoso, Gresik, Kota Blitar, Lumajang, Madiun,

			Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pamekasan, Sampang, Situbondo, dan Trenggalek
4	Aceh	11	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Bener Meriah, Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Kota Subulussalam, dan Simeulue
5	Sumatera Barat	11	Agam, Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, dan Solok Selatan
6	Sulawesi Selatan	10	Bone, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Kota Palopo, Kota Parepare, Takalar, Tana Toraja, dan Toraja Utara
7	Jawa Tengah	7	Banyumas, Boyolali, Cilacap, Grobogan, Karanganyar, Kota Pekalongan, dan Pemasang
8	Kalimantan Barat	7	Kapuas Hulu, Kayong Utara, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Landak, Sambas, dan Sintang
9	Sulawesi Tenggara	7	Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Utara, Kota Kendari, dan Muna
10	Sulawesi Utara	7	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Minahasa Selatan, dan Minahasa Tenggara
11	Bengkulu	6	Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Kota Bengkulu, Mukomuko, dan Seluma

12	Gorontalo	6	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, dan Pohuwato
13	Kalimantan Tengah	6	Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas, Kota Palangka Raya, Murung Raya, dan Sukamara
14	Papua	6	Jayapura, Keerom, Kota Jayapura, Mamberamo Raya, Sarmi, dan Supiori
15	Riau	6	Indragiri Hilir, Kampar, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kuantan Singingi, dan Siak
16	Banten	5	Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Pandeglang, Serang, dan Tangerang
17	Sulawesi Barat	5	Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar
18	Kalimantan Timur	4	Kota Samarinda, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara
19	Maluku	4	Buru, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, dan Seram Bagian Barat
20	Papua Tengah	4	Deiyai, Dogiyai, Nabire, dan Paniai
21	Kep. Riau	3	Bintan, Kep. Anambas, dan Kota Batam
22	Nusa Tenggara Timur	3	Alor, Manggarai Timur, dan Sikka
23	Papua Barat	3	Fakfak, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak
24	Papua Selatan	3	Boven Digoel, Mappi, dan Merauke
25	Sumatera	3	Kota Pagar Alam, Lahat, dan

	Selatan		Musi Rawas Utara
26	Jambi	2	Merangin dan Muaro Jambi
27	Kep. Bangka Belitung	2	Belitung dan Belitung Timur
28	Lampung	2	Lampung Selatan dan Pesawaran
29	Maluku Utara	2	Halmahera Selatan dan Pulau Taliabu
30	Bali	1	Kota Denpasar
31	DI Yogyakarta	1	Bantul
32	Kalimantan Utara	1	Tana Tidung
33	Papua Barat Daya	1	Sorong Selatan
34	Sulawesi Tengah	1	Banggai Laut

8. Daftar Kabupaten/Kota dengan anggota TGC belum ada yang terlatih dan bersertifikat (n=238 Kabupaten/Kota)

Tabel 61 Daftar Kabupaten/Kota dengan anggota TGC belum ada yang terlatih dan bersertifikat

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Sumatera Utara	27	Asahan, Batu Bara, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidempuan, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Toba
2	Jawa Timur	18	Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Gresik, Jember,

			Kediri, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pamekasan, Sampang, Situbondo, Sumenep, dan Trenggalek
3	Jawa Barat	16	Bekasi, Ciamis, Cianjur, Indramayu, Karawang, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Depok, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya
4	Sulawesi Selatan	13	Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Kota Palopo, Kota Parepare, Luwu Utara, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, dan Toraja Utara
5	Sumatera Barat	12	Agam, Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, dan Solok Selatan
6	Aceh	11	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Pidie, dan Simeulue
7	Jawa Tengah	10	Banyumas, Batang, Boyolali, Cilacap, Grobogan, Karanganyar, Kota Pekalongan, Pemasang, Purbalingga, dan Wonosobo
8	Sulawesi Tenggara	9	Buton, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Utara, Kota Kendari, Muna, dan Wakatobi

9	Kalimantan Barat	8	Kapuas Hulu, Ketapang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Landak, Sambas, Sekadau, dan Sintang
10	Bengkulu	7	Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Kota Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong, dan Seluma
11	Nusa Tenggara Timur	7	Alor, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Selatan
12	Riau	7	Indragiri Hilir, Kampar, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kuantan Singingi, Pelalawan, dan Siak
13	Sulawesi Utara	7	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Minahasa Selatan, dan Minahasa Tenggara
14	Gorontalo	6	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, dan Pohuwato
15	Kalimantan Tengah	6	Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas, Kota Palangka Raya, Murung Raya, dan Sukamara
16	Maluku	6	Buru, Kepulauan Aru, Kota Tual, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, dan Seram Bagian Barat
17	Sumatera Selatan	6	Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Lahat, Muara Enim, Musi Rawas Utara, dan Ogan Komering Ulu Timur
18	Banten	5	Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Pandeglang, Serang,

			dan Tangerang
19	Maluku Utara	5	Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Kota Ternate, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu
20	Papua	5	Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya, Sarmi, dan Supiori
21	Papua Tengah	5	Deiyai, Dogiyai, Mimika, Nabire, dan Paniai
22	Sulawesi Barat	5	Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar
23	Kalimantan Timur	4	Kota Samarinda, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara
24	Kep. Riau	4	Bintan, Kep. Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang
25	Lampung	4	Lampung Selatan, Pesawaran, Tulang Bawang, dan Way Kanan
26	Papua Barat	4	Fakfak, Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak
27	Papua Selatan	4	Asmat, Boven Digoel, Mappi, dan Merauke
28	Papua Barat Daya	3	Raja Ampat, Sorong, dan Sorong Selatan
29	Sulawesi Tengah	3	Banggai, Banggai Laut, dan Parigi Moutong
30	Di Yogyakarta	2	Bantul dan Kota Yogyakarta
31	Jambi	2	Merangin dan Muaro Jambi
32	Kep. Bangka Belitung	2	Belitung dan Belitung Timur
33	Nusa Tenggara	2	Lombok Utara dan Sumbawa

	Barat		Barat
34	Bali	1	Kota Denpasar
35	Kalimantan Selatan	1	Kota Banjarbaru
36	Kalimantan Utara	1	Tana Tidung

9. Daftar Kabupaten/Kota yang belum memiliki tim penanggulangan kasus PIE (termasuk MERS, Polio, dan Difteri) di rumah sakit rujukan (n=120 Kabupaten/Kota)

Tabel 62 Persebaran Kabupaten/Kota yang belum memiliki tim penanggulangan kasus PIE di RS Rujukan

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Aceh	11	Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Bener Meriah, Kota Subulussalam, dan Pidie
2	Sumatera Utara	11	Batubara, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidempuan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Nias Barat, Nias Selatan, Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, dan Toba
3	Nusa Tenggara Timur	8	Alor, Ende, Flores Timur, Lembata, Malaka, Rote Ndao, Sikka, dan Sumba Barat Daya
4	Bengkulu	7	Bengkulu Selatan, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko, Rejang Lebong, dan Seluma
5	Sulawesi Selatan	6	Barru, Bone, Kep. Selayar, Pinrang, Sidenreng Rappang, dan Toraja Utara
6	Sulawesi Tenggara	6	Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, dan Wakatobi
7	Sumatera Barat	6	Kep. Mentawai, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh,

			Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, dan Sijunjung
8	Maluku	5	Buru, Kep. Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, dan Maluku Tenggara Barat
9	Jawa Tengah	4	Brebes, Karanganyar, Pati, dan Pekalongan
10	Kalimantan Tengah	4	Barito Selatan, Kapuas, Murung Raya, dan Seruyan
11	Papua Barat	4	Fakfak, Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak
12	Papua Tengah	4	Deiyai, Dogiyai, Nabire, dan Paniai
13	Sumatera Selatan	4	Kota Pagar Alam, Lahat, Musi Rawas Utara, dan Penukal Abab Lematang Ilir
14	Jambi	3	Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo
15	Jawa Barat	3	Cianjur, Pangandaran, dan Tasikmalaya
16	Jawa Timur	3	Kediri, Mojokerto, dan Trenggalek
17	Kalimantan Barat	3	Kapuas Hulu, Kota Pontianak, dan Sintang
18	Kalimantan Selatan	3	Balangan, Banjar, dan Tanah Bumbu
19	Lampung	3	Lampung Selatan, Mesuji, dan Tulang Bawang
20	Maluku Utara	3	Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Pulau Taliabu
21	Papua	3	Kota Jayapura, Mamberamo Raya, dan Sarmi
22	Papua Selatan	3	Asmat, Boven Digoel, dan Mappi

23	Riau	2	Bengkalis dan Kuantan Singingi
24	Sulawesi Tengah	2	Parigi Moutong dan Poso
25	Sulawesi Utara	2	Kep. Sangihe dan Kep. Talaud
26	Di Yogyakarta	1	Kota Yogyakarta
27	Gorontalo	1	Pohuwato
28	Kalimantan Timur	1	Kutai Timur
29	Kalimantan Utara	1	Tana Tidung
30	Kep. Bangka Belitung	1	Bangka
31	Kep. Riau	1	Bintan
32	Papua Barat Daya	1	Sorong Selatan

10. Daftar Kabupaten/Kota yang belum menerapkan pilar 2 STBM (cuci tangan pakai sabun) (n=54 Kabupaten/Kota)

Tabel 63 Daftar Kabupaten/Kota yang belum menerapkan pilar 2 STBM

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Aceh	5	Aceh Tenggara, Aceh Utara, Gayo Lues, Kota Lhokseumawe, dan Nagan Raya
2	Sulawesi Barat	5	Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar
3	Lampung	4	Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, dan Way Kanan
4	Maluku Utara	4	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Pulau Taliabu
5	Papua Barat	4	Fakfak, Kaimana, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak

6	Sumatera Barat	4	Dharmasraya, Kota Padang Panjang, Sijunjung, dan Solok Selatan
7	Kalimantan Tengah	3	Kapuas, Lamandau, dan Sukamara
8	Nusa Tenggara Timur	3	Manggarai Timur, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya
9	Papua	3	Keerom, Mamberamo Raya, dan Supiori
10	Jambi	2	Bungo dan Tebo
11	Jawa Timur	2	Kediri dan Kota Batu
12	Maluku	2	Kepulauan Aru dan Maluku Tengah
13	Papua Tengah	2	Deiyai dan Mimika
14	Riau	2	Kuantan Singingi dan Pelalawan
15	Sulawesi Tengah	2	Kota Palu dan Poso
16	Bengkulu	1	Seluma
17	Jawa Barat	1	Indramayu
18	Kalimantan Barat	1	Kayong Utara
19	Kalimantan Timur	1	Kota Balikpapan
20	Papua Selatan	1	Mappi
21	Sumatera Selatan	1	Kota Palembang
22	Sumatera Utara	1	Batu Bara

11. Daftar Kabupaten/Kota yang belum menerapkan pilar 3 STBM (pengelolaan air minum dan makan rumah tangga) (n=44 Kabupaten/Kota)

Tabel 64 Daftar Kabupaten/Kota yang belum menerapkan pilar 3 STBM

No	Provinsi Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
----	-------------------	-----------------	---------------

1	Aceh	4	Aceh Tenggara, Aceh Utara, Gayo Lues, dan Nagan Raya
2	Papua	4	Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya, dan Supiori
3	Papua Barat	4	Fakfak, Kaimana, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak
4	Maluku Utara	3	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Pulau Taliabu
5	Papua Tengah	3	Deiyai, Dogiyai, dan Mimika
6	Jambi	2	Bungo dan Tebo
7	Jawa Barat	2	Bandung dan Indramayu
8	Jawa Timur	2	Kediri dan Kota Batu
9	Sulawesi Barat	2	Mamasa dan Polewali Mandar
10	Sulawesi Tengah	2	Morowali Utara dan Poso
11	Sumatera Barat	2	Dharmasraya dan Pasaman
12	Sumatera Selatan	2	Ogan Komering Ulu Selatan dan Penukal Abab Lematang Ilir
13	Sumatera Utara	2	Batu Bara dan Nias Selatan
14	Banten	1	Kota Serang
15	Bengkulu	1	Seluma
16	Kalimantan Barat	1	Kayong Utara
17	Kalimantan Tengah	1	Lamandau
18	Lampung	1	Lampung Utara
19	Maluku	1	Maluku Tengah

20	Nusa Tenggara Timur	1	Sumba Barat Daya
21	Papua Selatan	1	Mappi
22	Riau	1	Kuantan Singingi
23	Sulawesi Tenggara	1	Muna

12. Daftar Kabupaten/Kota yang menyatakan tidak adanya pelaporan *zero reporting* dari Balai Besar/Balai Karantina Kesehatan ke Dinas Kesehatan (n=127 Kabupaten/Kota)

Tabel 65 Daftar Kabupaten/Kota yang menyatakan tidak adanya pelaporan zero reporting dari B/BKK ke Dinas Kesehatan

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Jawa Tengah	8	Batang, Boyolali, Jepara, Kota Semarang, Kota Tegal, Pati, Pemalang, dan Rembang
2	Nusa Tenggara Barat	8	Bima, Dompu, Kota Bima, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, dan Sumbawa Barat
3	Sulawesi Utara	8	Bolaang, Mongondow, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kota Manado, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, dan Siau Tagulandang Biaro
4	Jawa Timur	7	Gresik, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Malang, Pacitan, Sumenep, dan Tuban
5	Maluku	7	Buru, Kepulauan Aru, Kota Ambon, Kota Tual, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara
6	Nusa Tenggara Timur	6	Belu, Manggarai, Rote Ndao, Sikka, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara
7	Sulawesi Tengah	6	Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Morowali, Morowali

			Utara, dan Toli-Toli
8	Sumatera Utara	6	Deli Serdang, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, dan Tapanuli Utara
9	Aceh	5	Aceh Barat, Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Pidie
10	Riau	5	Indragiri Hilir, Kep. Meranti, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, dan Siak
11	Jawa Barat	4	Kota Bandung, Kota Cirebon, Majalengka, dan Sukabumi
12	Kalimantan Tengah	4	Kapuas, Kota Palangkaraya, Seruyan, dan Sukamara
13	Kalimantan Timur	4	Berau, Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Paser
14	Kalimantan Utara	4	Bulungan, Kota Tarakan, Malinau, dan Nunukan
15	Kep. Bangka Belitung	4	Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang
16	Sulawesi Selatan	4	Barru, Bulukumba, Luwu Timur, dan Kota Makassar
17	Bali	3	Badung, Jembrana, dan Karangasem
18	Di Yogyakarta	3	Gunungkidul, Kulonprogo, dan Sleman
19	Kalimantan Barat	3	Ketapang, Sambas, dan Sanggau
20	Sulawesi Barat	3	Mamuju, Pasangkayu, dan Polewali Mandar
21	Sumatera Barat	3	Kep. Mentawai, Kota Padang, dan Padang Pariaman
22	Gorontalo	2	Kota Gorontalo dan Pohuwato
23	Jambi	2	Kota Jambi dan Tanjung

			Jabung Timur
24	Kalimantan Selatan	2	Kota Banjarbaru dan Tanah Bumbu
25	Kep. Riau	2	Bintan dan Kep. Anambas
26	Papua	2	Biak Numfor dan Jayapura
27	Papua Barat	2	Fakfak dan Teluk Bintuni
28	Papua Selatan	2	Boven Digoel dan Merauke
29	Papua Tengah	2	Mimika dan Nabire
30	Sulawesi Tenggara	2	Kolaka dan Konawe Selatan
31	Banten	1	Kota Tangerang
32	Bengkulu	1	Kaur
33	Maluku Utara	1	Pulau Morotai
34	Papua Barat Daya	1	Raja Ampat

13. Daftar Kabupaten/Kota yang menyatakan tidak memiliki dokumen rencana kontijensi (n=417 Kabupaten/Kota)

Tabel 66 Persebaran Kabupaten/Kota yang menyatakan tidak memiliki dokumen rencana kontijensi

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Jawa Tengah	33	Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Wonogiri, dan Wonosobo

2	Sumatera Utara	32	Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padangsidempuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba
3	Jawa Timur	28	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lamongan, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban
4	Jawa Barat	23	Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kuningan, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya
5	Sulawesi Selatan	19	Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Utara,

			Maros, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Wajo
6	Aceh	18	Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Subulussalam, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulue
7	Sumatera Barat	18	Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, dan Tanah Datar
8	Nusa Tenggara Timur	17	Alor, Belu, Ende, Kota Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara
9	Sulawesi Tenggara	17	Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kota Baubau, Kota Kendari, Muna, Muna Barat, dan Wakatobi
10	Sumatera Selatan	14	Empat Lawang, Kota Palembang, Kota Prabumulih,

			Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, dan Penukal Abab Lematang Ilir
11	Lampung	13	Kota Metro, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulangbawang, dan Way Kanan
12	Kalimantan Selatan	12	Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarmasin, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tapin
13	Kalimantan Tengah	12	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Kapuas, Katingan, Kota Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, dan Sukamara
14	Sulawesi Utara	12	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Tomohon, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, dan Siau Tagulandang Biaro
15	Kalimantan Barat	11	Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Landak, Melawi, Sambas, Sekadau, dan Sintang

16	Riau	11	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Siak
17	Bengkulu	10	Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Kota Bengkulu, Lebong, Mukomuko, Rejang Lebong, dan Seluma
18	Maluku Utara	10	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu
19	Bali	9	Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karang Asem, Klungkung, Kota Denpasar, dan Tabanan
20	Jambi	9	Batang Hari, Bungo, Kota Sungai Penuh, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo
21	Maluku	9	Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kota Ambon, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Seram Bagian Barat
22	Nusa Tenggara Barat	9	Bima, Dompu, Kota Bima, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Sumbawa Barat
23	Sulawesi Tengah	9	Banggai, Banggai Laut, Donggala, Kota Palu,

			Morowali, Morowali Utara, Poso, Sigi, dan Tojo Una-Una
24	Kalimantan Timur	7	Berau, Kota Bontang, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, dan Penajam Paser Utara
25	Papua	7	Biak Numfor, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura, Mamberamo Raya, Sarmi, dan Supiori
26	Banten	6	Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Lebak, dan Tangerang
27	Gorontalo	5	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Pohuwato
28	Papua Barat	5	Fakfak, Kaimana, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Teluk Bintuni
29	Papua Tengah	5	Deiyai, Dogiyai, Mimika, Nabire, dan Paniai
30	Sulawesi Barat	5	Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar
31	DI Yogyakarta	4	Bantul, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, dan Sleman
32	Kep. Bangka Belitung	4	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, dan Kota Pangkal Pinang
33	Kep. Riau	4	Karimun, Kep. Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang
34	Kalimantan Utara	3	Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung
35	Papua Barat Daya	3	Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw
36	Papua Selatan	3	Asmat, Boven Digoel, dan

			Mappi
37	DK Jakarta	1	Kep. Seribu

14. Daftar Kabupaten/Kota yang menyatakan tidak memiliki media promosi Polio yang terdistribusi ke fasyankes (n = 21 kabupaten/kota)

Tabel 67 Daftar Kabupaten/Kota yang menyatakan tidak memiliki media promosi Polio yang terdistribusi ke fasyankes

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kabupaten/Kota
1	Aceh	3	Bener Meriah, Gayo Lues, dan Kota Subulussalam
2	Jambi	2	Bungo dan Merangin
3	Papua Barat	2	Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak
4	Sumatera Barat	2	Agam dan Kota Solok
5	Bengkulu	1	Kepahiang
6	Gorontalo	1	Kota Gorontalo
7	Jawa Timur	1	Pamekasan
8	Kalimantan Barat	1	Kapuas Hulu
9	Kalimantan Tengah	1	Kota Palangka Raya
10	Kalimantan Timur	1	Berau
11	Kep. Bangka Belitung	1	Belitung Timur
12	Papua	1	Supiori
13	Papua Tengah	1	Deiyai
14	Sulawesi Tengah	1	Tojo Una - Una
15	Sulawesi Utara	1	Kepulauan Talaud
16	Sumatera Utara	1	Kota Pematang Siantar

15. Daftar Kabupaten/Kota yang menyatakan tidak memiliki media promosi MERS yang terdistribusi ke fasyankes (n = 145 kabupaten/kota)

Tabel 68 Daftar Kabupaten/Kota yang menyatakan tidak memiliki media promosi MERS yang terdistribusi ke fasyankes

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Nama Kabupaten/Kota
1	Sumatera Utara	20	Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Pematang Siantar, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah
2	Sulawesi Selatan	9	Barru, Enrekang, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, dan Takalar, Tana Toraja, Wajo
3	Sulawesi Tengah	7	Banggai Kepulauan, Buol, Donggala, Kota Palu, Morowali Utara, Sigi, dan Tojo Una-Una
4	Jawa Timur	7	Madiun, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang, Situbondo, dan Trenggalek
5	Maluku	7	Buru, Kota Ambon, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur
6	Sumatera Barat	7	Kep. Mentawai, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Sijunjung
7	Nusa Tenggara Timur	6	Belu, Flores Timur, Lembata, Sikka, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Selatan

8	Aceh	5	Aceh Barat, Aceh Utara, Bener Meriah, Kota Subulussalam, dan Pidie
9	Sulawesi Tenggara	5	Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Kota Baubau, Muna, dan Wakatobi
10	Papua Barat	5	Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Teluk Bintuni
11	Maluku Utara	5	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Kota Ternate, dan Pulau Morotai
12	Jawa Tengah	4	Demak, Jepara, Kota Pekalongan, dan Purbalingga
13	Sulawesi Utara	4	Bolaang Mongondow, Kepulauan Talaud, Minahasa, dan Minahasa Tenggara
14	Bengkulu	4	Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, dan Rejang Lebong
15	Papua	4	Biak Numfor, Jayapura, Keerom, dan Sarmi
16	Kalimantan Selatan	4	Hulu Sungai Selatan, Kota Banjar Baru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut
17	Papua Tengah	4	Deiyai, Dogiyai, Nabire, dan Paniai
18	Nusa Tenggara Barat	3	Bima, Sumbawa, dan Sumbawa Barat
19	Jawa Barat	3	Cianjur, Kota Cirebon, dan Pangandaran
20	Papua Barat Daya	3	Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrau
21	Kalimantan Tengah	3	Barito Selatan, Barito Timur,

			dan Katingan
22	Sumatera Selatan	3	Kota Pagar Alam, Muara Enim, dan Ogan Komering Ulu Timur
23	Kep. Bangka Belitung	3	Bangka Selatan, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang
24	Banten	3	Kota Cilegon, Pandeglang, dan Serang
25	Lampung	3	Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus
26	Bali	2	Buleleng dan Karang Asem
27	Papua Selatan	2	Boven Digoel dan Mappi
28	Kep. Riau	2	Bintan dan Natuna
29	Riau	2	Indragiri Hilir dan Kuantan Singingi
30	Kalimantan Timur	2	Berau dan Kota Samarinda
31	Jambi	1	Sarolangun
32	Kalimantan Barat	1	Sanggau
33	Gorontalo	1	Kota Gorontalo
34	Kalimantan Utara	1	Kota Tarakan

16. Daftar Kabupaten/Kota yang tidak pernah membuat laporan pemantauan haji setelah kepulangan (n=50 Kabupaten/Kota)

Tabel 69 Daftar Kabupaten/Kota yang tidak pernah membuat laporan pemantauan haji setelah kepulangan

No	Provinsi Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota	Nama Kab/Kota
1	Nusa Tenggara Timur	5	Malaka, Manggarai, Sikka, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Selatan
2	Sulawesi Tengah	5	Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Morowali Utara, dan Tojo Una-Una
3	Sumatera Utara	5	Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, dan Samosir
4	Maluku	4	Buru, Kota Tual, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara Barat
5	Papua	4	Biak Numfor, Jayapura, Mamberamo Raya, dan Supiori
6	Papua Barat	4	Kaimana, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Teluk Bintuni
7	Papua Selatan	3	Boven Digoel, Mappi, dan Merauke
8	Papua Tengah	3	Deiyai, Dogiyai, dan Nabire
9	Sulawesi Tenggara	3	Konawe, Konawe Kepulauan, dan Konawe Utara
10	Aceh	2	Bener Meriah, dan Kota Subulussalam
11	Kalimantan Timur	2	Kota Samarinda, dan Penajam Paser Utara
12	Papua Barat Daya	2	Sorong dan Tambrau

13	Sulawesi Utara	2	Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud
14	Sumatera Selatan	2	Kota Lubuklinggau dan Kota Pagar Alam
15	Bali	1	Karang Asem
16	Maluku Utara	1	Pulau Taliabu
17	Sulawesi Selatan	1	Barru
18	Sumatera Barat	1	Kepulauan Mentawai